

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

RHINO HARI W R

NIM 105030400111089



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2017

MOTTO

*MAN SALAKA THORIQON ILAL 'ILMI SALAKALLAHU BIHI
THORIQON ILAL JANNATI*

*WAINNAL 'ALIMA YASTAGHFIRU LAHU MAN FISSAMAWATI
WAMAN FIL'ARDHI HATTAL HITANI FILBAHRI.*

*" BARANG SIAPA MENEMPUH JALAN MENUJU ILMU, MAKA
ALLAH AKAN MEMPERMUDAH JALAN MENUJU SURGA. DAN
SEBENARNYA ORANG YANG BERILMU SELALU DIMUTUAKAN
AMPUNAN (ATAS DOSA – DOSANYA) OLEH SEMUA MUKHLAK
DI LANGIT DAN DI BUMI, HINGGA IKAN – IKAN DI LAUT. "*
(AL-HADIST)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari : Rabu
Taggal : 25 Januari 2017
Jam : 8.00 WIB.
Skripsi atas nama : Rhino Hari Wicaksono Ristianto
Judul : Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lamongan)

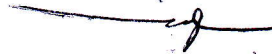
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si
NIP. 19721117 199802 2 001

Anggota



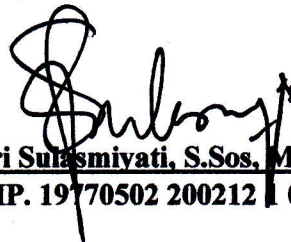
Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB,DBA
NIP. 19780210 200501 1 002

Anggota



Dra. Zahroh ZA., M.si
NIP. 19591202 198403 2 001

Anggota



Sri Sulasmivati, S.Sos, M.AP
NIP. 19770502 200212 1 003

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan Kabupaten Lamongan)

Disusun oleh : Rhino Hari Wicaksono Ristianto

NIM : 105030400111089

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 1 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si
NIP. 19721117 199802 2 001

Anggota



Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA
NIP. 19780210 200501 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang, pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70),

Malang, 05 Januari 2017



NIM. 105030400111089

RINGKASAN

Rhino Hari Wicaksono Ristiano, **Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan** (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan bangunan Kabupaten Lamongan), Dr.Hamidah Nayati Utami, S.Sos. M.Si, Mohammad Iqbal, S.Sos. M.IB, DBA

Penelitian ini berusaha menjawab fenomena penurunan pendapatan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 dengan menekankan dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurunnya penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2011 dapat disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan tersebut adalah pengetahuan. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah faktor ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah :
(1) Bagaimanakah determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan secara simultan pada variabel tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak pada wajib Pajak PBB di Kabupaten Lamongan?
(2) Bagaimanakah determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan pengaruh secara parsial pada variabel tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak pada wajib Pajak PBB di Kabupaten Lamongan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory research). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini ada 2, yaitu: (1) Tingkat ekonomi (X1) dan (2) Pengetahuan pajak (X2). Berdasarkan Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, serta luasnya wilayah, maka penelitian ini menggunakan sampel sebesar 2,5% dari populasi di masing-masing cluster dengan perincian sebagai berikut Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo $4.606 \text{ orang} \times 2,5\% = 115,15$ sampel dibulatkan menjadi 115 orang, kelurahan Temanggung Kecamatan Lamongan $1.730 \text{ orang} \times 2,5\% = 43,25$ sampel dibulatkan menjadi 43 orang, sehingga jumlah seluruh sampel sebanyak 158 orang. Alat pengumpulan data menggunakan angket yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan Analisis regresi dan analisis Parsial yang perhitungannya menggunakan komputer program SPSS 23 for windows.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Pajak secara simultan merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif dengan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ($82,663 > 3,05$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$).
2. Tingkat Ekonomi merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,723

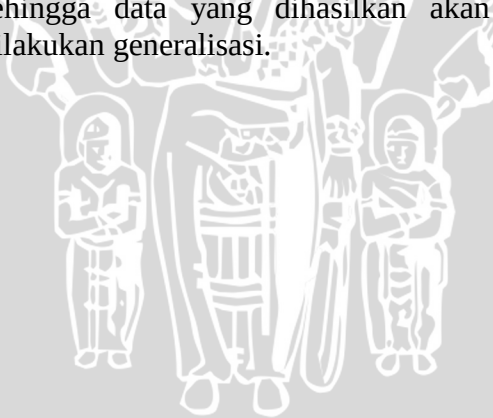
dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($5,034 > 1,655$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$).

3. Pengetahuan pajak secara parsial merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,265 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($2,204 > 1,655$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,026 < 0,050$).

4. Tingkat ekonomi merupakan determinan paling dominan dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya :

1. Kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ataupun perangkat desa untuk menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat seperti dengan memberikan brosur terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan serta memasang Pamflet di kantor saat masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dilakukan dengan pembagian hadiah secara diundi bagi para wajib pajak yang membayar Pajak bumi dan Bangunan sebelum masa berakhir.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi.



SUMMARY

Rhino Hari Wicaksono Ristiano, ***Determinants Taxpayer Compliance Undertaking Tax Payment And Building*** (A Study on Tax Payer Taxes on land and buildings Lamongan) Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos. M.Si, Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, DBA

This study seeks to answer the phenomenon of decline in state revenue from land and building tax from 2011 through 2014 with an emphasis on the factors that influence taxpayer compliance in property tax. The decline in revenue from land and building tax since 2011 may be due to the level of taxpayer compliance is low in paying property taxes. One of the factors that affect the poor adherence is knowledge. Another factor that affects a person's compliance in paying taxes on land and buildings is economic factors.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How is the determinant of Taxpayer Compliance Undertaking Earth And Building Tax Payments simultaneously at a variable rate of economic and tax knowledge on the UN Tax mandatory in Lamongan? (2) How is the determinant of Taxpayer Compliance Undertaking Tax Payment And Building partial effect on the variable rate of economic and tax knowledge on the UN Tax mandatory in Lamongan?

This type of research used in this research is the explanation (explanatory research). The dependent variable in this study is the taxpayer compliance. The independent variables in this study there are two, namely: (1) economic level (X1) and (2) Knowledge of tax (X2). Based on the ability of researchers views of time, effort and funds, as well as the breadth of the region, this study used a sample of 2.5% of the population in each cluster, comprising the village of 4,606 people DermolemahbangSubdistrictSarirejo $\times 2.5\% = 115$, 15 samples rounded up to 115 people, the village TemanggunganLamongan District 1,730 people $\times 2.5\% = 43.25$ rounded to 43 samples, so that the total sample of 158 people. Data collection tool using a questionnaire that has been tested for validity and reliability. Data were analyzed using regression analysis and the calculation Partial analysis using SPSS 23 for windows.

Based on the analysis that has been done, the conclusion that can be drawn from this study are as follows:

1. Level of Knowledge Economy and Taxes simultaneously is a determinant of Taxpayer Compliance Implement land and building tax payment. This is indicated by the value of the regression coefficient is positive with F count is greater than the value of F table ($82.663 > 3.05$) as well as the significance value is less than the 5% significance ($0.000 < 0.050$).
2. Level economy is determinant Taxpayer Compliance Implement land and building tax payment in Lamongan district. This is indicated by the value of the regression coefficient is positive, that is 0.723 and the value of t is greater than t table ($5.034 > 1.655$) as well as the significance value is less than the 5% significance ($0.000 < 0.050$).
3. Knowledge is partially tax determinant Taxpayer Compliance Implement land and building tax payment in Lamongan district. This is indicated by the value of the regression coefficient is positive, ie 0,265 and the value of t is greater than t table

(2.204 > 1.655) as well as the significance value is less than the 5% significance (0.026 < 0.050).

4. The level of the economy is the most dominant determinant in influencing the Taxpayer Compliance pay land and building tax in Lamongan district.

In accordance with the conclusions and limitations of this study, it can be put forward some suggestions to improve taxpayer compliance include:

1. To the Directorate General of Taxation (DGT) or the village committee to increase the intensity of public education by providing brochures bleak associated with land and building tax and put pamphlets in the office when a payment term land and building tax.
2. To raise awareness of taxpayers in paying tax on land and buildings, can be done by a lottery prize distribution for parea taxpayers who pay taxes and building earth before its expiration.
3. For the next researcher can use other variables so as to further include new variables that would affect the level of tax compliance. In addition, it is advisable to observe more research so that the resulting data will be more accurate and allows to do generalizations.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB Di Kabupaten Lamongan)”

Skripsi ini Merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Progam Studi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, Msi selaku Ketua Progam Studi Perpajakan Fakultas ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, MSi, selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah berkenan dan sabar memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, MIB, DBA selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah berkenan dan sabar memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh keluarga besar FIA, termasuk Dosen dan Staff dan karyawan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, nasehat, semangat, dan pelayanan yang terbaik.
7. Seluruh keluargaku yang selalu memberikan nasehat, kedua orang tuaku tersayang, bapak Ristianto dan ibu supanik yang selama ini terus memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, yang senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan moral maupun materiel.
8. Teman-temanku seperjuangan serta teman-teman Program studi Perpajakan angkatan 2010 yang turut memberikan dukungan dan semangat baik langsung maupun tidak langsung. semoga persahabatan selalu terjaga.
9. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun memberikan banyak dukungan atas penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2017

Rhino Hari W R

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Peneliti Terdahulu	12
B. Pertumbuhan Ekonomi	19
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	20
C. Dasar-Dasar Perpajakan	29
1. Pengertian Pajak	29
2. Fungsi Pajak	30
3. Jenis-Jenis Pajak.....	32
4. Sistem Pemungutan Pajak	34
5. Asas Pemungutan Pajak	36
6. Teori Pajak Murni.....	38
7. Teori-Teori yang mendukung Pemungutan Pemungutan Pajak	39
D. Pajak Bumi dan Bangunan	44
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	44

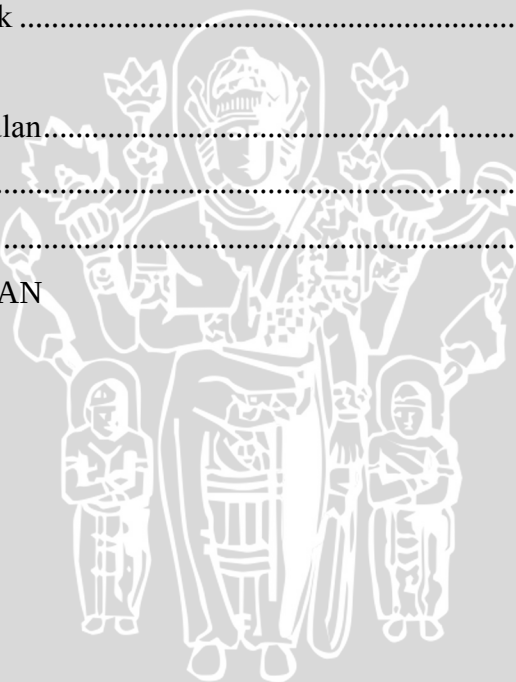
2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan	45
3. Hak Wajib Pajak PBB-P2	46
4. Kewajiban Wajib Pajak PBB-P2	47
5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	47
6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	49
7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak	51
8. Nilai Jual Objek Pajak	51
9. Dasar Pengenaan PBB-P2	52
10. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	52
E. Tingkat Ekonomi	53
F. Pengetahuan Pajak.....	55
G. Kepatuhan	57
H. Model Kerangka Konsep dan Hipotesis	61
1. Model kerangka konsep.....	61
2. Hipotesis	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	66
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Konsep dan Variabel Penelitian	67
D. Populasi dan Sampel	69
1. Populasi	69
2. Sampel	72
3. Teknik Pengambilan Sampel	73
E. Pengumpulan Data	74
1. Sumber Data	74
2. Teknik Pengambilan Data	74
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	79
1. Uji Validitas	79
2. Uji Reliabilitas	82
G. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	83
1. Pengujian Asumsi Klasik Model Regresi Berganda.....	83

2. Teknik Analisis	86
3. Uji Hipotesis.....	87

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	91
1. Kecamatan Sarirejo	91
2. Kecamatan Lamongan	94
B. Deskripsi Data Responden.....	96
1. Resonden berdasarkan Asal Kecamatan.....	96
2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	97
3. Responden Berdasarkan Usia.....	97
4. Responden Berdasarkan Pendidikan	98
5. Responden Berdasarkan Pendapatan	98
C. Deskripsi Data Penelitian	99
1. Analisis Diskriptif	99
a. Deskripsi Variabel Tingkat ekonomi	99
b. Deskripsi Variabel Pengetahuan pajak	106
c. Deskripsi Variabel Kepatuhan wajib pajak	115
2. Analisis Data Inferensial	125
a. Uji Asumsi Klasik	125
1) Uji Multikolinieritas.....	125
2) Uji Heterokedastisitas	126
3) Uji Normalitas	127
b. Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda.....	129
D. Pengujian Hipotesis	131
1. Uji F (Pengujian hipotesis secara simultan).....	131
2. Uji t (Uji Hipotesis Secara Parsial)	132
a. Uji t antara Tingkat Ekonomi dengan Kepatuhan wajib pajak	133
b. Uji t antara Pengetahuan pajak dengan Kepatuhan wajib pajak	133

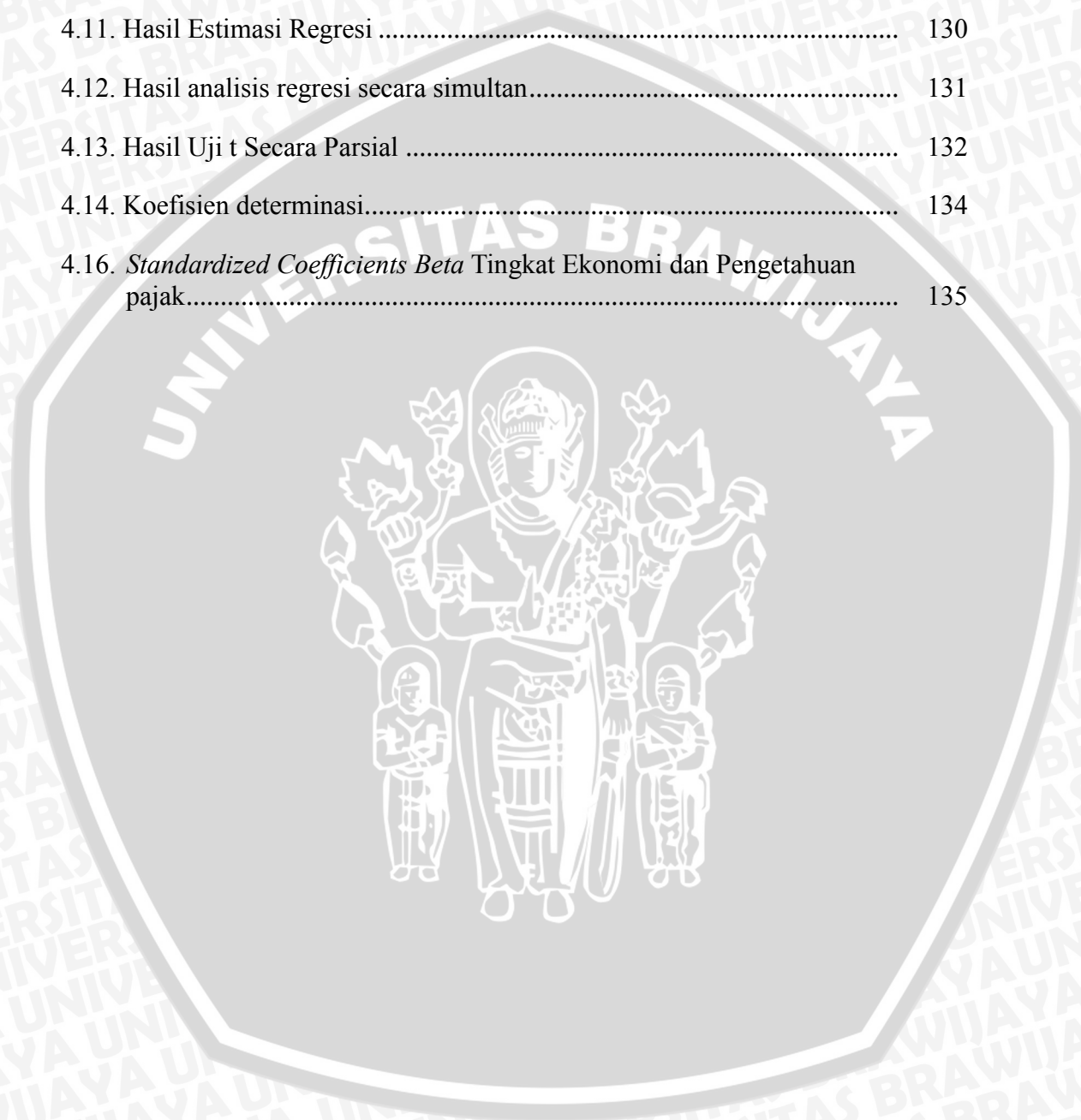
3. Koefisien Determinasi (R^2)	134
4. Faktor yang paling dominan.....	135
E. Pembahasan.....	136
1. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan secara simultan pada variabel tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak di Kabupaten Lamongan.....	136
2. Pengaruh Tingkat ekonomi terhadap Kepatuhan wajib pajak	138
3. Pengaruh Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak	139
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Persentase Penerimaan Pajak Terhadap GNP di Berbagai Negara	2
1.2. Penerimaan Negara (milyar rupiah) 2009-2013	4
2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	16
2.2 Perbandingan Premi Asuransi dengan Pembayaran pajak.....	40
3.1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kecamatan tahun 2015	70
3.2. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tahun 2015	71
3.3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tahun 2015	71
3.4. Desain Kuisisioner Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Lamongan Tahun 2016	76
3.5. Hasil validitas Kuisisioner Tingkat ekonomi	80
3.6. Hasil validitas Kuisisioner Pengetahuan Pajak	81
3.7. Hasil validitas Kuisisioner Kepatuhan membayar Pajak	82
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Kecamatan.....	96
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	97
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	97
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	98
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	98
4.6. Tabel Distribusi Frekuensi Tingkat ekonomi.....	99
4.7. Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan perpajakan.....	106
4.8. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib pajak.....	116
4.9. Hasil Uji Multikolinieritas.....	126

4.10. Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogrov-Smirnov untuk Uji Normalitas:	129
4.11. Hasil Estimasi Regresi	130
4.12. Hasil analisis regresi secara simultan.....	131
4.13. Hasil Uji t Secara Parsial	132
4.14. Koefisien determinasi.....	134
4.16. <i>Standardized Coefficients Beta</i> Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan pajak.....	135



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model Kerangka Konsep	62
2.2. Gambaran Hipotesis secara simultan dan parsial	63
3.1. Daerah daerah penolakan dan penerimaan H_0 dengan uji F	88
3.2. Daerah daerah penolakan dan penerimaan H_0 dengan uji t	89
4.1. Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Sarirejo	93
4.2. Hasil Pengujian Heterokedastisitas.....	127
4.3. Hasil Pengujian Normalitas	128
4.4. Daerah Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji F pada Perhitungan Secara Simultan antara Tingkat ekonomi dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak.....	132
4.5. Daerah Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji t pada Variabel Tingkat Ekonomi dengan Kepatuhan wajib pajak.....	133
4.6. Daerah Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji t pada Variabel Pengetahuan pajak dengan Kepatuhan wajib pajak	134
4.7. Lokasi t Hitung Masing-masing Variabel Bebas pada Daerah Penolakan H_0	136

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	146
2. Data Responden	152
3. Uji Validitas dan reliabilitas Tingkat Ekonomi (X1)	170
4. Uji Validitas dan reliabilitas Pengetahuan Pajak (X2).....	172
5. Uji Validitas dan reliabilitas Kepatuhan Membayar Pajak (Y).....	173
6. Analisis Inferensial	176
7. Analisis Regresi	193
8. Surat Bukti Penelitian	206
9. Kurikulum Vitae	208



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijaksanaan fiskal adalah suatu kebijaksanaan makro ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kondisi perekonomian (sebagai stabilisator perekonomian). Porsinya sebagai stabilisator perekonomian menuntut suatu pelaksanaan di lapangan yang efisien dan efektif. Hal ini hanya dapat diwujudkan, kalau sejak masa pengaturan dan pembentukan undang-undang sudah disusun sedemikian rupa berdasarkan urgensinya yang sangat mendasar, dengan tidak mengesampingkan asas-asas yang berlaku dalam pemungutan pajak dan penerapan teknologi dan tata cara yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan. Perkembangan suatu perekonomian dan politik suatu negara menuntut suatu perubahan pelaksanaan dan pelayanan pajak yang cepat dan akurat, dalam arti perubahan yang perlu dilakukan bukan hanya sektor perubahan dan kebijaksanaan belaka, melainkan harus diimbangi dengan kesiapan dan kesigapan para pelaksanaan dengan perangkat teknologi yang memadai (Judisseno, 2004:21).

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum (*public*). Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak ini merupakan "motor penggerak"

kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan, dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, nyatalah bahwa pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Judisseno, 2005:34).

Peranan pajak bagi tiap negara pada dasarnya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Apalagi bila berbeda sistem, kemajuan perekonomian, politik, dan pemerintahan dari negara yang menerapkan. Hal ini terlihat di antaranya dari persentase besaran pajak terhadap Produk Nasional Bruto (PNB) dalam satu kurun waktu tertentu (Pandiangan, 2008:66). Perbedaan peranan ini dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1.1. Persentase Penerimaan Pajak Terhadap GNP di Berbagai Negara

No.	Kelompok Negara	Rasio Pajak Terhadap GNP
1	Negara-negara berpenghasilan rendah (pendapatan perkapita kurang dari \$400)	15.60 %
2	Negara-negara berpenghasilan menengah bawah (pendapatan per kapita antara \$400 - \$1,600)	20.90 %
3	Negara-negara berpenghasilan menengah ke atas	23.60 %
4	Negara-negara industri	24.50 %

Sumber: Laporan Bank Dunia (dalam Pandiangan, 2008: 66)

Dari tabel di atas terlihat dan dapat disimpulkan bahwa peranan pajak proporsional dan berkorelasi secara positif dengan perkembangan kemajuan -- secara ekonomi-- di suatu negara. Di negara-negara yang masuk kategori berpenghasilan rendah, persentase pajak terhadap Produk Nasional Bruto

(PNB) juga masih rendah, yakni sekitar 15,60%. Namun demikian, walaupun persentase pajak masih rendah, melalui penerimaan pajak tersebut sangat berperan dalam melancarkan berlangsungnya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk menyediakan barang-barang dan jasa publik (*public goods and services*) yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, di negara-negara yang berpenghasilan menengah hingga ke atas termasuk negara-negara industri, terlihat persentase pajak terhadap PNB yang tinggi, yakni sekitar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kegiatan ekonomi yang tinggi dan makin maju di suatu negara, akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan penghasilan/pendapatan masyarakat. Sesuai dengan mekanisme *multiplier effect*, kondisi ini pada akhirnya memberikan kontribusi besar kepada penerimaan pajak di negara-negara tersebut (Pandiangan, 2008:67).

Jadi penerimaan Negara dari sektor pajak mempunyai kontribusi besar dalam kesejahteraan masyarakat. Pajak ialah pungutan Negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, sedangkan pengertian pajak menurut Undang Undang No.28 Pasal 1 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak dapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1.2. Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2010-2014

SUMBER PENERIMAAN	2010	2011	2012	2013	2014
I. Penerimaan Dalam Negeri	992.249	1.205.346	1.332.323	1.497.521	1.661.148
A. Penerimaan Perpajakan	723.307	873.874	980.518	1.148.365	1.310.219
1. Pajak Dalam Negeri	694.392	819.752	930.862	1.099.944	1.256.304
a. Pajak Penghasilan	357.045	431.122	465.070	538.760	591.621
b. Pajak Pertambahan Nilai	230.605	277.800	337.584	423.708	518.879
c. Pajak Bumi dan Bangunan	28.581	29.893	28.969	27.344	25.541
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.026	..1	0	0	0
e. Cukai	66.166	77.010	95.028	104.730	114.284
f. Pajak Lainnya	3.969	3.928	4.211	5.402	5.980
2. Pajak Perdagangan Internasional	28.915	54.122	49.656	48.421	53.915
a. Bea Masuk	20.017	25.266	28.418	30.812	33.937
b. Pajak Ekspor	8.898	28.856	21.238	17.609	19.978
B. Penerimaan Bukan Pajak	268.942	331.472	351.805	349.156	350.930
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	168.825	213.823	225.844	203.730	198.088
2. Bagian laba BUMN	30.097	28.184	30.798	36.456	37.000
3. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	59.429	69.361	73.459	85.471	91.083
4. Pendapatan Badan Layanan Umum	10.591	20.104	21.704	23.499	24.759
II. Hibah	3.023	5.254	5.787	4.484	1.360
Jumlah	995.272	1.210.600	1.338.110	1.502.005	1.662.509

Sumber: Departemen Keuangan (2015)

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2015), diindikasikan bahwa penerimaan perpajakan khususnya pajak dalam negeri setiap tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Namun jika diperhatikan secara seksama diketahui bahwa penerimaan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu mengalami penurunan dari Rp 29.893 milyar tahun 2011 menjadi Rp 28.969

milyar pada tahun 2012, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 27.344 milyar dan menjadi Rp 25.541 milyar pada tahun 2014. Kondisi tersebut tentunya bertentangan dengan pendapat Suhardito dan Sudibyo (dalam Putri dan Isgiyarta, 2013:1) yang menyatakan bahwa PBB mempunyai wajib pajak yang terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan berpresentase lebih besar dibandingkan dengan presentase kenaikan pajak lain dan APBN.

Menurunnya penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2011 dapat disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan tersebut adalah pengetahuan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku terbuka (*Overt behavior*). Perilaku yang didasari pengetahuan umumnya berlangsung lama (Sunaryo, 2014:25). Sehingga jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik terhadap obyek yang diamati, maka akan merangsang munculnya perilaku tertentu.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009:7). Jadi pengetahuan pajak adalah seberapa jauh seseorang mengetahui tentang kewajibannya membayar iuran kepada negara terkait dengan objek pajak yang dimiliki yang dalam penelitian adalah pajak bumi dan bangunan.

Kaitan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan membayar pajak sebagaimana penelitian Istanto (2010), yang diperoleh hasil bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Demikian pula penelitian Alviansyah (2011) dengan hasil bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT masa wajib pajak orang pribadi. Hal ini diperkuat dengan penelitian Oladipupo dan Obazee (2015), yang diperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan pajak.

Jadi menurut peneliti semakin baiknya pengetahuan seseorang terhadap pajak, maka semakin baik pemahamannya terhadap peran pajak dalam pembangunan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sehingga akan menjalankan kewajibannya yang tertuang dalam kepatuhan dalam membayar pajak. Kondisi inilah yang melatar belakangi peneliti memilih faktor pengetahuan sebagai salah satu determinan yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi atau kondisi ekonomi dikenal sebagai status ekonomi. Menurut Surbakti (2003: 144), status ekonomi ialah kedudukan seseorang di dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Faktor kekayaan tersebut merupakan dasar penentuan pelapisan seseorang di dalam masyarakat berdasarkan status ekonominya.

Berdasarkan hasil penelitian Haryuda (2013) yang diperoleh hasil

bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Demikian pula Purwanto (2015) yang diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan faktor tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hasil penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) diperoleh hasil bahwa tingkat ekonomi mempunyai pengaruh individual yang sangat kecil terhadap Kepatuhan PBB.

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa kemampuan seseorang secara ekonomi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak, sebab semakin baik tingkat ekonomi seseorang berarti semakin baik pula kondisi finansialnya, sehingga potensi untuk membayar kewajibannya dalam bentuk pajak juga semakin baik dibandingkan kelompok dengan tingkat ekonomi yang kurang baik. Kondisi inilah yang menjadikan pertimbangan peneliti menggunakan faktor tingkat ekonomi dalam penelitian ini.

Penelitian ini berusaha menjawab fenomena penurunan pendapatan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 dengan menekankan dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak, tetapi peneliti membatasi hanya pada faktor pengetahuan baik pengetahuan umum maupun pengetahuan tentang pajak dan tingkat ekonomi. Posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai perbandingan, dimana jika pada penelitian terdahulu pengambilan

sampel tanpa memperhatikan tingkat realisasi target dan pencapaian suatu desa, tetapi karena permasalahan penelitian ini memfokuskan pada menurunnya penerimaan negara pada pajak bumi dan bangunan, maka desa dan kota yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rendahnya tingkat realisasi target dan pencapaian Pajak bumi dan bangunan di kabupaten Lamongan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul ***“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan” (Studi Pada Wajib Pajak PBB Kabupaten Lamongan)***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan secara simultan pada variabel tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak pada wajib Pajak PBB di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimakah determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan pengaruh secara parsial pada variabel tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak pada wajib Pajak PBB di Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan secara simultan pada variabel

tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak pada wajib Pajak PBB di Kabupaten Lamongan.

2. Menganalisis determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan secara parsial pada variabel tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak pada wajib Pajak PBB di Kabupaten Lamongan.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang ada dilapangan dimana penerimaan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 selalu mengalami penurunan, kondisi tersebut tentunya bertentangan dengan pendapat Suhardito dan Sudibyo (dalam Putri dan Isgiyarta, 2013:1) yang menyatakan bahwa PBB mempunyai wajib pajak yang terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan berpresentase lebih besar dibandingkan dengan presentase kenaikan pajak lain dan APBN. Karena jumlah wajib pajak PBB sangat besar sedangkan pendapatan negara dari sektor ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka perlu mendapatkan pengkajian secara ilmiah terkait dengan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi khususnya terkait dengan perpajakan, serta dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian dengan masalah yang sama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak PBB, sehingga penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

E. Sistematika Pembahasan Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya konsep tentang Pajak, Pajak bumi dan bangunan, Pengetahuan, Tingkat Ekonomi, Kepatuhan membayar pajak, Pengaruh pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan desa dan kota, serta hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian yang memuat mengenai : jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data yang menggambarkan sejumlah variabel yang mencerminkan karakteristik dari objek penelitian serta menjelaskan hasil analisis data dan pembahasan secara komprehensif terhadap hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini memuat kesimpulan serta saran-saran yang merupakan implementasi dari penemuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu dasar di adakan penelitian sesudahnya, dan untuk melihat apakah hasil penelitian tersebut sama dan relevan jika diterapkan pada objek penelitian lainnya. Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak telah dilakukan. Besarnya pengaruh atau signifikan pengaruh faktor-faktor tersebut tentunya tidak selalu sama pada setiap penelitian. Ada beberapa faktor yang membuat hasil penelitian itu berbeda, diantaranya faktor lokasi penelitian dan karakteristik respondennya. Tentu saja hasil-hasil penelitian tersebut telah didukung dengan berbagai teori yang dikemukakan oleh pakar dibidangnya masing-masing. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Tadesse Getacher Engida dan Goitom Abera Baisa1 (2014)

Engida dan Baisa1 (2014) melakukan penelitian dengan judul *“Factors Influencing taxpayers’ compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia”*. Penelitian Engida dan Baisa1 (2014) berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor penentu kepatuhan pembayar pajak. Sembilan faktor pajak yang digunakan adalah: probabilitas yang diaudit; persepsi belanja pemerintah; persepsi ekuitas dan keadilan; penalti, kendala keuangan; perubahan kebijakan pemerintah saat ini;

kelompok rujukan; peran otoritas pajak; dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian dari survei yang dilakukan di Mekelle menggunakan 102 responden, menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh probabilitas yang diaudit, kendala keuangan, dan perubahan kebijakan pemerintah.

2. Penelitian Imam Mukhlis, Sugeng Hadi Utomo & Yuli Soesetio (2015)

Mukhlis, Utomo & Soesetio (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *“The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan perpajakan pada pengetahuan pajak dan dampaknya terhadap keadilan pajak dan kepatuhan pajak dari sektor UKM kerajinan di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, yaitu; pendidikan pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengetahuan pajak, pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keadilan pajak, keadilan pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak

3. Penelitian Adesina Olugoke Oladipupo, Uyioghosa Obazee (2015)

Oladipupo dan Obazee (2015) melakukan penelitian dengan judul *“Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan pajak sementara denda pajak memiliki dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mempromosikan kepatuhan pajak dari denda pajak.

4. Penelitian Mohd Rizal Palil (2013)

Dalam penelitiannya Palil (2013) dengan judul "*The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana hasil penelitian disimpulkan bahwa pendidikan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan, demikian juga religiusitas juga tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

5. Penelitian Natrah Saad (2014)

Dalam penelitiannya Saad (2014) dengan judul "*Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers*". Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, dimana hasil penelitian disimpulkan bahwa ketidak patuhan disebabkan karena wajib pajak ternyata memiliki pengetahuan yang tidak memadai pada aspek teknis dari sistem pajak penghasilan. Selain itu ketidak patuhan wajib pajak juga disebabkan karena sistem pajak penghasilan dianggap sebagai kompleks inheren, sebab

sebagian besar dokumen akan diselesaikan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka lebih meningkat masalah.

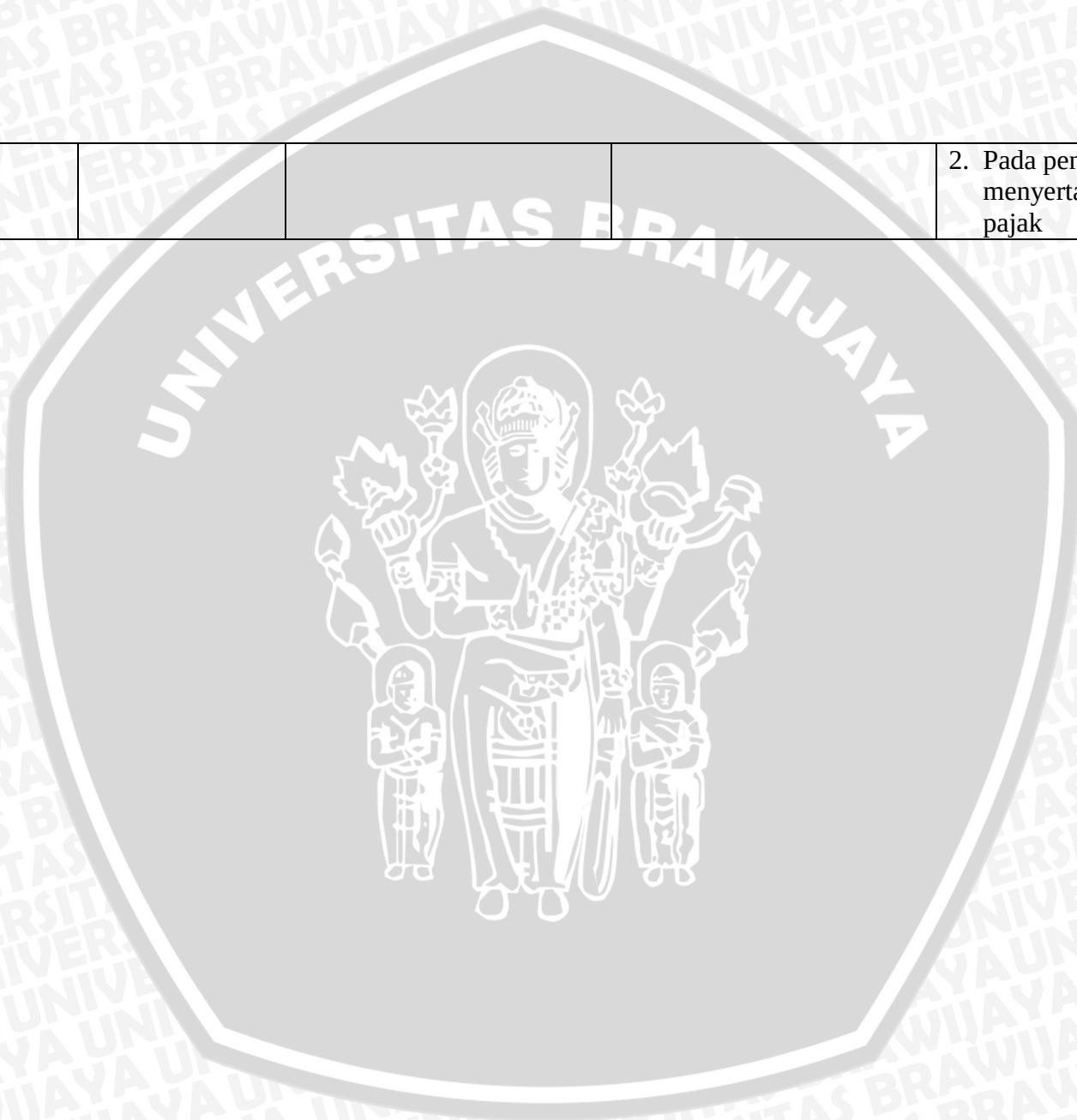


Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti/judul	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Tadesse Getacher Engida dan Goitom Abera Baisa1 (2014) <i>Factors Influencing taxpayers' compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia</i>	1. probabilitas yang diaudit; 2. persepsi belanja pemerintah; 3. persepsi ekuitas dan keadilan; 4. penalti, 5. kendala keuangan; 6. perubahan kebijakan pemerintah saat ini; 7. kelompok rujukan; 8. peran otoritas pajak; 9. pengetahuan pajak.	Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh probabilitas yang diaudit, kendala keuangan, dan perubahan kebijakan pemerintah	1. Sama-sama mencari faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak 2. Sama-sama menggunakan variabel pengetahuan pajak 3. Sama-sama dilakukan di negara berkembang	1. Subyek penelitian berbeda jika penelitian sebelumnya dilakukan di Makelle Ethiopia maka penelitian ini dilakukan di Lamongan Indonesia. 2. Variabel bebas yang digunakan tidak semuanya sama
2	Imam Mukhlis, Sugeng Hadi Utomo & Yuli	1. Pendidikan perpajakan, 2. Pengetahuan	Pendidikan pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap	1. Variabel bebas sama-sama menggunakan pengetahuan pajak.	1. Metode analisis data penelitian terdahulu menggunakan analisis

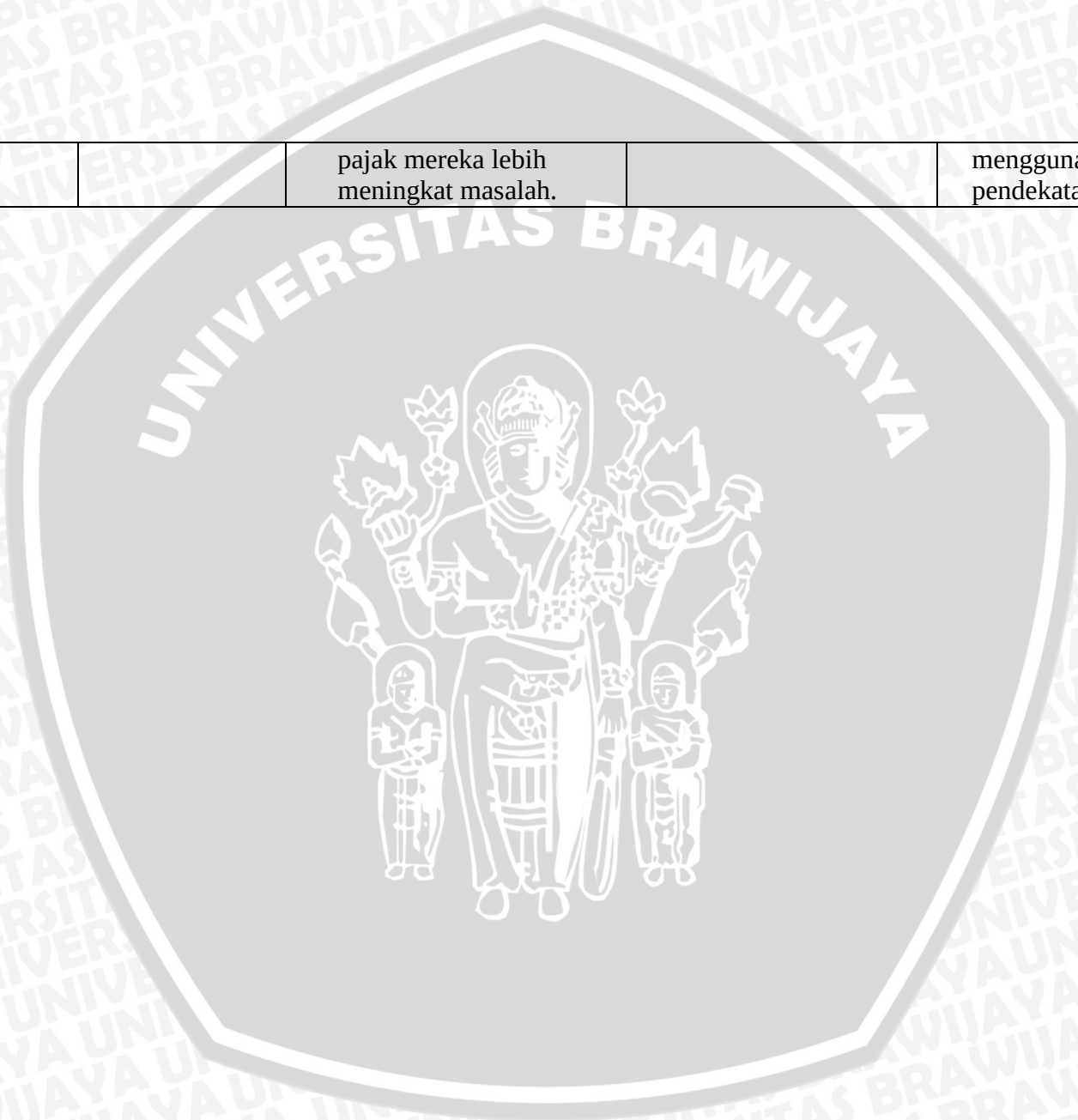
	Soesetio (2015) <i>The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia</i>	Pajak, 3. Keadilan pajak 4. kepatuhan pajak	pengetahuan pajak, pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keadilan pajak, keadilan pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak	2. Sama-sama meneliti kepatuhan pajak	Structural Equation Modeling, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi. 2. Objek pajak yang digunakan penelitian sebelumnya adalah pajak pendapatan sedangkan penelitian ini menggunakan PBB. 3. Subyek pada penelitian terdahulu adalah pelaku UKM sedangkan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB
3.	Adesina Olugoke Oladipupo, Uyioghosa Obazee (2015) <i>"Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria."</i>	1. Pengetahuan pajak, 2, Denda Pajak, 3. Kepatuhan pajak	Pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan pajak sementara denda pajak memiliki dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak.	1. Variabel tergantung sama-sama kepatuhan wajib pajak 2. Variabel bebas salah satunya adalah pengetahuan pajak 3. Analisis data sama-sama menggunakan Analisis Regresi	1. Subyek penelitian berbeda jika penelitian sebelumnya dilakukan di wajib pajak usaha kecil dan menengah di Nigeria maka penelitian ini dilakukan pada wajib pajak PBB di Lamongan Indonesia.

					2. Pada penelitian ini tidak menyertakan denda pajak
--	--	--	--	--	--



4.	Mohd Rizal Palil (2013) <i>The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity</i>	1. Pengetahuan Pajak 2. Pendidikan Pajak 3. Religiusitas 4. Kepatuhan membayar pajak	1. Ada pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak 2. variabel pendidikan pajak dan religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak	1. Sama-sama menghubungkan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data analisis regresi.	1. Obyek pajak yang digunakan berbeda. 2. Lokasi penelitian berbeda, jika penelitian terdahulu dilakukan di Malaysia, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan dimana secara aturan perpajakan tiap negara sangatlah berbeda.
5.	Natrah Saad (2014) <i>Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers</i>	1. Pengetahuan Pajak 2. Kompleksitas Pajak 3. Kepatuhan membayar pajak	1. Ketidak patuhan disebabkan karena wajib pajak ternyata memiliki pengetahuan yang tidak memadai pada aspek teknis dari sistem pajak penghasilan. 2. Selain itu ketidak patuhan wajib pajak juga disebabkan karena sistem pajak penghasilan dianggap sebagai kompleks inheren, sebab sebagian besar dokumen akan diselesaikan dalam memenuhi kewajiban	1. Sama-sama menghubungkan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.	1. Obyek pajak yang digunakan berbeda. 2. Lokasi penelitian berbeda, jika penelitian terdahulu dilakukan di New Zealand , sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan dimana secara aturan perpajakan tiap negara sangatlah berbeda. 3. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan diskriptif, maka pada penelitian ini

			pajak mereka lebih meningkat masalah.		menggunakan pendekatan kuantitatif.
--	--	--	---------------------------------------	--	-------------------------------------



B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2006:423)

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain: (Sukirno, 2006:243-270).

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan.

Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal.

Menurut teori ini, pada mulanya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes

melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

- 1) Perkonomian bersifat tertutup.
- 2) Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
- 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = K = n$$

Dimana :

- g = *Growth* (tingkat pertumbuhan output)
- K = *Capital* (tingkat pertumbuhan modal)
- n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulan menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

c. Teori Pertumbuhan Neo-klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi.

Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak

perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campuran pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas *capital* meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan perlunya penyebaran informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat saving yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

d. Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi

Teori ini dimunculkan oleh Prof. W.W. Rostow yang memberikan lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi. Analisis ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental dalam corak kegiatan ekonomi, juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara.

Adapun kelima tahapan tersebut adalah:

1) Tahap Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Rostow mengartikan bahwa masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat yang:

- a) Cara-cara memproduksi yang relatif primitif dan sikap masyarakat serta cara hidupnya yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh cara pemikiran yang bukan rasional, tetapi oleh kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun. Tingkat produksi yang dapat dicapai masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan dan teknologi modern belum ada atau belum digunakan secara sistematis dan teratur.
- b) Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas per pekerja masih sangat terbatas. Oleh sebab itu sebagian besar dari sumber-sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan dalam sektor pertanian. Dalam sektor ini struktur sosialnya sangat bersifat hierarkis, sehingga mobilitas secara vertikal dalam masyarakat sedikit sekali.

- c) Kegiatan politik dan pemerintahan terdapat di daerah-daerah dipegang oleh tuan-tuan tanah yang berkuasa, dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan tuan-tuan tanah di berbagai daerah tersebut.

2) Tahap Prasyarat Lepas Landas

Tahap ini adalah tahap sebagai suatu masa transisi pada saat masyarakat mempersiapkan dirinya ataupun dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustain growth*). Pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan berlaku secara otomatis.

Tahap prasyarat lepas landas ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Tahap prasyarat untuk lepas landas yang dicapai oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merubah struktur masyarakat tradisional yang sudah ada.
- b) Yang dinamakan Rostow bom free, yaitu prasyarat lepas landas yang dicapai Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru, dengan tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional, karena masyarakat negara-negara itu terdiri dari emigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai tahap prasyarat lepas landas.

3) Tahap Lepas Landas (*Take Off*)

Adalah suatu tahap interval dimana tahap masyarakat tradisional dan tahap prasyarat untuk lepas landas telah dilewati. Pada periode ini, beberapa penghalang pertumbuhan dihilangkan dan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi diperluas dan dikembangkan, serta mendominasi masyarakat sehingga menyebabkan efektivitas investasi dan meningkatnya tabungan masyarakat.

Ciri-ciri tahap lepas landas yaitu:

- a) Adanya kenaikan dalam penanaman modal investasi (yang produktif, dari 5% atau kurang, menjadi 10% dari Produk Nasional Neto). $NNP = GNP - D$ (penyusutan).
- b) Adanya perkembangan beberapa sektor industri dengan laju perkembangan yang tinggi.
- c) Adanya atau terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial dan institusional yang akan menciptakan: 1) Kenyataan yang membuat perluasan di sektor modern. 2) Potensi ekonomi ekstern sehingga menyebabkan pertumbuhan terus-menerus berlangsung.

4) Tahap Gerakan ke Arah Kedewasaan (*The Drive of Maturity*)

Gerakan ke arah kedewasaan diartikan sebagai suatu periode ketika masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern dalam

mengolah sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya.

Ciri-ciri gerakan ke arah kedewasaan adalah:

- a) Kematangan teknologi, dimana struktur keahlian tenaga kerja mengalami perubahan.
- b) Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan.
- c) Masyarakat secara keseluruhan merasa bosan dengan keajaiban yang diciptakan oleh industrialisasi, karena berlakunya hukum kegunaan batas semakin berkurang.

5) Tahap Masa Konsumsi Tinggi.

Pada masa ini perhatian masyarakat mengarah kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi kepada masalah produksi. *Leading sectors*, bergerak ke arah barang-barang konsumsi yang tahan lama serta jasa-jasa. Pada periode ini terdapat tiga macam tujuan masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang tersedia dan dukungan politis, yaitu:

- a) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut ke luar negeri dan kecenderungan ini dapat berakhir pada penaklukan atas negara-negara lain.
- b) Menciptakan suatu *welfare state*, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui

- sistem perpajakan yang progresif, dalam sistem perpajakan seperti ini makin besar pendapatan maka makin besar pajaknya.
- c) Mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi dasar yang sederhana atas makanan, pakaian, rumah keluarga secara terpisah dan juga barang-barang konsumsi tahan lama serta barang-barang mewah.

C. Dasar-Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut Adriani (dalam Zain, 2008: 10), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (dalam Nurmantu, 2010:12-13), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut dikoreksi oleh Soemitro (dalam Zain, 2008: 11), berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas

Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak adalah kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai kepentingan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Judisseno, 2005:7).

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Ilyas dan Burton, 2004;08):

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin

Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Sampai saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak,

penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Jenis-jenis pajak

Purwono (2010:10-11) mengemukakan beberapa jenis pajak, yaitu:

a. Berdasarkan wewenang pemungut

1) Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Materai.

2) Pajak Daerah adalah Pajak yang wewenang pemungutnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak terdiri atas:

a) Pajak provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air tanah dan air Permukaan.

b) Pajak Kabupaten/kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, dan pajak lain yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

b. Berdasarkan administrasi dan pembebanan

1) Pajak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

a) Administrasi : berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun)

b) Ekonomis : beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh)

2) Pajak tidak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

a) Administrasi : tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.

b) Ekonomis : beban pajak dapat dilimpahkan pada orang lain.

Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Berdasarkan Sasaran

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Agar suatu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sedikit halangan, perlu melaksanakan beberapa Sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Withholding System* (Mardiasmo, 2009:7).

a. *Official Assesment System* adalah suatu pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersikap pasif). Dengan demikian bila dihubungkan dengan utang pajak, utang pajak akan timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

Ciri-ciri dari *Official Assesment System* yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus.
- 2) Wajib pajak bersikap pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus.

b. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan dimana besarnya pajak terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Untuk menjalankan sistem pemungutan ini diperlukan beberapa prasyarat dari

wajib pajak antara lain, kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan membayar dari wajib pajak dan kedisiplinan dari wajib pajak.

Ciri-ciri dari *Self Assesment System* yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ciri-ciri dari *Withholding System* yaitu: Wewenang menentukan pajak terutang ada pada pihak ketiga.

Dalam penjelasan undang-undang perpajakan menyebutkan bahwa system pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Dalam system tersebut, masyarakat diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. *Self assessment system* merupakan konsep perpajakan yang ideal dengan menempatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai subyek pelaku utama dalam system perpajakan.

5. Asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan gutan pajak. Adam Smith (dalam Supramono, 2010: 3-4), menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas:

a. *Equality*

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

Keadilan raensyaratkan bahwa setiap sumbangan Wajib Pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

- 1) Keadilan horizontal; Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
- 2) Keadilan vertikal; Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

b. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

c. *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

d. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminimmungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang permasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

6. Teori Pajak Murni (F.Y. Edgeworth (1897))

Menurut Edgeworth (1897), Ilmu perpajakan yang bersifat teori murni dapat berasal: hukum kejadian, dan prinsip pengorbanan yang sama. Subjek pertama menyajikan berbagai kasus yang berbeda dibatasi oleh beberapa lintas divisi. masing-masing divisi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

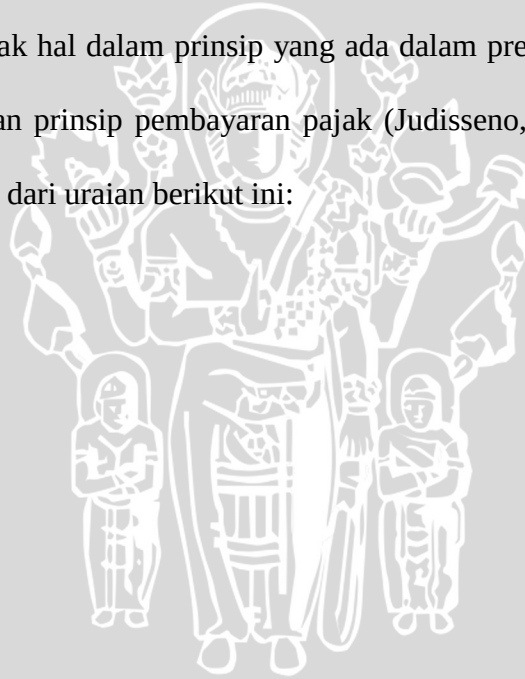
- a. (A) semua transaksi dalam pertimbangan terkena kompetisi (menurut Edgeworth, di setiap partai kasus untuk pertukaran, bermain permintaan dan penawaran. Perpajakan dalam rezim sosialisme atau perbudakan tidak dianggap); atau (a) antara pihak yang berurusan ada setidaknya satu monopoli.
- b. (B) semua produk yang berhubungan mematuhi hukum peningkatan biaya; atau (b) beberapa tidak.
- c. (C) mobilitas modal dan tenaga kerja tidak diperhitungkan, atau (c) ada dan diperhitungkan.
- d. (D) perpajakan dianggap bervariasi dengan jumlah artikel dipertukarkan (termasuk uang, seperti dalam kasus tertentu atau pajak ad valorem, atau satu jenis), dan sebagainya dapat digambarkan sebagai pajak atas margin; atau (d) tidak begitu bervariasi (seperti dalam kasus pajak atas keuntungan, atau jajak pendapat-pajak), dan sebagainya dapat digambarkan sebagai pajak atas kelebihan

7. Teori-Teori yang mendukung pemungutan pajak

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori itu antara lain:

a. Teori asuransi

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak. Dalam hal ini pembayaran pajak sama dengan pembayaran premi asuransi. Anggapan mengenai premi asuransi sama dengan pembayaran pajak sebenarnya terlalu dipaksakan, karena banyak hal dalam prinsip yang ada dalam premi asuransi tidak sesuai dengan prinsip pembayaran pajak (Judisseno, 2004:17). Hal ini dapat dilihat dari uraian berikut ini:



Tabel 2.2 Perbandingan Premi Asuransi dengan Pembayaran pajak

Perni Asuransi	Pembayaran Pajak
Polis diberikan sesuai dengan kepentingan pribadi	Pembayaran Pajak diberikan untuk kepentingan seluruh masyarakat
Besarnya premi sesuai dengan besar kecilnya pertanggungan	Pembayaran Pajak disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan WP
Dapat dimintakan klaim pada saat dan kondisi yang sudah disepakati klien dengan perusahaan asuransi	Tidak ada klaim langsung atas terjadinya keadaan yang memberatkan individu/ perorangan.

Sumber : Judisseno (2004:17)

Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung (Supramono, 2010: 7).

b. Teori kepentingan

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Masyarakat membutuhkan keamanan, fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, jalan, saluran irigasi dan banyak kepentingan lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dari negaranya. Maka sudah selayaknya jika masyarakat menunaikan kewajiban perpajakannya kepada negara karena negara sudah mengeluarkan biaya untuk semua fasilitas umum tersebut.

Seharusnya --dengan mengacu pada teori kepentingan-- masyarakat yang mempunyai kepentingan yang besar dalam arti manfaat yang diterimanya, juga mempunyai kewajiban perpajakan yang besar pula; tetapi bagaimana mungkin seorang petani yang miskin yang nota bene membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial yang lebih besar dapat memberikan pajak yang lebih besar, sementara mereka yang sudah cukup mapan untuk melindungi diri sendiri dalam hal perlindungan dan jaminan sosial memberikan pajak yang sedikit? Melihat dilema yang muncul dari teori ini, pemerintah melakukan pemungutan pajak secara progresif terhadap warga yang lebih mapan, dengan harapan dapat memperkecil jurang antara si miskin dan si kaya.

Esensi yang lebih penting, yang perlu diketahui dari Teori Kepentingan ini, demi keadilan dan keabsahan pemungutan pajak, adalah bahwa dasar keadilan pemungutan pajak adalah karena orang-orang yang mempunyai kepentingan pada negara, dan untuk itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang penyelenggaraannya dikumpulkan melalui pajak (Judisseno, 2004:17-18).

c. Teori daya pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap

masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula (Supramono, 2010: 6).

d. Teori bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat (Supramono, 2010: 8).

Menurut Judisseno (2004: 18), penekanan teori terletak pada negara yang mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara. Dengan pajak inilah masyarakat dapat menunjukkan salah satu baktinya kepada negara. Dalam teori ini, negara berperan sebagai "bapak" yang memberikan dan membiayai berbagai keperluan umum bagi "anak"-nya, yaitu masyarakat. Sebagai anak yang berbakti terhadap bapaknya, masyarakat memberikan pajak kepada negara, sebagai tanggapan atas pemberian-pemberian itu.

e. Teori asas daya beli

Teori Daya Beli menekankan bahwa keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak -- masyarakat dan negara-- seperti layaknya kerja sebuah pompa yaitu menarik dan menyalurkan kembali, sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan daya beli masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat (Juddiseno, 2005: 10).

Menurut Supramono (2010: 8), teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Pada akhirnya negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari teori-teori tersebut, teori yang paling mendukung penelitian ini adalah teori bakti, sebab teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat kepada pemerintahnya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena

menyadarinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

D. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak

terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat 4 asas utama yang harus diperhatikan dalam Mardiasmo (2009:311), yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
- b. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan PBB yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Yang dimaksud dengan keadaan horizontal adalah pembayar pajak dengan keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama besarnya. Sedangkan keadaan vertikal adalah pembayar pajak yang lebih besar kemampuannya harus dibebani pajak yang lebih besar pula.
- c. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan PBB diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.
- d. Menghindari pajak berganda, pengenaan PBB tidak terjadi dua kali atau lebih atas suatu objek yang sama.

3. Hak Wajib Pajak PBB-P2

- a. Memperoleh formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) secara gratis pada setiap Kantor Pelayanan PBB-P2, Kantor Penyuluh Pajak atau tempat lain yang ditunjuk.
- b. Memperoleh penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada Kantor Pelayanan PBB-P2 atau Kantor Penyuluh Pajak.
- c. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari Kantor Pelayanan PBB-P2 atau Kantor Penyuluh Pajak.
- d. Memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan fotokopi bukti yang sah (sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain-lain).
- e. Menunjuk orang lain/pihak lain selain pegawai Direktorat Jendral Pajak dengan surat kuasa bermaterai, sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP.
- f. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah.
- g. Mengajukan keberatan dan pengurangan.
- h. Mendapat SPPT PBB-P2 setiap tahun pajak, paling lambat Juni atau satu bulan setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- i. Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan PBB-P2.

4. Kewajiban Wajib Pajak PBB-P2

Secara umum kewajiban wajib pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan Objek Pajak dengan cara mengisi SPOP.
- b. Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap: Jelas berarti dapat dibaca sehingga tidak salah tafsir, benar berarti data yang isi sesuai dengan keadaan sebenarnya, lengkap berarti terisi semuanya dan ditandatangani.
- c. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi wajib pajak ke Kantor Pelayanan PBB-P2 atau Kantor Penyuluh Pajak setempat selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
- d. Melaporkan perubahan data objek pajak atau wajib pajak ke Kantor Pelayanan PBB-P2 atau Kantor Penyuluh Pajak setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan/pembetulan SPOP sebelumnya.
- e. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimnya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan Daerah/Kantor Penyuluh Pajak untuk diteruskan ke Kantor Pelayanan PBB-P2 yang menerbitkan SPPT.
- f. Melunasi PBB-P2 pada tempat yang telah ditentukan.

5. Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dijelaskan dalam Mardiasmo (2009:313) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan

pertambahan. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi tehnik yang atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pengertian Bangunan yang dimaksudkan dalam penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan tol,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olahraga,
- f. Taman mewah,
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
- h. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak berikut ini:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- b. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau Bangunan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak terutangnya berdasarkan keadaan objek pajaknya. Sedangkan keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang.

Menurut Mardiasmo (2009:316) yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bumi dan, dan memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan sebjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak.
- d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dalam no.3 dapat memberikan keterangan tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana no.3 dalam jangka waktu sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- f. Bila keterangan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan menolak dengan disertai alasan.
- g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui.

7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak menurut Mardiasmo (2009:320) merupakan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Objek Pajak diterbitkan berdasarkan data objek pajak. Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan tepat waktu untuk dikembalikan kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari setelah SPOP diterima.

8. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh nilai jual beli secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (Mardiasmo, 2009:312).

Yang dimaksud dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi objek fisik tersebut.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

9. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan KMK-523/KMK.04/1998 adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

10. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dalam peraturan daerah, tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen. Tarif PBB-P2 sebesar 0,3 % merupakan tarif paling tunggal tinggi sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Tarif pengenaan PBB-P2 bersifat tetap dan tidak dapat dimintakan pengurangan oleh wajib pajak

kepada daerah.

Cara perhitungan PBB-P2 terutang menurut Danang (2013) adalah 0,3 % dikali Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Sedangkan dasar perhitungan PBB-P2 adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu NJOP dikurangi dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

E. Tingkat Ekonomi

Menurut Rosyidi (2009:27), ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan (*Wealth*) dan merupakan suatu bagian yang penting daripada studi tentang manusia. Hal ini disebabkan karena sifat manusia yang telah dibentuk oleh kerjanya sehari-hari, serta sumber-sumber material yang mereka dapatkan. Selanjutnya Rosyidi (2009:35) menyatakan bahwa begitu banyak tujuan hidup seseorang akan tetapi satu hal yang pasti yaitu bahwa setiap orang tentu ingin memiliki pendapatan yang cukup yang akan memungkinkan untuk memilih cara hidup yang dipilih dan yang disukainya, semakin besar pendapatannya akan semakin luas kesempatan yang terbuka baginya untuk memenuhi keinginannya.

Menurut Surbakti (2003: 144), status ekonomi ialah kedudukan seseorang di dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Faktor kekayaan tersebut merupakan dasar penentuan pelapisan seseorang di dalam masyarakat berdasarkan status ekonominya. Dari ungkapan mengenai

status ekonomi masyarakat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilikan kekayaan di dalam masyarakat sebagai dasar di dalam menentukan tinggi rendahnya status ekonomi individu di dalam masyarakat. Unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat pemilikan kekayaan seseorang individu di dalam masyarakat, walaupun berkait dengan konsep status sosial lainnya, dapat dijadikan indikator di dalam melihat status ekonomi seseorang di dalam masyarakat.

Ukuran atau kriteria yang ditawarkan para ahli dalam mengolompokkan anggota masyarakat berdasarkan status ekonominya dapat dipaparkan lebih lanjut sebagai dasar di dalam melihat tinggi rendahnya ukuran kekayaan seseorang. Seperti yang diungkapkan Soekanto (2006:263) bahwa yang termasuk di dalam ukuran kekayaan dapat dilihat dari bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadi, cara-cara mempergunakan pakaian, kebiasaan untuk belanja barang-barang mahal”. Kemudian ukuran lain seperti yang diungkapkan Surbakti (2003:144), bahwa status ekonomi seseorang dapat diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga dari orang tersebut.

Klasifikasi tingkat ekonomi digolongkan dalam tiga tingkatan atau lapisan sebagaimana yang dirangkum Amin dan Irwansyah (2006:23) sebagai berikut :

Tabel 2.3. Tingkat ekonomi

Tingkat Ekonomi	Kriteria
Atas	a. Luas lantai bangunan < 15 m²per orang b. Jenis dinding/tembok permanen c. Mampu membayar berobat ke rumah sakit mewah, kelas 1 d. Mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal di atas Rp 2.000.000,- e. Pendapatan di atas Rp 2.000.000,- per bulan
Menengah	a. Luas lantai bangunan < 10 m²per orang b. Jenis dinding/tembok permanen c. Mampu membayar berobat ke puskesmas/poliklinik d. Mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 1.000.000,- e. Pendapatan di bawah Rp 2000.000,- per bulan
Bawah	a. Luas lantai bangunan < 8 m² per orang b. Jenis dinding tempat tinggal kayu, rumbia, tembok tanpa diplester c. Tidak mampu membayar berobat ke puskesmas/ poliklinik d. Tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- e. Pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan

Sumber : Amin dan Irwansyah (2006:23)

F. Pengetahuan Pajak

Menurut Notoatmodjo (2007:139), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Sedangkan arti pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, dalam Zain, 2008: 10).

Berdasarkan pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah seberapa jauh seseorang mengetahui tentang kewajibannya membayar iuran kepada negara terkait dengan objek pajak yang dimiliki yang dalam penelitian adalah pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Di Indonesia berlakunya sistem pemungutan *self assessment* memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009:7).

Pengertian dari pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pemahaman wajib pajak tentang pengertian PBB, fungsi PBB, dan kegunaan PBB.
- b. Memahami ketentuan dan peraturan mengenai PBB.

G. Kepatuhan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1134), yang dimaksud dengan patuh adalah suka menurut (perintah dan sebagainya); taat kepada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin; rakyat selalu patuh kepada pemerintah. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Nurmantu (2010:148), “kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya”. Berdasarkan pengertian kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan, maka kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Contoh dari kepatuhan formal adalah ketentuan batas pembayaran SPOP, jika Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sebelum batas yang ditentukan berarti Wajib

Pajak telah memenuhi kepatuhan formal.

Menyampaikan SPT Pajak Penghasilan sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan isi dari SPT tersebut sudah benar atau belum. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu (*deadline*) dengan menyampaikan SPT Pajak Penghasilan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Seperti melakukan pengisian SPOP dengan jelas, lengkap dan benar.

Derajat kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur, kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang yang paling banyak 5%.

- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antar perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah mengenai Pendaftaran Nilai Obyek Pajak (NOP) dan pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) serta ketepatan pada waktu pembayaran. Untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak indikator yang digunakan adalah ketepatan waktu pembayaran PBB, kepatuhan pembayaran PBB sesuai tagihan dan kesukarelaan pembayaran PBB (Purwanto, 2015).

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkannya meliputi :

- a. Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti yakin, merasa, tuduhan mengerti. Sedangkan kesadaran yaitu keadaan mengerti atau yang

dirasakan, dialami seseorang. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun dengan sukarela yakin bahwa pajak berguna bagi pembangunan sehingga dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka pembangunan juga akan berjalan lancar.

b. Kelancaran

Lancar berarti cepat, tidak tersendak-sendak, berlangsung terus tidak berhenti. Sedangkan kelancaran yaitu keadaan lancarnya sesuatu. Kelancaran yang dimaksud di sini adalah wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak setiap tahun, sehingga dengan lancarnya dana yang berasal dari pajak ini maka pembangunan juga akan berjalan dengan lancar.

c. Ketepatan Waktu

Setelah wajib pajak menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) wajib pajak harus membayar hutang pajaknya dalam waktu enam bulan terhitung sejak saat diterima SPPT oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak terutang maka wajib pajak akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan. Mengingat pentingnya peranan pajak bagi pelaksanaan pembangunan, maka sudah selayaknya wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya tepat waktu karena apabila membayar pajak melewati batas waktu pembayaran maka akan menghambat pembangunan.

d. Ketaatan

Taat berarti patuh pada perintah, sedangkan ketaatan adalah sifat taat terhadap sesuatu. Ketaatan dalam hal ini adalah sikap yang diperlihatkan oleh wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H. Model kerangka Konsep dan hipotesis

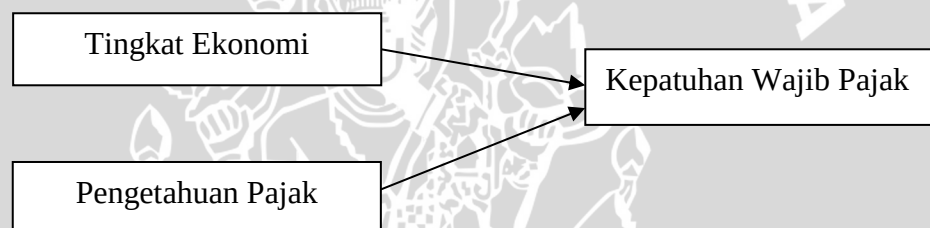
1. Model kerangka konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara keterkaitan teori dan konseptual dari masalah yang akan diteliti. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti ini menggunakan dua variabel yang menjadi determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Istanto (2010), diketahui bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Demikian pula penelitian Alviansyah (2011) dengan hasil bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT masa wajib pajak orang pribadi. Hal ini diperkuat dengan penelitian Oladipupo dan Obazee (2015), yang diperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Haryuda (2013) yang diperoleh hasil bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Demikian pula Purwanto (2015) yang diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan faktor tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hasil penelitian Putri dan Isgiyarta (2013) diperoleh hasil bahwa tingkat ekonomi mempunyai pengaruh individual yang sangat kecil terhadap Kepatuhan PBB.

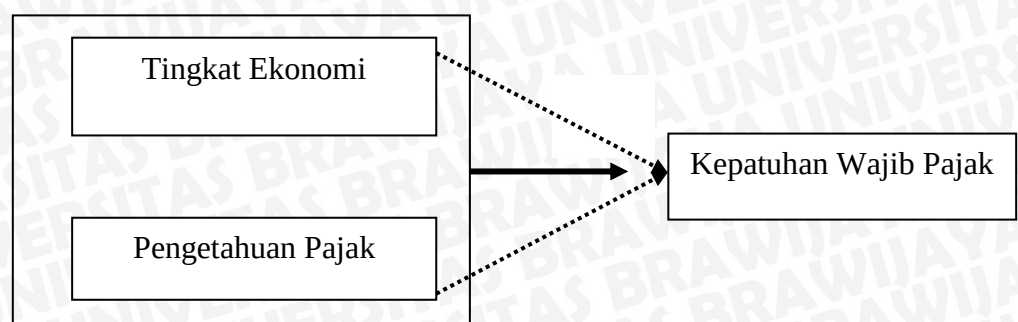
Dari penjelasan tersebut maka dapat dibuat model kerangka berfikir seperti pada gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.1 Model kerangka konsep
Sumber : Instanto (2010), Alviansyah (2011), Haryuda (2013), Purwanto (2015)

2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini , berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian dan kerangka berfikir dapat diambil suatu hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :



Keterangan :

- : Berkorelasi signifikan secara simultan
→ : Berkorelasi signifikan secara parsial

Gambar 1.2. Gambaran Hipotesis secara simultan dan parsial

Sumber : Istanto (2010), Alviansyah (2011), Haryuda (2013), Purwanto (2015)

Pengembangan hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti dan juga didukung oleh teori dan penelitian-penelitian sebelumnya.

a. Determinan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan berdasarkan tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak

Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Demikian juga masyarakat yang memiliki pengetahuan pajak yang baik, maka akan mendorong untuk berperilaku patuh membayar

PBB akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H_1 : Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Pajak secara simultan merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Determinan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berdasarkan tingkat ekonomi

Kontribusi masyarakat untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H_2 : Tingkat Ekonomi merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Determinan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan berdasarkan pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan pajak dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunannya. Dari sebab itu, dirumuskan hipotesis:

H₃: Pengetahuan pajak secara parsial merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*). Penentuan jenis penelitian eksplanatori ini sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Singarimbuan dan Effendi (2008:5) yaitu apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif, melainkan penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (*explanatory resesarch*). Metode penelitian eksplanatori yang ada dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas Tingkat pendidikan, tingkat ekonomi , dan pengetahuan pajak dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melaksanakan penelitian dalam upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menunjang penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang berlokasi di kabupaten Lamongan. Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan merupakan pelaksana dibidang pendapatan, yang memiliki tugas untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah. Berdasarkan tugas

tersebut, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dirasa sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Dipilihnya Kabupaten Lamongan dalam penelitian ini disebabkan karena masih terdapat beberapa daerah yang pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunannya yang tidak tuntas 100%, sehingga dapat berdampak pada penerimaan Pajak-Bumi dan Bangunan bagi wilayah Kabupaten Lamongan.

C. Konsep dan Variabel Penelitian

Sugiyono (2009:38) berpendapat bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi:

1. Variabel Terikat/ *Dependent Variable* (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Definisi operasional dari kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

2. Variabel Bebas/ *Independent Variable* (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

a. Tingkat ekonomi (X₁)

Menurut Kartono (2006), tingkat ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Tingkat ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secaramandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik. Dengan demikian, tingkat ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini menyangkut pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lamongan, sehingga menimbulkan suatu perbedaan gaya hidup tertentu.

b. Pengetahuan pajak (X₂)

Pengetahuan pajak yang dimaksud adalah mengenai seberapa banyak wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Peraturan pajak yang dimaksud ialah peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan yang dasarnya tertulis dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2013:80), merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian pajak bumi dan bangunan (PBB) dari kabupaten Lamongan yang ditetapkan secara cluyster bertahap. Dimana pada penetapan cluster tahap pertama diambil berdasarkan 2 kecamatan yang tingkat realisasinya paling rendah yaitu Kecamatan Sarirejo tingkat realisasi 92,93% dan Kecamatan Lamongan sebesar 93,56%. Pada tahapan cluster kedua diambil sebanyak 1 desa dan 1 kota pada kelompok cluster yang memiliki tingkat realisasi bpaling rendah. Kluster desa diwakili oleh Kecamatan Sarirejo sedangkan kluster Kota diwakili oleh Kecamatan Lamongan

Tabel 3.1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kecamatan tahun 2015

No	Kecamatan	WP	Target	Realisasi	%
1	Sarirejo	21.190	495.575.760	460.552.296	92,93
2	Lamongan	28.508	2.234.355.204	2.090.404.939	93,56
3	Babat	44.261	1.645.671.446	1.557.994.977	94,67
4	Sukodadi	31.878	860.356.781	849.939.681	98,79
5	Sambeng	35.408	489.697.901	486.320.110	99,31
6	Karanggeneng	26.039	573.679.138	571.624.538	99,64
7	Laren	32.762	465.593.505	464.298.355	99,72
8	Bluluk	16.600	290.031.303	289.300.683	99,75
9	Modo	35.328	821.615.619	819.903.819	99,79
10	Glagah	20.706	567.274.947	566.167.147	99,80
11	Mantup	33.512	575.463.359	574.473.509	99,83
12	Kembangbahu	36.886	815.051.279	813.714.929	99,84
13	Maduran	21.281	416.999.318	416.349.719	99,84
14	Turi	27.844	615.558.795	614.629.571	99,85
15	Kedungpring	39.344	1.000.432.931	999.026.355	99,86
16	Paciran	35.935	1.790.703.608	1.789.331.408	99,92
17	Deket	20.183	838.543.940	837.928.340	99,93
18	Tikung	32.478	666.999.508	666.634.108	99,95
19	Karangbinangun	22.737	663.311.228	663.311.228	100,00
20	Pucuk	30.218	708.541.909	708.541.909	100,00
21	Sekaran	27.074	631.647.649	631.647.649	100,00
22	Solokuro	35.527	513.460.161	513.460.161	100,00
23	Sukorame	13.048	313.578.409	313.578.409	100,00
24	Sugio	45.810	972.543.607	972.545.627	100,00
25	Brondong	29.490	1.270.553.965	1.270.564.025	100,00
26	Ngimbang	30.507	919.369.199	920.646.802	100,14
27	Kalitengah	18.742	346.975.641	348.116.963	100,33
	JUMLAH	793.296	21.503.586.110	21.211.007.257	99,16

Sumber : Lamongan dalam Angka (2015)

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tingkat realisasi terendah ada di Kecamatan Sarirejo yang pada cluster berikutnya dipilih desa dengan tingkat realisasi paling rendah yaitu desa Dermolemahbang dengan tingkat realisasi sebesar 70,7%. Adapun untuk wilayah kota dipilih kelurahan dengan tingkat realisasi paling rendah di kecamatan Lamongan yaitu

kelurahan Temanggung dengan tingkat realisasi sebesar 82,4%.

Penentuan kluster dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	WP	Target	Realisasi	%
1	Desa Dermolemahbang	4.606	113.596.366	80.361.866	70,7
2	Desa Simbatan	2.614	45.586.013	43.058.514	94,5
3	Desa Beru	1.619	31.321.652	31.084.793	99,2
4	Desa Gempoltukmloko	1.804	51.505.635	51.478.346	99,9
5	Desa Canggih	929	21.744.310	21.741.836	100,0
6	Desa Sumberjo	1.736	50.333.388	50.333.398	100,0
7	Desa Tambakmenjangan	4.431	94.091.687	94.091.740	100,0
8	Desa Sarirejo	1.595	45.197.868	45.203.633	100,0
9	Desa Kedungkumpul	1.856	42.198.841	43.198.170	102,4
		21.190	495.575.760	460.552.296	92,9

Tabel 3.3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	WP	Target	Realisasi	%
1	Kel. Tumenggungan	1.730	207.260.021	170.748.178	82,4
2	Kel. Sukorejo	1.301	367.284.213	318.977.100	86,8
3	Kel. Sukomulyo	3.367	278.431.193	244.063.835	87,7
4	Kel. Tlogoanyar	999	100.274.894	99.714.342	99,4
5	Kel. Jetis	873	89.221.469	88.860.909	99,6
6	Kel. Banjarmendalan	738	99.291.826	99.291.826	100,0
7	Kel. Sidoharjo	2.020	273.941.818	273.941.818	100,0
8	Kel. Sidokumpul	1.583	234.168.457	234.168.457	100,0
9	Desa Made	2.896	115.635.527	99.079.115	85,7
10	Desa Sidomukti	785	60.725.523	56.850.142	93,6
11	Desa Rancangkencono	1.543	31.996.787	30.912.577	96,6
12	Desa Tanjung	778	31.226.583	30.252.783	96,9
13	Desa Plosowahyu	1.144	81.560.798	80.207.762	98,3
14	Desa Karanglangit	1.430	78.576.824	78.576.824	100,0
15	Desa Kebet	1.054	32.541.384	32.541.384	100,0
16	Desa Kramat	1.274	22.626.524	22.626.524	100,0
17	Desa Pangkatrejo	1.331	28.747.150	28.747.150	100,0
18	Desa Sendangrejo	936	26.050.285	26.050.285	100,0
19	Desa Sumberjo	1.357	33.540.157	33.540.157	100,0
20	Desa Wajik	1.369	41.253.771	41.253.771	100,0
	JUMLAH	28.508	2.234.355.204	2.090.404.939	93,6

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2013:81), merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel digunakan jika populasi dalam penelitian berjumlah besar. Oleh Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka dibutuhkan sampel tersebut untuk mewakili populasi yang ada. Akan tetapi, penetapan sampel haruslah representative atau yang benar-benar mewakili agar ditemukan kesimpulan yang tepat.

Menurut Arikunto (2008:116) “Penentuan pengambilan sampel sebagai berikut apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.
- c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik

Berdasarkan Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, serta luasnya wilayah, maka penelitian ini menggunakan sampel sebesar 2,5% dari populasi di masing-masing cluster dengan perincian sebagai berikut Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo 4.606 orang x 2,5% = 115,15 sampel dibulatkan menjadi 115 orang, kelurahan

Temanggung Kecamatan Lamongan 1.730 orang x 2,5% = 43,25 sampel
dibulatkan menjadi 43 orang, sehingga jumlah seluruh sampel sebanyak 115
+ 43 = 158 orang.

3. Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik *cluster sampling*. *Cluster Sampling* merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten (Sugiyono, 2013: 94).

Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas (negara) sampai ke wilayah terkecil (kabupaten). Dalam penelitian ini tahapan dilakukan dengan memilih kecamatan yang merepresentasikan penduduk kota dan desa, kemudian setelah diperoleh dua kecamatan maka dipilih lagi satu kelurahan dari kecamatan tersebut yang tingkat realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan paling rendah, serta dipilih satu desa dari kecamatan yang dipilih berdasarkan tingkat realisasinya paling rendah pula.

E. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

ialah suatu data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Data ini diperoleh dari jawaban kuesioner responden yang menjadi sampel dalam penelitian disini. Responden tersebut adalah wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

b. Data sekunder

Data disini adalah yang diperoleh secara tidak langsung. Yaitu melalui studi kajian dan literatur. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur. Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, majalah, dan peraturan-peraturan terkait.

2. Teknik pengambilan data

Dibutuhkan alat yang tepat untuk mendapatkan data yang relevan dalam suatu penelitian agar menghasilkan suatu kesimpulan yang general dan obyektif sehingga tujuan penelitian dapat terpenuhi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner

Kuesioner adalah sebuah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui oleh responden (Arikunto, 2010:194). Kuesioner ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada responden dengan harapan responden

merespon baik pertanyaan yang diajukan. Hasil dari jawaban responden kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan.

Prinsip-prinsip yang digunakan menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2012:142) yang harus diperhatikan dalam pembuatan kuesioner adalah

:

- 1) Isi dan tujuan pertanyaan
- 2) Bahasa yang digunakan
- 3) Tipe dan bentuk pertanyaan
- 4) Pertanyaan tidak mendua
- 5) Tidak menanyakan hal-hal yang sudah terlupakan
- 6) Pertanyaan tidak menggiring
- 7) panjang pertanyaan
- 8) urutan pertanyaan
- 9) prinsip pengukuran dan penampilan fisik angket

Kuesioner disusun oleh peneliti berdasarkan konsep teori yang digunakan pada bab sebelumnya. Tingkat ekonomi disusun berdasarkan konsep yang dikemukakan Amin dan Irwansyah (2006), Surbakti (2003), Soekanto (2006), sedangkan pengetahuan pajak bumi dan bangunan disusun berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Carolina (2009) dan Mardiasmo (2009), adapun untuk kuesioner kepatuhan wajib pajak disusun berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Nurmantu (2010)

Adapun untuk Desain Kuisisioner dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Desain Kuisisioner Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Lamongan Tahun 2016

Variabel	Indikator	Item	Sumber
Tingkat Ekonomi (X1)	1) Tingkat penghasilan	1. Tingkat penghasilan wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan pribadi 2. Penghasilan tambahan dari keluarga wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 3. Total penghasilan wajib pajak (seluruh anggota keluarga) dalam memenuhi kebutuhan keluarga.	Amin dan Irwansyah (2006:23), Surbakti (2003:144), Soekanto (2006:263)
	2) Besarnya anggota keluarga	1. Banyaknya jumlah anggota keluarga sesuai dengan tingkat perekonomian keluarga 2. besarnya anggota keluarga tidak menjadi beban kepala keluarga	
	3) Kondisi rumah	1. Bangunan tempat tinggal wajib pajak adalah bangunan permanen yang layak untuk dihuni 2. Luas bangunan wajib pajak sangat ideal sebagai hunian 3. Ruangan (kamar) wajib pajak sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal	
	4) kepemilikan barang	1. Wajib Pajak memiliki kendaraan yang sangat layak untuk kebutuhan transportasi. 2. Perabotan rumah tangga yang dimiliki wajib pajak sangat layak 3. Wajib Pajak selalu memiliki simpanan diluar penghasilan	

Variabel	Indikator	Item	Sumber
Pengetahuan Pajak (X2)	1) Pengertian PBB	1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan yang meliputi keadaan tanah dan bangunan	Carolina (2009:7), Mardiasmo

		2. PBB merupakan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah 3. PBB dipengaruhi oleh keadaan objek tanah dan bangunan 4. PBB disebut pajak objektif	(2009:311-316)
2) Asas, hak dan kewajiban wajib pajak		1. pengenaan PBB tidak terjadi dua kali atau lebih atas suatu objek yang sama 2. Wajib pajak dapat melaporkan perubahan data objek pajak. 3. PBB diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum 4. Wajib pajak menerima SPPT PBB-P2 setiap tahun pajak, paling lambat Juni atau satu bulan setelah penyerahan SPOP	
3) SPOP dan NJOP		1. Wajib Pajak harus mengisi SPOP ,dan mengembalikan kepada Kepala Daerah. 2. SPOP harus diisi oleh wajib pajak dengan tepat dan jelas. 3. Objek pajak kepentingan umum tidak dikenakan PBB. 4. NJOP ditentukan oleh petugas pajak	
4) Dasar Pengenaan, tarif dan Cara hitung PBB		1. Tarif pengenaan PBB-P2 adalah sebesar 0,3 persen. 2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali 3. Tarif PBB ditetapkan oleh pemerintah daerah 4. NJOP ditetapkan sesuai dengan perkembangan wilayahnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah	

Variabel	Indikator	Item	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1) Kesadaran	1. Wajib Pajak membayar pajak setiap tahun dengan sukarela tanpa paksaan dari petugas 2. Kewajiban setiap warga negara adalah membayar pajak	Nurmantu (2010;148)

	3. Wajib Pajak memahami tentang Sanksi dan peraturan 4. Wajib Pajak menyadari bahwa dengan membayar PBB akan membantu pembangunan daerah	
2) Kelancaran	1. Wajib Pajak membayar PBB dengan lancar tanpa merasa ada kesulitan 2. Dengan membayar PBB dengan lancar setiap tahunnya, Wajib Pajak membantu pemerintah daerah dalam pembangunan. 3. Wajib Pajak membayar PBB dengan lancar, karena tahu itu merupakan kewajiban warga Negara. 4. Wajib Pajak selalu membayar PBB sehingga tidak pernah mendapat sanksi denda dari petugas pajak	
3) Ketepatan Waktu	1. Wajib Pajak selalu membayar PBB sebelum batas waktu pembayaran/jatuh tempo. 2. Wajib Pajak bangga jika membayar PBB tepat waktu 3. Wajib Pajak membayar PBB setelah menerima SPPT 4. Wajib Pajak merasa bersalah apabila membayar PBB tidak sesuai waktunya.	
4) Ketaatan	1. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban dengan benar yaitu taat membayar pajak. 2. Wajib Pajak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan 3. Dengan membayar PBB Wajib Pajak telah menjadi warga Negara yang baik dan taat pajak. 4. Sanksi denda PBB memacu Wajib Pajak untuk selalu taat dalam melakukan pembayaran pajak.	

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang menjadi objek penelitian dan catatan instansi bersangkutan yang berhubungan

dengan objek penelitian yang dapat digunakan sebagai tambahan data dalam penelitian. Data sekunder pada penelitian berupa laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Azwar (2014: 173) menyatakan bahwa validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur.

Rumus untuk menguji validitas yang digunakan adalah rumus korelasi *Product Moment* yang dikemukakan dalam Arikunto (2010:213) sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat
- n = banyaknya sampel
- X = item/pertanyaan
- Y = total variabel

Menghitung validitas suatu instrument dengan cara membandingkan indeks *product moment* dengan taraf kesalahan $\alpha=5\%$ atau $\alpha=0,05$. Apabila probabilitas dinyatakan lebih besar dari 0,05 maka instrument dikatakan tidak valid. Karena sampel yang digunakan adalah 150, maka hasil perhitungan dicocokkan dengan r tabel dengan N=150 yaitu sebesar 0,159, artinya item dinyatakan valid jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* atau r hitungnya di atas 0,159.

Tabel 3.5. Hasil validitas Kuesioner Tingkat ekonomi

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
x1.1	32,34	42,341	,494	,790	Valid
x1.2	32,57	43,049	,412	,797	Valid
x1.3	32,79	40,383	,514	,787	Valid
x1.4	32,53	42,849	,357	,804	Valid
x1.5	32,36	40,933	,574	,782	Valid
x1.6	32,92	41,459	,458	,793	Valid
x1.7	32,10	43,837	,327	,805	Valid
x1.8	32,57	40,922	,570	,782	Valid
x1.9	32,67	39,776	,588	,779	Valid
x1.10	32,65	42,205	,432	,796	Valid
x1.11	32,66	41,042	,448	,795	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa seluruh item kuesioner Tingkat ekonomi dinyatakan valid seluruhnya karena nilai r hitung > 0,159.

Tabel 3.6. Hasil validitas Kuesioner Pengetahuan Pajak

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Keterangan
x2.1	45,98	62,350	,521	,764	Valid
x2.2	46,68	61,644	,477	,766	Valid
x2.3	46,96	63,400	,397	,773	Valid
x2.4	46,20	61,220	,410	,772	Valid
x2.5	46,37	64,896	,305	,779	Valid
x2.6	46,42	64,640	,332	,777	Valid

x2.7	46,53	64,149	,341	,777	Valid
x2.8	46,15	63,556	,319	,779	Valid
x2.9	46,49	62,353	,395	,773	Valid
x2.10	46,53	63,066	,379	,774	Valid
x2.11	46,18	62,975	,450	,769	Valid
x2.12	46,41	61,925	,488	,766	Valid
x2.13	46,56	65,254	,317	,778	Valid
x2.14	46,60	63,859	,285	,782	Valid
x2.15	46,58	62,972	,373	,774	Valid
x2.16	46,42	64,156	,332	,777	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa seluruh item kuesioner

Pengetahuan pajak dinyatakan valid seluruhnya karena nilai r hitung > 0,159.

Tabel 3.7. Hasil validitas Kuesioner Kepatuhan membayar Pajak

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	Keterangan
Y1	53,49	83,844	,516	,839	Valid
Y2	53,19	84,346	,507	,840	Valid
Y3	53,61	87,998	,321	,850	Valid
Y4	53,27	83,598	,598	,835	Valid
Y5	53,02	87,981	,453	,843	Valid
Y6	53,00	87,287	,508	,841	Valid
Y7	53,41	82,868	,584	,835	Valid
Y8	53,37	85,011	,496	,840	Valid
Y9	53,35	84,230	,474	,842	Valid
Y10	53,51	87,207	,350	,849	Valid
Y11	53,24	82,630	,660	,832	Valid
Y12	53,33	81,916	,594	,835	Valid
Y13	53,21	89,020	,333	,849	Valid
Y14	53,18	89,599	,358	,847	Valid
Y15	52,92	86,962	,463	,842	Valid
Y16	53,25	89,209	,339	,848	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa seluruh item kuesioner Kepatuhan membayar Pajak dinyatakan valid seluruhnya karena nilai r hitung $> 0,159$.

2. Uji Reliabilitas

Suatu uji yang menunjukkan pengertian bahwa suatu instrument sudah cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik (Arikunto, 2010:221). Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu, artinya dapat dipercaya jadi dapat diandalkan. Menurut Sugiyono (2013:110) instrument yang *reliable* adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor antara item dalam instrument tersebut. Instrument dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *alpha cronbach* lebih besar atau sama dengan 0,6 ($\alpha \geq 0,6$). Rumus penghitungan *alpha cronbach* (Arikunto, 2010:239)

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas Instrumen

k = Banyaknya Pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah Varian Butir

σ_1^2 = Jumlah Varians Total

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai reliabilitas kuesioner Kuesioner Tingkat ekonomi = 0,807, adapun pada Kuesioner Pengetahuan

Pajak = 0,785, sedangkan pada Kuesioner Kepatuhan membayar Pajak = 0,850. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga kuesioner tersebut adalah reliabel karena nilai hitungannya $> 0,600$.

G. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

1. Pengujian Asumsi Klasik Model Regresi Berganda

Dalam melakukan estimasi model regresi, terdapat asumsi-asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar agar hasil estimasinya dapat digunakan sebagai dasar analisis. Ada empat masalah yang sering kali muncul yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya asumsi dasar (klasik), yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan uji normalitas (Juliandi, 2014:160-163).

a. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinier adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda (Juliandi, 2014:161). Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinieritas adalah dengan *variance inflated factor* (VIF), korelasi pearson antara variabel-variabel bebas, atau dengan *condition index* (CI).

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kolinier dalam model dapat dilihat dari nilai *variance inflated factor* (VIF) yang cukup besar.

Variance inflated factor adalah elemen diagonal matriks utama $(X^T X)^{-1}$.

Secara statistik jika $VIF > 10$ (jika $\alpha = 10\%$) maka dapat disimpulkan dalam model yang terbentuk terjadi multikolinieritas yang serius. Cara yang lain adalah dengan melihat koefisien korelasi antar variabel bebas. Apabila nilai koefisien ini rendah (di bawah 0,5) maka bebas gejala multikolinieritas.

Penyimpangan asumsi model klasik yang pertama adalah terdapatnya multi kolinieritas dalam model regresi yang dihasilkan. Hal ini berarti diantara variabel independen dalam model memiliki hubungan yang sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau mendekati satu). Konsekuensi yang sangat penting bagi model regresi yang mengandung multikolinieritas bahwa kesalahan standar estimasi cenderung akan meningkat dengan bertambahnya variabel independen dan tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar. Akibatnya model regresi yang diperoleh invalid untuk menaksir nilai variabel independen.

b. Uji Heteroskedastisitas

Penyimpangan asumsi model klasik ini berarti varians variabel dalam model tidak sama (konstan) (Juliandi, 2014:161-162). Konsekuensi dalam model regresi adalah penaksiran (estimator) yang diperoleh tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Hal ini terjadi karena adanya varians yang tidak minimum (tidak efisien). Keberadaan heteroskedastisitas dalam garis regresi dapat dideteksi

dengan cara melakukan pengujian korelasi ranking *Spearman uji Glesjer* (*Glesjer Test*) atau uji Park (*ParkTest*).

c. Uji Normalitas

Normalitas digunakan untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusinormal atautidak (Juliandi, 2014:160). Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal.

Deteksi normalita melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *P-P Plot*. Dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan / atau tidak mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas.

2. Teknik Analisis

Apabila data sudah terkumpul, maka diadakan analisis secara kualitatif yaitu untuk menjelaskan (mendeskripsikan) hubungan antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang dipakai, melalui uraian-uraian yang sistematis dan logis, selain itu juga diadakan analisis secara kuantitatif artinya memakai uji statistik. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Regresi Linier Berganda.

Adapun formula dari model Regresi Linier Berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (\text{Sugiyono, 2013:211}).$$

Dimana :

- Y : Kepatuhan wajib pajak
- b_0 : sebagai Konstanta
- b_1 : Koefisien Regresi Tingkat ekonomi
- b_2 : Koefisien Regresi Pengetahuan pajak
- X_1 : Tingkat ekonomi
- X_2 : Pengetahuan pajak

Alasan penggunaan model ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel, Tingkat ekonomi dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Model analisis regresi linier berganda, akan dianalisis dengan menggunakan program SPSS 23for windows, dengan program ini diharapkan bisa mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel Tingkat ekonomi dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak, dengan demikian pengujian hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan uji statistik.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F (Uji Simultan)

Pengaruh semua variabel independen terdiri: Tingkat ekonomi (X_1) dan Pengetahuan pajak (X_2) secara simultan di dalam model regresi terhadap nilai variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diketahui dengan *Analysis Of Variance* (ANOVA). Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji F , yakni dengan membandingkan antara nilai kritis F tabel pada tingkat kepercayaan sebesar 5% dengan nilai F hitung

yang terdapat pada *tabel of analisis* dari hasil perhitungan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen.

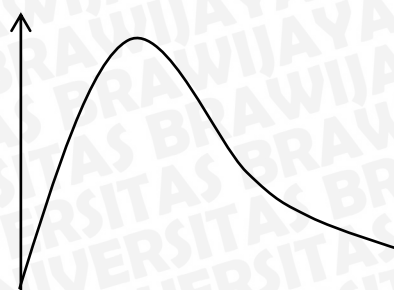
Hipotesis yang digunakan untuk uji adalah:

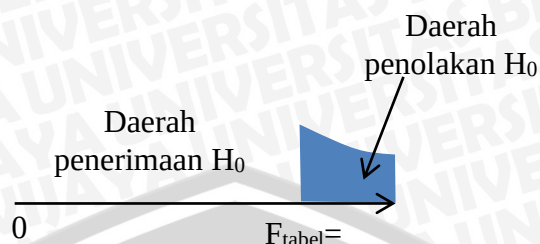
$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, Tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama variabel bebas/independen (X_1, X_2) terhadap variabel terikat/dependen (Y)

Adapaun keputusan dan kesimpulan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama sebagai berikut :

- a) H_0 diterima jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau *probabilitas* (sig) $> 0,05$ atau taraf signifikan 5% yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas (X_1, X_2) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat (Y).
- b) H_0 ditolak jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau *probabilitas* (sig) $< 0,05$ atau taraf signifikan (5%) yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas (X_1, X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Untuk melihat daerah penolakan dan penerimaan H_0 untuk uji F dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 3.1. Daerah daerah penolakan dan penerimaan H_0 dengan uji F
Sumber : Santoso (2002:205)

b. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

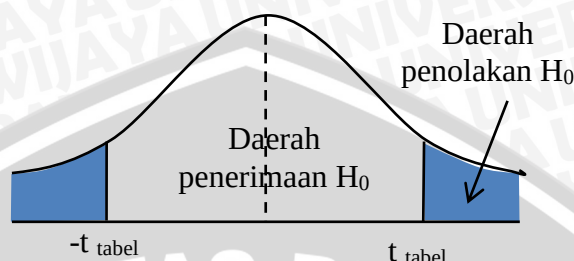
Dengan mengetahui koefisien regresi, dapat dipastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam persamaan tersebut secara parsial berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. Caranya adalah dengan melakukan pengujian terhadap koefisien regresi setiap variabel independen dan menggunakan uji t. Adapun hipotesis yang digunakan untuk uji adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$, Tidak berpengaruh signifikan secara parsial variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat (Y)

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan nilai t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%.

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan;
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Untuk melihat daerah penolakan dan penerimaan H_0 untuk uji t dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.2. Daerah daerah penolakan dan penerimaan H_0 dengan uji t
Sumber : Santoso (2002:205)

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Ukuran *Goodness of Fit* mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel independen (X_1, X_2). Ukuran *Goodness of Fit* (R^2) diinterpretasikan sebagai besar (%) pengaruh semua variabel bebas (X_1, X_2) secara bersama-sama (simultan) terhadap nilai variabel terikat (Y). Besar koefisien determinasi (R^2) adalah berkisar antar 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 besarnya (R^2) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, atau dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya R^2 suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independent terhadap nilai variabel dependen, sehingga dapat dikatakan semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Jadi nilai koefisien korelasi (*Multiple R*) akan bergerak diantara 0 sampai

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua kecamatan yang realisasi pencapaian Pajak Bumi Bangunan Tahun 2015 terendah di kabupaten Lamongan yaitu Kecamatan Lamongan dan Kecamatan Sarirejo. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Sarirejo sebesar 92,93% dan Kecamatan Lamongan sebesar 93,56%.

1. Kecamatan Sarirejo

Kecamatan Sarirejo merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 14 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi $07^{\circ}08'31''$ dan $07^{\circ}11'31''$ Lintang Selatan, serta $112^{\circ}25'18''$ dan $112^{\circ}29'42''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Sarirejo, adalah berupa daratan seluas 47,38 km².

Batas wilayah Kecamatan Sarirejo bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Deket, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Tikung.

Kantor Kecamatan Sarirejo berada di wilayah Desa Dermolemahbang dengan jarak antara desa ke ibu kota kecamatan terdekat adalah Desa Gempoltukmloko yang berjarak 1 km serta jarak desa ke ibu kota kecamatan yang terjauh adalah Desa Tambakmenjangan yaitu berjarak 11 km.

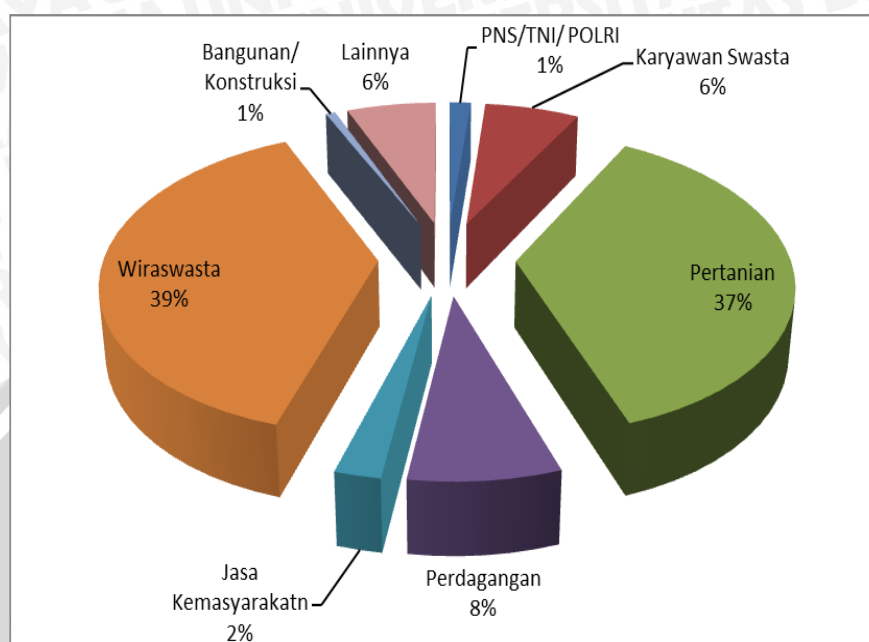
Secara pemerintahan, Kecamatan Sarirejo terdiri dari 9 desa definitif dan

merupakan desa swasembada. Pada tahun 2015 semua jabatan kepala desa telah terisi. Rata-rata pendidikan lurah/kades adalah SLTA, untuk jabatan sekretaris desa ada 1 wilayah yang kosong yaitu Desa Simbatan, dengan rata-rata pendidikan sekretaris desa adalah SLTA.

Kecamatan Sarirejo terdiri dari 47 dusun, 127 RW dan 405 RT. Jumlah dusun terbanyak adalah Desa Bulumargi 5 dusun, jumlah dusun terkecil adalah Desa Pucakwangi, Desa Patihan, Desa Plaosan, Desa Sogo, Desa Kebalanpelang dan Desa Moropelang, yang terdiri dari 1 dusun. Jumlah RW terkecil adalah Desa Canggih dan Beru dengan 1 RW, serta jumlah RW terbanyak adalah Desa Dermolemahbang dengan 7 RW. Jumlah RT terkecil adalah Desa Canggih sebanyak 7 RT serta jumlah RT terbanyak adalah Desa Dermolemahbang dengan 39 RT.

Berdasarkan data pemerintahan Kecamatan Sarirejo, jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan pada tahun 2015 sebanyak 12.751 penduduk. Apabila dikategorikan, pekerjaan penduduk menyebar di sektor pertanian, perdagangan, bangunan/konstruksi, jasa kemasyarakatan, wiraswasta, dan sektor lainnya. Mayoritas penduduk di Kecamatan Sarirejo adalah wiraswasta yang berjumlah 4.919 penduduk dengan prosentase 39%. Sektor Pertanian menempati urutan kedua sebagai lapangan usaha penduduk Kecamatan Sarirejo dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 4.692 penduduk dengan prosentase 37%. Urutan ketiga yaitu sektor perdagangan dengan jumlah penduduk sebanyak 963 penduduk dengan prosentase 8%. Untuk gambaran tenaga kerja di Kecamatan Sarirejo dapat

dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Sarirejo
Sumber : Lamongan dalam Angka (2015)

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat, terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada Tahun 2015 jumlah total ADD di Kecamatan Sarirejo Rp. 2.423.170.500,-. Penerima ADD ini diberikan kepada semua desa yang ada di Kecamatan Sarirejo. Penerimaan ADD terbanyak di Desa Sumberjo sebesar Rp. 328.617.000,- sedangkan yang terkecil Desa Kedungkumpul yaitu Rp 228.268.500,-.

Berdasarkan data yang ada, dari 9 desa yang ada di kecamatan Sarirejo, diketahui bahwa desa Dermolemahbang adalah desa dengan realisasi pencapaian Pajak Bumi Bangunan terendah yaitu 70,7% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 113.596.366,- hanya terealisasi sebesar Rp 80.361.866,- dari 4.606 wajib pajak.

Berdasarkan data tersebut maka penelitian dilakukan di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo. Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dari segi waktu, tenaga dan dana, serta luasnya wilayah, maka penelitian ini menggunakan sampel sebesar 2,5% dari populasi dimana jumlah wajib pajak di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo 4.606 orang, sehingga jumlah sampel adalah $4.606 \text{ orang} \times 2,5\% = 115,15$ sampel dibulatkan menjadi 115 orang.

2. Kecamatan Lamongan

Kecamatan Lamongan merupakan Ibukota Kabupaten Lamongan dengan ketinggian 7,7 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi $112^{\circ} 41'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 12'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kecamatan Lamongan, adalah berupa daratan seluas 39,65 km².

Batas Wilayah Kecamatan Lamongan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Turi, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Deket, sebelah selatan sebagian besar berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tikung dan di bagian barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukodadi.

Lokasi Kantor Kecamatan Lamongan berada di wilayah Kelurahan Sukomulyo dengan jarak antara desa ke ibu kota kecamatan terdekat adalah Kelurahan Tlogoanyar dan Sidoharjo 1,0 km serta jarak desa ke ibu kota kecamatan yang terjauh adalah Desa Rancangkencono yaitu berjarak 6,5 km.

Secara pemerintahan di Wilayah Kecamatan Lamongan terdiri dari 12 desa dan 8 kelurahan, pada tahun 2015 semua jabatan kepala desa dan lurah telah terisi, rata-rata pendidikan lurah/kades adalah Tamat Perguruan Tinggi,

untuk jabatan sekretaris desa ada 3 wilayah desa yang kosong yaitu Desa Wajik, Sendangrojo dan Tanjung, dengan rata-rata pendidikan sekretaris desa adalah SLTA.

Kecamatan Lamongan terdiri dari 30 dusun, 91 RW dan 316 RT. Jumlah dusun terbanyak adalah Desa Rancangkencono, Sumberjo dan Pangkatrejo, masing-masing sebanyak 4 dusun, jumlah dusun terkecil adalah Desa Tanjung dan Made, yang terdiri dari 1 dusun. Jumlah RW terkecil adalah Desa Wajik, Sidomukti, Tanjung, Kebet dan Tanjung sebanyak masing-masing 2 RW, serta jumlah RW terbanyak adalah Desa Made dengan 11 RW. Jumlah RT terkecil adalah Desa Tanjung sebanyak 5 RT serta jumlah RT terbanyak adalah Kelurahan Sukomulyo dengan 38 RT.

Berdasarkan data yang ada, dari 8 kelurahan yang ada di kecamatan Lamongan, diketahui bahwa Kelurahan Tumenggungan merupakan kelurahan dengan realisasi pencapaian Pajak Bumi Bangunan terendah yaitu 82,4% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 207.260.021,- hanya terealisasi sebesar Rp 170.748.178,- dari 1.730 wajib pajak.

Berdasarkan data tersebut maka penelitian dilakukan di Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan dengan sampel sebesar 2,5% dari populasi dimana jumlah wajib pajak di Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan 1.730 orang, sehingga jumlah sampel adalah $1.730 \text{ orang} \times 2,5\% = 43,25$ sampel dibulatkan menjadi 43 orang, sehingga jumlah seluruh sampel sebanyak 158 orang.

B. Deskripsi Data Responden

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2007: 29). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian.

Gambaran data responden terdiri dari asal wilayah responden, jenis kelamin, Usia dan Pendidikan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Resonden berdasarkan Asal Kecamatan

Data karakteristik responden berdasarkan asal kecamatan wajib pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan yang berjumlah 158 orang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Kecamatan

Asal Kecamatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo	115	72,8
Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan	43	27,2
Jumlah	158	100

Suber Data : Data Primer diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo sebanyak 115 atau 72,8%, sedangkan yang berasal dari Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan sebanyak 43 responden atau 27,2%.

2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan yang berjumlah 158 orang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	106	67,1
Perempuan	52	32,9
Jumlah	158	100

Suber Data : Data Primer diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 106 responden atau 67,1%, sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan responden atau 52 atau 32,9%.

3. Responden Berdasarkan Usia

Data karakteristik responden berdasarkan usia wajib pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan yang berjumlah 158 orang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 30 tahun	40	25,3
30-50 Tahun	71	44,9
> 50 tahun	47	29,7
Jumlah	158	100

Suber Data : Data Primer diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berusia sebanyak < 30 tahun sebanyak 40 responden atau 25,3%, yang berusia 30-50 Tahun sebanyak 71 responden atau 44,9%, dan yang berusia > 50 tahun sebanyak 47 responden atau 29,7%.

4. Responden Berdasarkan Pendidikan

Data karakteristik responden berdasarkan Pendidikan wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan yang berjumlah 158 orang dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Dasar (SD – SMP)	36	22,8
Menengah (SMA)	103	65,2
Tinggi (PT)	19	12,0
Jumlah	158	100

Suber Data : Data Primer diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan Dasar yaitu yang lulusan SD atau SMP sebanyak 36 responden atau 22,8%, sedangkan yang berpendidikan Menengah atau SMA sebanyak 103 responden atau 65,2%, dan yang berpendidikan Tinggi atau Perguruan tinggi sebanyak 19 responden atau 12,0%.

5. Responden Berdasarkan Pendapatan

Data karakteristik responden berdasarkan Pendapatan wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan yang berjumlah 158 orang dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
< UMR (Rp 1.573.000)	66	41,77
≥ UMR (Rp 1.573.000)	92	58,23
Jumlah	158	100

Suber Data : Data Primer diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berpendapatan di bawah Upah Minimum Regional kabupaten Lamongan tahun 2016 sebesar Rp 1.573.000,- sebanyak 66 responden atau 41,77%, sedangkan yang berpenghasilan di atas UMR sebanyak 92 responden atau

58,23%.

C. Deskripsi Data Penelitian

1. Analisis Diskriptif

a. Deskripsi Variabel Tingkat ekonomi

Dalam variabel Tingkat ekonomi (X1) terdapat 3 indikator yang dinyatakan dalam 11 item pertanyaan yang diberikan kepada wajib pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan yang berjumlah 158 responden dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Tabel Distribusi Frekuensi Tingkat ekonomi

Item	STS		TS		RG		S		SS		Mean
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	
x1.1	6	3,80	18	11,39	47	29,75	69	43,67	18	11,39	3,47
x1.2	11	6,96	20	12,66	58	36,71	57	36,08	12	7,59	3,25
x1.3	20	12,66	31	19,62	49	31,01	41	25,95	17	10,76	3,03
Mean Indikator Tingkat penghasilan											3,25
x1.4	10	6,33	33	20,89	41	25,95	50	31,65	24	15,19	3,28
x1.5	8	5,06	20	12,66	41	25,95	70	44,30	19	12,03	3,46
Mean Indikator Banyaknya Anggota Keluarga											3,37
x1.6	20	12,66	39	24,68	50	31,65	36	22,78	13	8,23	2,89
x1.7	6	3,80	16	10,13	32	20,25	67	42,41	37	23,42	3,72
x1.8	11	6,96	24	15,19	50	31,65	61	38,61	12	7,59	3,25
Mean Indikator Kondisi Rumah											3,29
x1.9	14	8,86	30	18,99	53	33,54	41	25,95	20	12,66	3,15
x1.10	15	9,49	25	15,82	48	30,38	58	36,71	12	7,59	3,17
x1.11	19	12,03	25	15,82	50	31,65	40	25,32	24	15,19	3,16
Mean Indikator Kepemilikan Barang											3,16
Mean Variabel Tingkat Ekonomi											3,26

Sumber : Data primer diolah 2016

Keterangan

1. Indikator Tingkat penghasilan terdiri dari item nomor X1.1, X1.2, dan X1.3.
2. Indikator Banyaknya Anggota Keluarga terdiri dari item nomor X1.4 dan X1.5.
3. Indikator Kondisi Rumah terdiri dari item nomor X1.6, X1.7 dan X1.8.
4. Indikator Kepemilikan Barang terdiri dari item nomor X1.9, X1.10 dan X1.11.

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil distribusi frekuensi variabel Tingkat ekonomi (X1) dalam Tabel 4.6 diketahui bahwa mean indikator tingkat penghasilan adalah sebesar 3,25 atau dalam kategori ragu-ragu atau sedang. Artinya tingkat penghasilan responden dalam kategori sedang. Indikator tingkat penghasilan terdiri dari 3 item yaitu X1.1, X1.2 dan X1.3, adapun perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut terdapat 6 responden atau 3,80 % yang menyatakan sangat tidak setuju tentang item X1.1 yaitu Tingkat penghasilan yang saya miliki selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 18 responden atau 11,39%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 47 responden atau 29,75%, yang menyatakan setuju sebanyak 69 responden atau 43,67%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 responden atau 11,39%. Sehingga nilai rata-rata item X1.1 sebesar 3,47 masuk dalam kategori Ragu-ragu yang menunjukkan responden ragu-ragu bahwa tingkat penghasilan yang dimilikinya selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk item X1.2 yaitu Saya merasa bahwa penghasilan tambahan dari anggota keluarga yang lain dapat membantu keluarga saya secara ekonomi, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 responden atau 6,96%,

yang menyatakan setuju sebanyak 20 responden atau 12,66%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 58 responden atau 36,71%, yang menyatakan setuju sebanyak 57 responden atau 36,08%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 responden atau 7,59%. Sehingga nilai rata-rata item X1.2 sebesar 3,25 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden ragu-ragu kalau penghasilan tambahan dari anggota keluarga yang lain dapat membantu keluarganya secara ekonomi.

Untuk item X1.3 yaitu total penghasilan keluarga selalu tercukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 20 responden atau 12,66%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 31 responden atau 19,62%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 49 responden atau 31,01%, yang menyatakan setuju sebanyak 41 responden atau 25,95%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 17 responden atau 10,76%. Sehingga nilai rata-rata item X1.3 sebesar 3,03 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden menyatakan ragu-ragu bahwa total penghasilan keluarga selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selanjutnya mean pada indikator besarnya anggota keluarga adalah sebesar 3,25 atau dalam kategori ragu-ragu atau sedang. Artinya besarnya anggota keluarga responden dalam kategori sedang. Indikator besarnya anggota keluarga terdiri dari 2 item yaitu X1.4, dan X1.5, adapun perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut : item X1.4 yaitu banyaknya jumlah anggota keluarga kami sesuai dengan tingkat

perekonomian keluarga, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 responden atau 6,33%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 33 responden atau 20,89%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 41 responden atau 25,95%, yang menyatakan setuju sebanyak 50 responden atau 31,65%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24 responden atau 15,19%. Sehingga nilai rata-rata item X1.4 sebesar 3,28 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden ragu-ragu banyaknya jumlah anggota keluarga sudah sesuai dengan tingkat perekonomian keluarga.

Untuk item X1.5 yaitu saya rasa besarnya anggota keluarga tidak menjadi beban bagi kepala keluarga, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8 responden atau 5,06%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20 responden atau 12,66%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 41 responden atau 25,95%, yang menyatakan setuju sebanyak 70 responden atau 44,30%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 19 responden atau 12,03%. Sehingga nilai rata-rata item X1.5 sebesar 3,46 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden menyatakan ragu-ragu kalau besarnya anggota keluarga tidak menjadi beban bagi kepala keluarga.

Besarnya mean pada indikator kondisi rumah adalah 3,25 atau dalam kategori ragu-ragu atau dalam kategori sedang. Artinya kondisi rumah responden dalam kategori sedang. Indikator kondisi rumah terdiri dari 3 item yaitu X1.6, X1.7 dan X1.8. Perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut : Pada item X1.6 yaitu bangunan tempat tinggal kami adalah bangunan permanen yang sangat layak untuk dihuni, yang

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 6 responden atau 3,80%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 16 responden atau 10,13%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 32 responden atau 20,25%, yang menyatakan setuju sebanyak 67 responden atau 42,41%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 37 responden atau 23,42%. Sehingga nilai rata-rata item X1.6 sebesar 3,72 masuk dalam kategori setuju menunjukkan responden setuju bahwa bangunan tempat tinggalnya adalah bangunan permanen yang sangat layak untuk dihuni.

Selanjutnya item X1.7 yaitu luas bangunan kami sangat ideal sebagai hunian, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 responden atau 6,96%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 24 responden atau 15,19%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 50 responden atau 31,65%, yang menyatakan setuju sebanyak 61 responden atau 38,61%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 responden atau 7,59%. Sehingga nilai rata-rata item X1.7 sebesar 3,25 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan ragu-ragu jika luas bangunannya sangat ideal sebagai hunian.

Untuk item X1.8 yaitu ruangan kamar yang ada saya rasa sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 14 responden atau 8,86%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 30 responden atau 18,99%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 53 responden atau 33,54%, yang menyatakan setuju sebanyak 41 responden atau 25,95%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 responden atau

12,66%. Sehingga nilai rata-rata item X1.8 sebesar 3,15 masuk dalam kategori ragu-ragu, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan ragu-ragu jika ruangan kamar yang ada sudah sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal.

Besarnya mean pada indikator kepemilikan barang adalah 3,25 atau dalam kategori ragu-ragu atau sedang. Artinya kepemilikan barang pada responden dalam kategori sedang. Indikator kepemilikan barang terdiri dari 3 item yaitu X1.9, X1.10 dan X1.11. Pada item X1.9 yaitu Saya memiliki kendaraan yang sangat layak untuk kebutuhan transportasi, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 14 responden atau 8,86%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 30 responden atau 18,99%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 53 responden atau 33,54%, yang menyatakan setuju sebanyak 41 responden atau 25,95%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 responden atau 12,66%. Sehingga nilai rata-rata item X1.9 sebesar 3,15 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden menyatakan ragu-ragu jika memiliki kendaraan yang sangat layak untuk kebutuhan transportasi.

Selanjutnya item X1.10 yaitu perabotan rumah tangga yang kami miliki sangat layak bagi kami, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 15 responden atau 9,49%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 25 responden atau 15,82%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 48 responden atau 30,38%, yang menyatakan setuju sebanyak 58 responden atau 36,71%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 responden atau 7,59%.

Sehingga nilai rata-rata item X1.10 sebesar 3,17 masuk dalam kategori ragu-ragu, artinya sebagian besar responden menyatakan ragu-ragu terhadap pernyataan bahwa perabotan rumah tangga yang dimiliki sangat layak bagi responden.

Untuk item X1.11 yaitu Kami selalu memiliki simpanan diluar penghasilan, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 19 responden atau 12,03%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 25 responden atau 15,82%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 50 responden atau 31,65%, yang menyatakan setuju sebanyak 40 responden atau 25,32%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24 responden atau 15,19%. Sehingga nilai rata-rata item X1.11 sebesar 3,16 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan sebagian besar responden ragu-ragu jika memiliki simpanan diluar penghasilan.

Secara keseluruhan rata-rata dari variabel Tingkat ekonomi (X1) adalah 3,26 termasuk dalam kategori ragu-ragu, hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar responden Wajib Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lamongan memiliki Tingkat ekonomi dalam kategori sedang

b. Deskripsi Variabel Pengetahuan pajak

Dalam variabel pengetahuan Pajak (X2) terdapat 4 indikator yang terbagio menjadi 16 item pertanyaan yang diberikan kepada 158 responden

wajib pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan untuk dijawab. Hasil jawaban dari responden yang telah diolah dijabarkan pada

Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan perpajakan

Item	STS		TS		RG		S		SS		Mean
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	
x2.1	4	2,53	15	9,49	51	32,28	65	41,14	23	14,56	3,56
x2.2	16	10,13	39	24,68	62	39,24	26	16,46	13	8,23	2,84
x2.3	26	16,46	50	31,65	50	31,65	29	18,35	3	1,90	2,58
x2.4	16	10,13	24	15,19	46	29,11	35	22,15	37	23,42	3,34
Mean indikator Pengetahuan PBB											3,08
x2.5	8	5,06	36	22,78	46	29,11	57	36,08	11	6,96	3,17
x2.6	8	5,06	37	23,42	50	31,65	54	34,18	9	5,70	3,12
x2.7	14	8,86	33	20,89	60	37,97	40	25,32	11	6,96	3,01
x2.8	11	6,96	27	17,09	41	25,95	48	30,38	31	19,62	3,39
Mean indikator Asas, hak dan kewajiban wajib pajak											3,17
x2.9	19	12,03	30	18,99	50	31,65	43	27,22	16	10,13	3,04
x2.10	14	8,86	38	24,05	55	34,81	35	22,15	16	10,13	3,01
x2.11	7	4,43	21	13,29	54	34,18	60	37,97	16	10,13	3,36
x2.12	11	6,96	30	18,99	58	36,71	46	29,11	13	8,23	3,13
Mean indikator SPOP dan NJOP											3,14
x2.13	10	6,33	36	22,78	66	41,77	40	25,32	6	3,80	2,97
x2.14	25	15,82	33	20,89	43	27,22	41	25,95	16	10,13	2,94
x2.15	15	9,49	43	27,22	49	31,01	35	22,15	16	10,13	2,96
x2.16	13	8,23	29	18,35	55	34,81	48	30,38	13	8,23	3,12
Mean indikator Dasar Pengenaan, tarif dan Cara hitung PBB											2,99
Mean Variabel Pengetahuan Pajak											3,10

Sumber: Data yang diolah (2016)

Keterangan :

1. Indikator Pengetahuan PBB terdiri dari item nomor X2.1, X2.2, X2.3, dan X2.4.
2. Indikator Asas, hak dan kewajiban wajib pajak terdiri dari item nomor X2.5, X2.6, X2.7, dan X2.8.
3. Indikator SPOP dan NJOP terdiri dari item nomor X2.9, X2.10, X2.11 dan X2.12
4. Indikator Dasar Pengenaan, tarif dan Cara hitung PBB terdiri dari item nomor X2.13, X2.14, X2.15 dan X2.16

Hasil distribusi frekuensi variabel pengetahuan pajak (X2) dalam Tabel 4.7 diketahui bahwa mean indikator pengetahuan PBB adalah sebesar 3,028 atau dalam kategori ragu-ragu atau sedang. Artinya pengetahuan responden tentang PBB dalam kategori sedang. Indikator kondisi rumah terdiri dari 4 item yaitu X2.1, X2.2, X2.3, dan X2.4. Perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut : Pada item X2.1 yaitu pertanyaan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan yang meliputi keadaan tanah dan bangunan, sebesar 4 responden atau 2,53% yang menyatakan sangat tidak setuju, jumlah yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15 responden atau 9,49%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 51 responden atau 32,28%, yang menyatakan setuju sebanyak 65 responden atau 41,14%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23 responden atau 14,56%. Sehingga nilai rata-rata item X2.1 sebesar 3,56 masuk dalam kategori setuju yang menunjukkan pengetahuan responden terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan yang meliputi keadaan tanah dan bangunan tergolong tinggi.

Untuk item X2.2 yaitu Saya merasa bahwa PBB merupakan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 16 responden atau 10,13%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 39 responden atau 24,68%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 62 responden atau 39,24%, yang menyatakan setuju sebanyak 26 responden atau 16,46%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 responden atau 8,23%. Sehingga nilai rata-rata item X2.2 sebesar 2,84 masuk dalam kategori

ragu-ragu yang menunjukkan responden masih ragu-ragu jika dikatakan bahwa PBB merupakan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Untuk item X2.3 yaitu Besarnya PBB dipengaruhi oleh keadaan objek tanah dan bangunan, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 26 responden atau 16,46%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 50 responden atau 31,65%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 50 responden atau 31,65%, yang menyatakan setuju sebanyak 29 responden atau 18,35%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 responden atau 1,90%. Sehingga nilai rata-rata item X2.3 sebesar 2,58 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden ragu-ragu dengan pernyataan besarnya PBB dipengaruhi oleh keadaan objek tanah dan bangunan.

Selanjutnya item X2.4 yaitu Apakah menurut anda PBB disebut pajak objektif, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 16 responden atau 10,13%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 24 responden atau 15,19%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 46 responden atau 29,11%, yang menyatakan setuju sebanyak 35 responden atau 22,15%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 37 responden atau 23,42%. Sehingga nilai rata-rata item X2.4 sebesar 3,34 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden ragu-ragu dengan pernyataan bahwa PBB disebut pajak objektif.

Indikator Asas, hak dan kewajiban wajib pajak terdiri dari item nomor X2.5, X2.6, X2.7, dan X2.8, berdasarkan mean indikator pengetahuan PBB adalah sebesar 3,17 yang berada dalam kategori ragu-ragu atau sedang. Artinya pengetahuan responden tentang Asas, hak dan kewajiban wajib

pajak dalam kategori sedang. Perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut : Untuk item X2.5 yaitu Untuk menghindari pajak berganda, pengenaan PBB tidak terjadi dua kali atau lebih atas suatu objek yang sama, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8 responden atau 5,06%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 36 responden atau 22,78%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 46 responden atau 29,11%, yang menyatakan setuju sebanyak 57 responden atau 36,08%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden atau 6,96%. Sehingga nilai rata-rata item X2.5 sebesar 3,17 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa untuk menghindari pajak berganda, pengenaan PBB tidak terjadi dua kali atau lebih atas suatu objek yang sama

Pada item X2.6 yaitu Wajib pajak dapat melaporkan perubahan data objek pajak, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8 responden atau 5,06%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 37 responden atau 23,42%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 50 responden atau 31,65%, yang menyatakan setuju sebanyak 54 responden atau 34,18%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden atau 5,70%. Sehingga nilai rata-rata item X2.6 sebesar 3,12 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Wajib pajak dapat melaporkan perubahan data objek pajak

Selanjutnya item X2.7 yaitu PBB diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan dan

kepastian hukum, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 14 responden atau 8,86%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 33 responden atau 20,89%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 60 responden atau 37,97%, yang menyatakan setuju sebanyak 40 responden atau 25,32%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden atau 6,96%. Sehingga nilai rata-rata item X2.7 sebesar 3,01 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan sebagian besar responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa PBB diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum

Untuk item X2.8 yaitu Wajib pajak mendapat SPPT PBB-P2 setiap tahun pajak, paling lambat Juni atau satu bulan setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 responden atau 6,96%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 27 responden atau 17,09%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 41 responden atau 25,95%, yang menyatakan setuju sebanyak 48 responden atau 30,38%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31 responden atau 19,62%. Sehingga nilai rata-rata item X2.8 sebesar 3,39 masuk dalam kategori yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Wajib pajak mendapat SPPT PBB-P2 setiap tahun pajak, paling lambat Juni atau satu bulan setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Indikator SPOP dan NJOP terdiri dari item nomor X2.9, X2.10, X2.11 dan X2.12. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa mean indikator

pengetahuan tentang SPOP dan NJOP adalah sebesar 3,14 yang berada dalam kategori ragu-ragu atau sedang. Artinya pengetahuan responden tentang SPOP dan NJOP dalam kategori sedang. Perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut :

Pada item X2.9 yaitu Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan tepat waktu untuk dikembalikan kepada Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah SPOP diterima, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 19 responden atau 12,03%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 30 responden atau 18,99%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 50 responden atau 31,65%, yang menyatakan setuju sebanyak 43 responden atau 27,22%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau 10,13%. Sehingga nilai rata-rata item X2.9 sebesar 3,04 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan tepat waktu untuk dikembalikan kepada Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah SPOP diterima

Selanjutnya item X2.10 yaitu Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi oleh wajib pajak dengan jelas, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 14 responden atau 8,86%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 38 responden atau 24,05%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 55 responden atau 34,81%, yang menyatakan setuju sebanyak 35 responden atau 22,15%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau

10,13%. Sehingga nilai rata-rata item X2.10 sebesar 3,01 yang menunjukkan responden masuk dalam kategori masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi oleh wajib pajak dengan jelas.

Untuk item X2.11 yaitu Objek pajak untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 7 responden atau 4,43%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 21 responden atau 13,29%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 54 responden atau 34,18%, yang menyatakan setuju sebanyak 60 responden atau 37,97%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau 10,13%. Sehingga nilai rata-rata item X2.11 sebesar 3,36 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Objek pajak untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan

Pada item X2.12 yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sepenuhnya ditentukan oleh petugas pajak, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 responden atau 6,96%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 30 responden atau 18,99%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 58 responden atau 36,71%, yang menyatakan setuju sebanyak 46 responden atau 29,11%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 responden atau 8,23%. Sehingga nilai rata-rata item X2.12 sebesar 3,13 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sepenuhnya ditentukan

oleh petugas pajak

Indikator Dasar Pengenaan, tarif dan Cara hitung PBB terdiri dari item nomor X2.13, X2.14, X2.15 dan X2.16. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa mean indikator pengetahuan tentang dasar pengenaan, tarif dan cara hitung PBB adalah sebesar 2,99 yang berada dalam kategori ragu-ragu atau sedang. Artinya pengetahuan responden tentang dasar pengenaan, tarif dan cara hitung PBB dalam kategori sedang. Perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut :

Untuk item X2.13 yaitu Tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 responden atau 6,33%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 36 responden atau 22,78%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 66 responden atau 41,77%, yang menyatakan setuju sebanyak 40 responden atau 25,32%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 responden atau 3,80%. Sehingga nilai rata-rata item X2.13 sebesar 2,97 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen

Untuk item X2.14 yaitu Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 3 tahun sekali, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 25 responden atau 15,82%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 33 responden atau 20,89%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 43

responden atau 27,22%, yang menyatakan setuju sebanyak 41 responden atau 25,95%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau 10,13%. Sehingga nilai rata-rata item X2.14 sebesar 2,94 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 3 tahun sekali.

Pada item X2.15 yaitu Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dalam peraturan daerah, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 15 responden atau 9,49%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 43 responden atau 27,22%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 49 responden atau 31,01%, yang menyatakan setuju sebanyak 35 responden atau 22,15%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau 10,13%. Sehingga nilai rata-rata item X2.15 sebesar 2,96 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya item X2.16 yaitu Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan sesuai dengan perkembangan wilayahnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 13 responden atau 8,23%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 29 responden atau 18,35%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 55 responden atau 34,81%, yang menyatakan setuju sebanyak 48 responden atau 30,38%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 responden atau 8,23%. Sehingga nilai

rata-rata item X2.16 sebesar 3,12 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan responden masih ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan sesuai dengan perkembangan wilayahnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah

Secara keseluruhan rata-rata dari variabel Pengetahuan pajak (X2) adalah 3,10 termasuk dalam kategori ragu-ragu, hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar responden Wajib Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lamongan memiliki pengetahuan pajak dalam kategori sedang atau cukup.

c. Deskripsi Variabel Kepatuhan wajib pajak

Dalam variabel Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan (Y) terdapat 4 aspek yang terdiri dari 16 item pertanyaan yang diberikan kepada 158 responden wajib pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan untuk dijawab. Hasil jawaban dari responden yang telah diolah dijabarkan pada Tabel 4.8

Tabel 4.8. Tabel Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib pajak

Item	STS		TS		RG		S		SS		Mean
	f	%	f	%	F	%	f	%	f	%	
Y1	17	10,76	20	12,66	40	25,32	55	34,81	26	16,46	3,34
y2	13	8,23	13	8,23	32	20,25	61	38,61	39	24,68	3,63
Y3	15	9,49	29	18,35	48	30,38	39	24,68	27	17,09	3,22
Y4	10	6,33	16	10,13	36	22,78	68	43,04	28	17,72	3,56
Mean Indikator Kesadaran											3,43
Y5	5	3,16	5	3,16	41	25,95	72	45,57	35	22,15	3,80
Y6	3	1,90	10	6,33	33	20,89	78	49,37	34	21,52	3,82
Y7	14	8,86	18	11,39	44	27,85	53	33,54	29	18,35	3,41
Y8	11	6,96	20	12,66	42	26,58	56	35,44	29	18,35	3,46

Mean Indikator Kelancaran											3,62
Y9	18	11,39	13	8,23	41	25,95	49	31,01	37	23,42	3,47
Y10	15	9,49	27	17,09	38	24,05	49	31,01	29	18,35	3,32
Y11	9	5,70	17	10,76	33	20,89	71	44,94	28	17,72	3,58
Y12	19	12,03	12	7,59	30	18,99	66	41,77	31	19,62	3,49
Mean Indikator Ketepatan Waktu											3,47
Y13	6	3,80	18	11,39	39	24,68	63	39,87	32	20,25	3,61
Y14	3	1,90	17	10,76	36	22,78	79	50,00	23	14,56	3,65
Y15	3	1,90	13	8,23	32	20,25	59	37,34	51	32,28	3,90
Y16	6	3,80	17	10,76	42	26,58	67	42,41	26	16,46	3,57
Mean Indikator Ketaatan											3,68
Mean Variabel Kepatuhan Wajib Pajak											3,55

Sumber: Data yang diolah (2016)

Keterangan :

1. Indikator Kesadaran yang terdiri dari item nomor Y.1, Y.2, Y.3 dan Y.4.
2. Indikator Kelancaran yang terdiri dari item nomor Y.5, Y.6, Y.7 dan Y.8.
3. Indikator Ketepatan Waktu yang terdiri dari item nomor Y.9, Y.10, Y.11 dan Y.12.
4. Indikator Ketaatan yang terdiri dari item nomor Y.13, Y.14, Y.15 dan Y.16.

Hasil distribusi frekuensi variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Y), berdasarkan indikator Kesadaran yang terdiri dari 4 item yaitu item nomor Y.1, Y.2, Y.3 dan Y.4, diketahui bahwa mean indikator kesadaran adalah sebesar 3,43 yang berada dalam kategori ragu-ragu atau sedang. Artinya kepatuhan membayar pajak pada indikator kesadaran dalam kategori sedang. Perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa terdapat 17 responden atau 10,76% yang menyatakan sangat tidak setuju tentang item Y.1 yaitu Saya berusaha membayar pajak setiap tahun dengan sukarela tanpa adanya

paksaan dari petugas, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20 responden atau 12,66%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 40 responden atau 25,32%, yang menyatakan setuju sebanyak 55 responden atau 34,81%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26 responden atau 16,46%. Sehingga nilai rata-rata item Y.1 sebesar 3,34 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan sebagian besar responden masih ragu-ragu dengan pernyataan Saya berusaha membayar pajak setiap tahun dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari petugas

Untuk item Y.2 yaitu Saya sadar membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 13 responden atau 8,23%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 responden atau 8,23%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 32 responden atau 20,25%, yang menyatakan setuju sebanyak 61 responden atau 38,61%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 39 responden atau 24,68%. Sehingga nilai rata-rata item Y.2 sebesar 3,63 masuk dalam kategori setuju yang menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara

Untuk item Y.3 yaitu Saya merasa bahwa kesadaran terhadap kebijakan pajak (sanksi dan peraturan) merupakan kewajiban saya sebagai wajib pajak PBB, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 15 responden atau 9,49%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 29 responden atau 18,35%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 48 responden atau 30,38%, yang menyatakan setuju sebanyak 39 responden atau 24,68%, yang

menyatakan sangat setuju sebanyak 27 responden atau 17,09%. Sehingga nilai rata-rata item Y.3 sebesar 3,22 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan sebagian besar responden masih ragu-ragu dengan pernyataan Saya merasa bahwa kesadaran terhadap kebijakan pajak (sanksi dan peraturan) merupakan kewajiban saya sebagai wajib pajak PBB

Selanjutnya item Y.4 yaitu Saya merasa bahwa dengan membayar PBB akan membantu pembangunan daerah, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 responden atau 6,33%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 16 responden atau 10,13%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 36 responden atau 22,78%, yang menyatakan setuju sebanyak 68 responden atau 43,04%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28 responden atau 17,72%. Sehingga nilai rata-rata item Y.4 sebesar 3,56 masuk dalam kategori setuju yang menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa dengan membayar PBB akan membantu pembangunan daerah

Variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Indikator Kelancaran yang terdiri dari item nomor Y.5, Y.6, Y.7 dan Y.8. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa mean indikator kelancaran adalah sebesar 3,62 yang berada dalam kategori setuju atau tinggi. Artinya kepatuhan membayar pajak pada indikator kelancaran dalam kategori tinggi. Perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut :

Untuk item Y.5 yaitu Saya membayar PBB dengan lancar tanpa merasa ada kesulitan, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 5 responden atau 3,16%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 responden

atau 3,16%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 41 responden atau 25,95%, yang menyatakan setuju sebanyak 72 responden atau 45,57%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 35 responden atau 22,15%. Sehingga nilai rata-rata item Y.5 sebesar 3,80 masuk dalam kategori setuju yang menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa dirinya membayar PBB dengan lancar tanpa merasa ada kesulitan

Pada item Y.6 yaitu Dengan membayar PBB dengan lancar setiap tahunnya, saya membantu pemerintah daerah dalam pembangunan, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 1,90%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 responden atau 6,33%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 33 responden atau 20,89%, yang menyatakan setuju sebanyak 78 responden atau 49,37%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 34 responden atau 21,52%. Sehingga nilai rata-rata item Y.6 sebesar 3,82 masuk dalam kategori setuju yang menunjukkan sebagian besar responden setuju dengan pernyataan dengan membayar PBB dengan lancar setiap tahunnya, membantu pemerintah daerah dalam pembangunan

selanjutnya item Y.7 yaitu Saya membayar PBB dengan lancar, karena saya tahu itu merupakan kewajiban warga Negara, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 14 responden atau 8,86%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 18 responden atau 11,39%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 44 responden atau 27,85%, yang menyatakan setuju sebanyak 53 responden atau 33,54%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29

responden atau 18,35%. Sehingga nilai rata-rata item Y.7 sebesar 3,41 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan sebagian besar responden masih ragu-ragu dengan pernyataan Saya membayar PBB dengan lancar, karena saya tahu itu merupakan kewajiban warga Negara

Untuk item Y.8 yaitu Saya selalu membayar PBB sehingga tidak pernah mendapat sanksi denda dari petugas pajak, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 responden atau 6,96%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20 responden atau 12,66%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 42 responden atau 26,58%, yang menyatakan setuju sebanyak 56 responden atau 35,44%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 responden atau 18,35%. Sehingga nilai rata-rata item Y.8 sebesar 3,46 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan sebagian besar responden masih ragu-ragu dengan pernyataan Saya selalu membayar PBB sehingga tidak pernah mendapat sanksi denda dari petugas pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Indikator Ketepatan Waktu yang terdiri dari item nomor Y.9, Y.10, Y.11 dan Y.12. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa mean indikator ketepatan waktu adalah sebesar 3,47 yang berada dalam kategori ragu-ragu atau sedang. Artinya kepatuhan membayar pajak pada indikator ketepatan waktu dalam kategori sedang. Perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut :

Pada item Y.9 yaitu Saya selalu membayar pajak bumi dan bangunan sebelum batas waktu pembayaran/jatuh tempo, yang menyatakan sangat

tidak setuju sebanyak 18 responden atau 11,39%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 responden atau 8,23%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 41 responden atau 25,95%, yang menyatakan setuju sebanyak 49 responden atau 31,01%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 37 responden atau 23,42%. Sehingga nilai rata-rata item Y.9 sebesar 3,47 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan sebagian besar responden masih ragu-ragu dengan pernyataan Saya selalu membayar pajak bumi dan bangunan sebelum batas waktu pembayaran/jatuh tempo

Selanjutnya item Y.10 yaitu Saya merasa bangga jika membayar PBB tepat waktu, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 15 responden atau 9,49%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 27 responden atau 17,09%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 38 responden atau 24,05%, yang menyatakan setuju sebanyak 49 responden atau 31,01%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29 responden atau 18,35%. Sehingga nilai rata-rata item Y.10 sebesar 3,32 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan sebagian besar responden masih ragu-ragu merasa bangga jika membayar PBB tepat waktu.

Untuk item Y.11 yaitu Saya akan membayar PBB secepatnya setelah menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 9 responden atau 5,70%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17 responden atau 10,76%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 33 responden atau 20,89%, yang menyatakan setuju sebanyak 71 responden atau 44,94%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28

responden atau 17,72%. Sehingga nilai rata-rata item Y.11 sebesar 3,58 masuk dalam kategori setuju yang menunjukkan sebagian besar responden setuju bahwa akan membayar PBB secepatnya setelah menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).

Pada item Y.12 yaitu Saya merasa bersalah apabila membayar PBB tidak sesuai waktunya, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 19 responden atau 12,03%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 responden atau 7,59%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 30 responden atau 18,99%, yang menyatakan setuju sebanyak 66 responden atau 41,77%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31 responden atau 19,62%. Sehingga nilai rata-rata item Y.12 sebesar 3,49 masuk dalam kategori ragu-ragu yang menunjukkan sebagian besar responden masih ragu-ragu dengan pernyataan Saya merasa bersalah apabila membayar PBB tidak sesuai waktunya

Variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada Indikator Ketaatan yang terdiri dari item nomor Y.13, Y.14, Y.15 dan Y.16. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa mean indikator ketaatan adalah sebesar 3,68 yang berada dalam kategori setuju atau tinggi. Artinya ketaatan membayar pajak pada indikator kelancaran dalam kategori tinggi. Perincian masing-masing item pada indikator ini adalah sebagai berikut :

Selanjutnya item Y.13 yaitu Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar karena taat membayar pajak, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 6 responden atau 3,80%, yang

menyatakan tidak setuju sebanyak 18 responden atau 11,39%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 39 responden atau 24,68%, yang menyatakan setuju sebanyak 63 responden atau 39,87%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 32 responden atau 20,25%. Sehingga nilai rata-rata item Y.13 sebesar 3,61 masuk dalam kategori Setuju yang menunjukkan sebagian besar responden masih setuju sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar karena taat membayar pajak

Untuk item Y.14 yaitu Saya akan berusaha mentaati segala peraturan perundang-undangan perpajakan terutama dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai waktu yang ditetapkan yaitu enam bulan terhitung sejak saat diterima SPPT, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 1,90%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17 responden atau 10,76%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 36 responden atau 22,78%, yang menyatakan setuju sebanyak 79 responden atau 50,00%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23 responden atau 14,56%. Sehingga nilai rata-rata item Y.14 sebesar 3,65 masuk dalam kategori setuju yang menunjukkan sebagian besar responden setuju akan berusaha mentaati segala peraturan perundang-undangan perpajakan terutama dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai waktu yang ditetapkan yaitu enam bulan terhitung sejak saat diterima SPPT.

Pada item Y.15 yaitu Dengan membayar pajak bumi dan bangunan berarti saya telah menjadi warga Negara yang baik dan taat pajak, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 1,90%, yang

menyatakan tidak setuju sebanyak 13 responden atau 8,23%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 32 responden atau 20,25%, yang menyatakan setuju sebanyak 59 responden atau 37,34%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 51 responden atau 32,28%. Sehingga nilai rata-rata item Y.15 sebesar 3,90 masuk dalam kategori setuju yang menunjukkan sebagian besar responden setuju dengan pernyataan bahwa dengan membayar pajak bumi dan bangunan berarti telah menjadi warga Negara yang baik dan taat pajak

Selanjutnya item Y.16 yaitu Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk selalu taat dalam melakukan pembayaran pajak, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 6 responden atau 3,80%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17 responden atau 10,76%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 42 responden atau 26,58%, yang menyatakan setuju sebanyak 67 responden atau 42,41%, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26 responden atau 16,46%. Sehingga nilai rata-rata item Y.16 sebesar 3,57 masuk dalam kategori setuju yang menunjukkan sebagian besar responden setuju dengan pernyataan sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu responden untuk selalu taat dalam melakukan pembayaran pajak.

Secara keseluruhan rata-rata dari variabel Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Y) adalah 3,55 termasuk dalam kategori setuju, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden Wajib Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lamongan memiliki kepatuhan wajib

pajak dalam membayar PBB dalam kategori Tinggi

2. Analisis Data Inferensial

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linear berganda. Pengujian uji asumsi klasik ini menggunakan alat bantu SPSS versi 23.00, dengan hasil sebagai berikut :

1) Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang sempurna antar variabel bebas dalam model regresi. Gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Varian Inflation Factor (VIF)*. Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10 % maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel Bebas	Nilai Tolerance	Nilai VIF (%)
1	Tingkat Ekonomi (X1)	0,295	3,385
2	Pengetahuan pajak (X2)	0,295	3,385

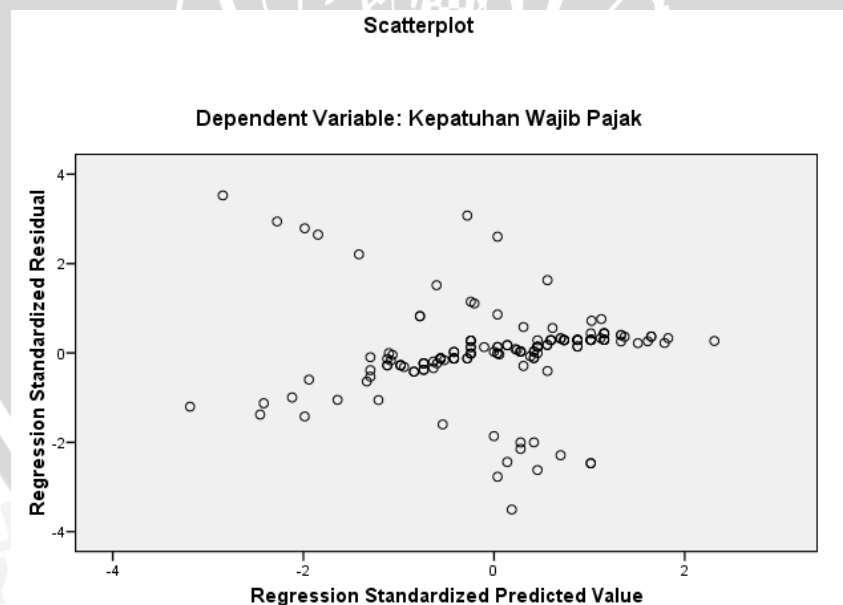
Sumber: Lampiran output SPSS (2016)

Dari data di atas bahwa hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen (Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Perpajakan) yang memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*

juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu titik-titik pada *Scatterplot* menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0 serta tidak membentuk pola tertentu.



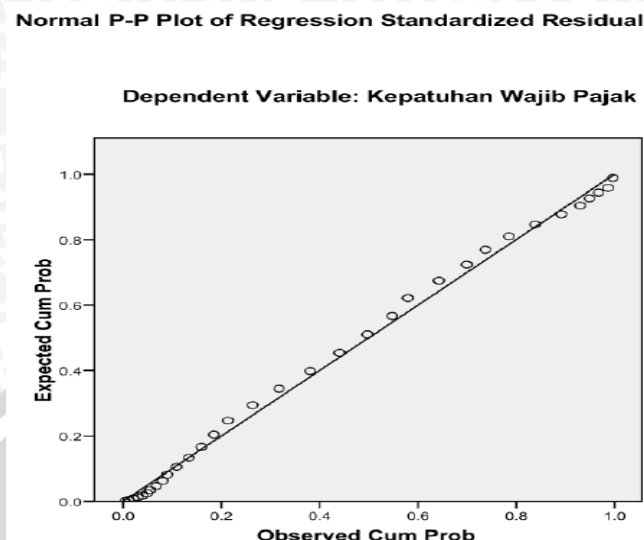
Gambar 4.2. Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Sumber: Lampiran output SPSS (2016)

Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan masukan variabel independen Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Perpajakan.

3) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan titik-titik pada *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.3. Hasil Pengujian Normalitas
Sumber: Lampiran output SPSS (2016)

Dengan melihat tampilan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan grafik normal plot, pengujian normalitas didukung dengan analisis statistik menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Uji K-S ini dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal.

Berikut ini adalah hasil dari uji statistik non-parametrik K-S:

Tabel 4.10. Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogrov-Smirnov untuk Uji Normalitas:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		158
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,84113095
Most Extreme Differences	Absolute	,216
	Positive	,216
	Negative	-,197
Kolmogorov-Smirnov Z		,927
Asymp. Sig. (2-tailed)		,357

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran output SPSS (2016)

Besarnya nilai Kolmogrov-Smirnov adalah 0,927 dan signifikan pada $0,357 > \alpha$ (nilai α adalah 5%). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 : Data residual berdistribusi normal diterima.

b. Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari gejala multikolinieritas dan terbebas dari heterokedastisitas. Dari analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS 23 diperoleh hasil seperti Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Hasil Estimasi Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,810	3,281		5,429	,000
	Tingkat Ekonomi	,723	,144	,518	5,034	,000
	Pengetahuan Pajak	,265	,120	,227	2,204	,029

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Lampiran output SPSS (2016)

Pada penelitian ini *unstandardized coefficients*, yaitu atau koefisien beta dengan menggunakan data asli tanpa dilakukan standarisasi digunakan untuk persamaan garis regresi. Adapun maksud dari *standardized coefficients* penggunaan nilai koefisien beta setelah dilakukan standarisasi variabel, penggunaan *standardized coefficients* untuk melihat faktor yang paling dominan kaitannya dengan variabel tergantung. Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 17,810 + 0,723 X_1 + 0,265 X_2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X₁ = Pengetahuan pajak

X₂ = Pengetahuan pajak

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Variabel Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan pajak mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.
- Koefisien Pengetahuan pajak memberikan nilai sebesar 0,723 yang berarti bahwa jika Pengetahuan pajak semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka Kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,723.
- Koefisien Pengetahuan pajak memberikan nilai sebesar 0,265 yang berarti

bahwa jika Pengetahuan pajak semakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap maka Kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,265.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji F (Pengujian hipotesis secara simultan)

Untuk menguji korelasi variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.12. Hasil analisis regresi secara simultan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7837,270	2	3918,635	82,663	,000 ^a
	Residual	7347,768	155	47,405		
	Total	15185,038	157			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi

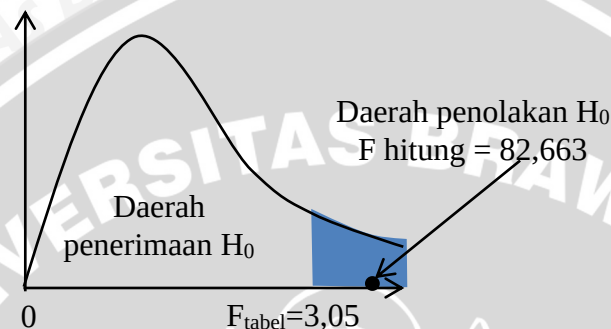
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Lampiran output SPSS (2016)

Pengujian korelasi variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Dari Tabel 4.12 tersebut di atas hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai $F_{hitung} = 82,663$ (taraf signifikansi 0,00). Karena $F_{hitung} 82,663 >$ dari $F_{tabel} 3,05$. dan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hasil penelitian ini menerima H_1 . Jadi Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Pajak secara simultan merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Lamongan.

Hasil F_{hitung} pengaruh secara simultan antara Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.4. Daerah Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji F pada Perhitungan Secara Simultan antara Tingkat ekonomi dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Sumber: data Primer diolah (2016)

2. Uji t (Uji Hipotesis Secara Parsial)

Hipotesis dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan menggunakan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi (p -value), jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan di bawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.13. Hasil Uji t Secara Parsial

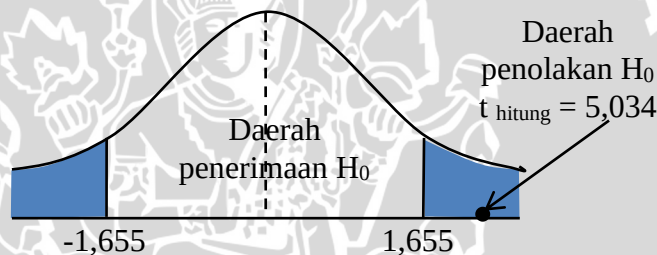
No	Variabel Bebas	T Hitung	Sig. t
1	Tingkat Ekonomi (X_1)	5,034	0.000
2	Pengetahuan pajak (X_2)	2,204	0.029

Sumber: Lampiran output SPSS (2016)

a. Uji t antara Tingkat Ekonomi dengan Kepatuhan wajib pajak

Dari Tabel 4.13 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis Tingkat Ekonomi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,034 dengan taraf signifikansi 0,000. Karena t_{hitung} 5,034 > dari t_{tabel} 1,655 dan taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis nihil (H_0) ditolak. Jadi Tingkat Ekonomi merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lamongan.

Hasil t_{hitung} korelasi Tingkat Ekonomi dengan Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5. Daerah Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji t pada Variabel Tingkat Ekonomi dengan Kepatuhan wajib pajak

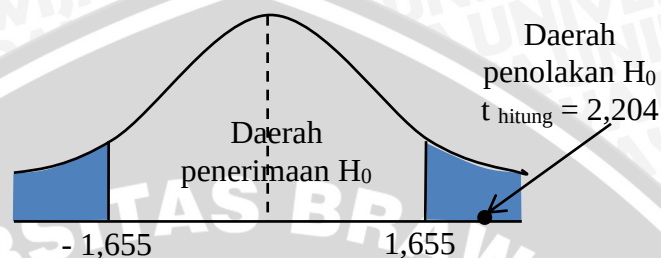
Sumber: data Primer diolah (2016)

b. Uji t antara Pengetahuan pajak dengan Kepatuhan wajib pajak

Dari Tabel 4.13 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis Pengetahuan pajak menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,204 (taraf signifikansi 0,029). Karena t_{hitung} 2,204 > dari t_{tabel} 1,655 dan taraf signifikansi hasil sebesar 0,029 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hasil penelitian ini menolak H_0 . Jadi Pengetahuan pajak secara parsial merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan di Kabupaten Lamongan.

Hasil t_{hitung} korelasi pengetahuan pajak dengan Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.6. Daerah Daerah Penolakan dan Penerimaan H_0 dengan Uji t pada Variabel Pengetahuan pajak dengan Kepatuhan wajib pajak

Sumber: data Primer diolah (2016)

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *adjusted R square* sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.14:

Tabel 4.14. Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,718 ^a	,516	,510	6,885	2,021

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data Primer diolah (2016)

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,510. Hal ini berarti variabel Tingkat

Ekonomi dan Pengetahuan pajak mempunyai korelasi dengan variabel Kepatuhan wajib pajak sebesar 51,0%, sedangkan sisanya sebesar 49,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

4. Faktor yang paling dominan

Untuk variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak maka diuji dengan menggunakan *Standardized Coefficients Beta* tertinggi. Hasil uji terlihat seperti pada Tabel 4.15.

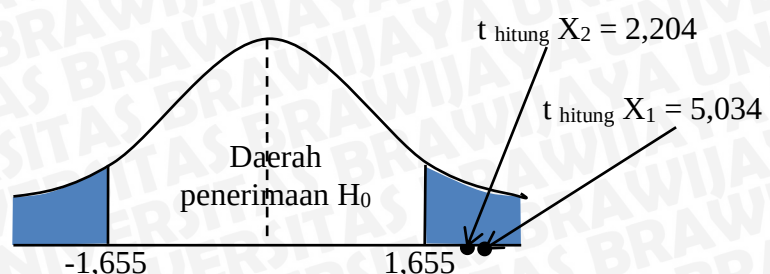
Tabel 4.15. *Standardized Coefficients Beta* Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan pajak

No	Variabel Bebas	Koefisien Beta	Rangking
1	Tingkat Ekonomi (X1)	0,518	I
2	Pengetahuan pajak (X ₂)	0,227	II

Sumber: data Primer diolah (2016)

Dengan melihat hasil *standardized coefficient beta* dari masing-masing variabel bebas tersebut dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan adalah Tingkat Ekonomi (X1) dengan ditunjukkan oleh koefisien beta tertinggi yakni sebesar 0,518.

Jika dilihat dari Hasil *t* _{hitung} sumbangan pengetahuan pajak juga merupakan yang paling tinggi yaitu 5,034. Urutan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.6. Lokasi t_{Hitung} Masing-masing Variabel Bebas pada Daerah Penolakan H_0

Sumber: data Primer diolah (2016)

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan kedua variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin tinggi Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan pajak maka mengakibatkan semakin tinggi pula Kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan secara simultan pada variabel tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak di Kabupaten Lamongan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh positif dan sangat signifikan antara Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan. Artinya bahwa kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijadikan sebagai prediktor untuk meramalkan munculnya Kepatuhan wajib pajak. Adapun berdasarkan garis regresi diketahui bahwa seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Untuk melihat sumbangan atau pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel tergantung maka dilihat besaran koefisien determinansi. Koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,510. Artinya bahwa variabel Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh atau sumbangan terhadap Kepatuhan wajib pajak sebesar 51,0%. Berdasarkan hasil penelitian ini juga diketahui bahwa masih terdapat 49,0% pengaruh dari variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa lebih dari setengahnya variabel Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kedua variabel bebas tersebut. Sehingga jelas bahwa kedua variabel bebas tersebut secara bersama-sama memiliki andil yang cukup kuat terhadap perkembangan Kepatuhan wajib pajak

Dari hasil model persamaan regresi berganda pada Tabel 4.13 dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 17,810, artinya jika tidak ada perubahan Tingkat Ekonomi (X_1), Pengetahuan pajak (X_2), maka Kepatuhan wajib pajak (Y) pada Kabupaten Lamongan adalah naik sebesar 17,810 satuan.

Koefisien regresi Tingkat Ekonomi (X_1), sebesar 0,723 berpengaruh positif berarti bahwa setiap kenaikan Tingkat Ekonomi (X_1) sebesar 1 satuan akan menaikkan Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,723 satuan. Koefisien regresi Pengetahuan pajak (X_2) sebesar 0,265 berpengaruh positif bahwa setiap penambahan Pengetahuan pajak (X_2) sebesar 1 satuan maka akan menambah Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,265 satuan. Koefisien regresi sebesar 17,810 berpengaruh positif yang berarti bahwa setiap penambahan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 17,810 satuan.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan adalah Tingkat Ekonomi (X1) dengan ditunjukkan oleh koefisien beta tertinggi yakni sebesar 0,723.

2. Pengaruh Tingkat ekonomi terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian membuktikan bahwa Tingkat ekonomi berkorelasi atau berhubungan positif dengan Kepatuhan wajib pajak, artinya bahwa ada pengaruh antara variabel Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan persamaan garis regresi pada Tabel 4.13 diketahui bahwa koefisien Pengetahuan pajak memberikan nilai sebesar 0,723 yang berarti bahwa setiap penambahan Tingkat Ekonomi (X1) sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,723 satuan.

Jadi apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak maka berperilaku patuh membayar PBB juga akan semakin tinggi.

3. Pengaruh Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jika variabel Pengetahuan pajak ditingkatkan maka akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan wajib pajak, demikian juga sebaliknya jika Pengetahuan pajak pegawai diturunkan atau dikurangi maka dapat berdampak pada penurunan Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan persamaan garis

regresi pada Tabel 4.13 diketahui bahwa koefisien Pengetahuan pajak memberikan nilai sebesar 0,265 yang berarti bahwa setiap penambahan Pengetahuan pajak (X_2) sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,265 satuan.

Jadi jika wajib pajak mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan pajak dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat desa dan kota di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Ekonomi dan Pengetahuan Pajak secara simultan merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif dengan nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ($82,663 > 3,05$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$).
2. Tingkat Ekonomi merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,723 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($5,034 > 1,655$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$).
3. Pengetahuan pajak secara parsial merupakan determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di

kabupaten Lamongan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,265 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($2,204 > 1,655$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,026 < 0,050$).

4. Tingkat ekonomi merupakan determinan paling dominan dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Lamongan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dirasa masih kurang sosialisasi karena sebagian besar masyarakat masih belum paham akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, oleh karena itu, disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ataupun perangkat desa untuk menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat seperti dengan memberikan brosur terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan serta memasang Pamflet di kantor saat masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dilakukan dengan pembagian hadiah secara diundi bagi para wajib pajak yang membayar Pajak bumi dan Bangunan sebelum masa berakhir. Pengundian di lakukan di kantor desa atau kelurahan.

Dengan rangsangan insentif tersebut diharapkan wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu sehingga realisasi pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat terrealisasi 100%.

3. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Tingkat pendidikan dan Pengetahuan Perpajakan sebesar 51,0%, sedangkan sisanya sebesar 49,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alviansyah, Tri, 2011. *Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi Universitas Brawijaya.

Amin dan Irwansyah, Bobby. 2006. *Hubungan Tingkat Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 Kota Medan Di Lingkungan VI Kelurahan Pusat Pasar Medan Kecamatan Medan Kota*. Jurnal Wawasan, Juni 2006, Volume 12, Nomor 1, hal. 22-39.

Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta

Azwar, Saifuddin. 2014. *Reliabilitas dan Validitas (Edisi IV)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Edgeworth, F. Y. 1897. *The Pure Theory of Taxation*. The Economic Journal, Vol. 7, No. 25. (Mar., 1897), pp. 46-70.

Engida, Tadesse Getacher & Baisal, Goitom Abera. 2014. *Factors Influencing taxpayers' compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia*. eJournal of Tax Research, Nopember 2014. Volume 12 Number 2, 433-452

Haryuda, Agil Anggara. 2013. *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukoharjo)*. Naskah Publikasi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ilyas, B. Wirawan dan Richard Burton. 2004, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Istanto, Feri. 2010. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Skripsi UIN, Jakarta.

Judisseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak Dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama

Juliandi, Azuar, Irfan, dan Saprinal Manurung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*. Medan:Umsu Press

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mohd Rizal Palil. 2013. *The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity* ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1 (1): 118-129 (June 2013)

Mukhlis, Imam, Sugeng Hadi Utomo & Yuli Soesetio. 2015. *The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia*. International Journal of Financial Research, Vol. 6, No. 4; 2015, 161-169.

Notoatmodjo, S. 2007. *Pendidikan dan Perilaku kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nurmantu, Sapri. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Nurmantu. Safri. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta. Penerbit: Granit

Oladipupo, Adesina Olugoke & Obazee, Uyioghosa. 2015. *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. iBusiness, 2016, 8, 1-9.

Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media.

Purwanto, Wahyu, Fadjar Harimurti, Dewi Saptantinah Puji Astuti. 2015. *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 11 Edisi Khusus 294 Desember 2015: 293 – 303

Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.

Pusat Bahasa. 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Putri, Carola Ditta Surya dan Jaka Isgiyarta. 2013. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa Dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)*. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1-11

- Riduwan, 2007. *“Pengantar Statistika Untuk Penelitian : Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis”*. Salemba Empat, Jakarta
- Rosyidi, Suherman. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saad, Natrah. 2014. *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109 (2014) 1069 – 1075
- Santoso, Singgih dan Tjiptono, Fandy. 2002. *Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian bisnis*. Bandung: alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Penerbit Kencana.
- Sunaryo. 2014. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jogjakarta: CV Andi Offset.
- Surbakti, Ramlan. 2003. *Memahami Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Lampiran 1 :

**KUESIONER DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016**

Nomor Kuesioner :.....(diisi oleh peneliti)

Nama responden :.....(boleh inisial/boleh tidak diisi)

Bapak/Ibu yang Terhormat,

Pada hari ini saya Rhino Hari Wicaksono Ristianto mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Perpajakan, Universitas Brawijaya Malang, sedang melakukan penelitian dengan judul ”Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di kabupaten Lamongan”. Bapak/Ibu merupakan perwakilan dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lamongan yang dipilih tanpa ada unsur kesengajaan untuk dapat memberikan informasi sehubungan dengan penelitian ini. Jawaban Bapak/Ibu akan kami jamin kerahasiaannya dan dipakai hanya untuk kepentingan akademis. Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih atas kesediaannya Bapak/Ibu untuk mengisi Kuesioner ini

Lamongan, Agustus 2016

Peneliti

A. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk Pengisian : berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu untuk pernyataan dibawah ini

1. Jenis Kelamin

a. Laki-Laki

b. Perempuan

2. Usia

a. 20-25 tahun

c. 35-55 tahun

b. 25-35 tahun

d. diatas 55 tahun

3. Pendidikan Terakhir

a. Tidak sekolah

d. SMA

b. Tamat SD

e. D3

c. SMP

f. S1/S2

4. Pekerjaan

a. Pegawai Negeri

c. Wiraswasta

b. Pegawai Swasta

d. Lain-Lain

5. Jumlah Anggota Keluarga

a. 2

d. 5

b. 3

e. 6

c. 4

f. lebih dari 6

- B. Isilah dengan memberi tanda silang pada kolom jawaban yang disediakan dengan pilihan sebagai berikut :

SS jika saudara Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada

S jika saudara Setuju dengan pernyataan yang ada

R jika saudara Ragu-ragu dengan pernyataan yang ada

TS jika saudara Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada

STS jika saudara Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Tingkat penghasilan yang saya miliki selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan saya					
2	Saya merasa bahwa penghasilan tambahan dari anggota keluarga yang lain dapat membantu keluarga saya secara ekonomi					
3	Total penghasilan keluarga selalu tercukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga					
4	Banyaknya jumlah anggota keluarga kami sesuai dengan tingkat perekonomian keluarga					
5	Saya rasa Besarnya anggota keluarga tidak menjadi beban bagi kepala keluarga					
6	Bangunan tempat tinggal kami adalah bangunan permanen yang sangat layak untuk dihuni					
7	Luas bangunan kami sangat ideal sebagai hunian					
8	Ruangan kamar yang ada saya rasa sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal.					
9	Saya memiliki kendaraan yang sangat layak untuk kebutuhan transportasi.					
10	Perabotan rumah tangga yang kami miliki sangat layak bagi kami.					
11	Kami selalu memiliki simpanan diluar penghasilan					

B. Isilah dengan memberi tanda silang pada kolom jawaban yang disediakan dengan pilihan sebagai berikut :

SS jika saudara Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada

S jika saudara Setuju dengan pernyataan yang ada

R jika saudara Ragu-ragu dengan pernyataan yang ada

TS jika saudara Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada

STS jika saudara Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada

Catatan PBB merupakan singkatan dari Pajak Bumi dan bangunan

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Menurut saya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan yang meliputi keadaan tanah dan bangunan					
2	Saya merasa bahwa PBB merupakan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah					
3	Besarnya PBB dipengaruhi oleh keadaan objek tanah dan bangunan					
4	Apakah menurut anda PBB disebut pajak objektif?					
5	Untuk menghindari pajak berganda, pengenaan PBB tidak terjadi dua kali atau lebih atas suatu objek yang sama					
6	Wajib pajak dapat melaporkan perubahan data objek pajak.					
7	PBB diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum					
8	Wajib pajak mendapat SPPT PBB-P2 setiap tahun pajak, paling lambat Juni atau satu bulan setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)					
9	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan tepat waktu untuk dikembalikan kepada Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah SPOP diterima.					
10	Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi oleh wajib pajak dengan jelas					
11	Objek pajak untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan					
12	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sepenuhnya ditentukan oleh petugas pajak					
13	Tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen.					
14	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 3 tahun sekali					
15	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan					

	Perkotaan ditetapkan dalam peraturan daerah					
16	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan sesuai dengan perkembangan wilayahnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah					

C. Isilah dengan memberi tanda silang pada kolom jawaban yang disediakan dengan pilihan sebagai berikut :

SS jika saudara Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada

S jika saudara Setuju dengan pernyataan yang ada

TS jika saudara Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada

STS jika saudara Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya berusaha membayar pajak setiap tahun dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari petugas					
2	Saya sadar membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara					
3	Saya merasa bahwa kesadaran terhadap kebijakan pajak (sanksi dan peraturan) merupakan kewajiban saya sebagai wajib pajak PBB					
4	Saya merasa bahwa dengan membayar PBB akan membantu pembangunan daerah					
5	Saya membayar PBB dengan lancar tanpa merasa ada kesulitan					
6	Dengan membayar PBB dengan lancar setiap tahunnya, saya membantu pemerintah daerah dalam pembangunan					
7	Saya membayar PBB dengan lancar, karena saya tahu itu merupakan kewajiban warga Negara.					
8	Saya selalu membayar PBB sehingga tidak pernah mendapat sanksi denda dari petugas pajak					
9	Saya selalu membayar pajak bumi dan bangunan sebelum batas waktu pembayaran/jatuh tempo.					
10	Saya merasa bangga jika membayar PBB tepat waktu					
11	Saya akan membayar PBB secepatnya setelah menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)					
12	Saya merasa bersalah apabila membayar PBB tidak sesuai waktunya.					
13	Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar karena taat membayar pajak.					
14	Saya akan berusaha mentaati segala peraturan perundang-undangan perpajakan terutama dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai waktu					

	yang ditetapkan yaitu enam bulan terhitung sejak saat diterima SPPT					
15	Dengan membayar pajak bumi dan bangunan berarti saya telah menjadi warga Negara yang baik dan taat pajak.					
16	Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk selalu taat dalam melakukan pembayaran pajak.					

TERIMA KASIH ATAS SEGALA KERJASAMANYA





Lampiran 2 Data Responden

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	x1.11
1	5	4	3	4	4	3	4	4	3	5	3
2	3	3	4	3	2	1	2	2	3	3	2
3	2	3	3	5	3	2	3	1	2	2	1
4	4	3	3	3	3	1	3	3	3	4	3
5	5	2	2	5	4	3	4	3	4	5	2
6	4	3	3	5	3	4	3	1	3	4	3
7	3	1	1	1	4	3	4	1	3	3	1
8	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
9	3	3	2	5	4	3	4	3	3	3	3
10	3	3	5	5	3	2	3	5	3	3	5
11	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3
12	4	4	3	3	2	2	2	3	1	4	4
13	3	1	3	1	3	3	3	2	2	3	3
14	4	4	3	3	2	3	2	4	2	4	3
15	4	3	3	1	3	1	3	4	3	4	1
16	3	4	2	2	2	3	2	4	3	3	4
17	3	3	3	2	4	1	4	4	3	3	4
18	3	3	1	1	1	2	1	3	2	3	4
19	4	1	4	2	4	3	4	3	4	4	4
20	4	4	1	3	2	2	2	4	3	4	3
21	5	4	2	4	4	2	4	4	4	5	5
22	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3
23	4	3	4	2	3	2	3	3	4	4	5
24	4	3	4	2	3	2	3	4	4	4	5
25	5	5	5	2	4	2	2	4	3	5	4
26	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2
27	3	3	4	2	3	3	3	3	2	3	2

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	x1.11
28	2	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2
29	4	4	3	2	3	2	3	3	4	4	4
30	4	4	3	3	4	3	2	4	2	4	3
31	4	4	5	3	3	5	3	4	4	4	3
32	4	2	3	2	3	2	3	3	3	4	5
33	4	5	3	2	4	3	4	4	4	4	4
34	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2
35	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3
36	5	4	2	5	4	3	4	4	5	5	5
37	3	3	3	2	4	1	4	4	4	3	2
38	5	4	2	4	4	2	4	4	4	5	5
39	4	4	4	5	4	2	4	4	5	4	4
40	3	2	3	4	3	3	3	4	2	3	1
41	4	5	2	4	4	3	5	3	3	2	4
42	2	2	3	2	3	3	4	3	2	3	1
43	3	2	1	1	2	2	4	1	2	1	5
44	1	3	3	2	5	4	5	3	3	3	1
45	2	1	2	2	4	5	5	2	3	2	3
46	4	4	2	4	5	3	5	4	3	2	4
47	3	3	1	3	1	3	1	1	2	1	1
48	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1
49	4	3	3	3	3	3	5	2	3	3	4
50	2	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5
51	3	3	1	3	3	2	4	3	1	1	3
52	4	4	1	3	1	3	4	3	3	1	2
53	3	4	2	3	2	3	4	3	5	2	5
54	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	x1.11
55	4	4	1	2	3	1	5	1	3	1	1
56	3	3	2	3	3	2	5	2	3	2	4
57	3	2	2	5	4	2	4	3	3	2	3
58	3	3	5	2	2	2	2	3	4	5	4
59	4	2	3	4	4	4	5	3	4	3	3
60	3	3	3	2	3	3	5	2	4	3	2
61	4	4	1	3	4	1	4	4	3	1	3
62	3	3	1	3	3	2	4	4	1	1	3
63	5	4	2	4	4	2	5	3	2	2	3
64	5	4	2	4	4	2	5	3	2	2	3
65	4	4	3	4	3	5	5	3	3	3	2
66	4	4	1	1	3	4	4	3	3	1	3
67	4	4	3	3	2	3	5	2	2	3	3
68	4	4	1	2	2	2	2	2	1	1	1
69	4	4	2	3	4	4	5	3	2	2	3
70	4	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2
71	4	4	3	3	4	2	5	1	3	3	4
72	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	2
73	5	4	2	4	4	3	5	4	4	2	2
74	4	4	2	4	4	3	5	5	2	2	3
75	4	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3
76	4	5	3	4	5	2	5	4	2	1	3
77	3	2	3	5	4	2	4	3	3	2	3
78	4	4	1	3	4	1	4	4	3	1	3
79	3	4	4	3	5	4	5	2	1	2	3
80	2	3	4	2	2	1	5	2	1	4	3
81	4	3	3	5	4	3	5	4	3	4	4

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	x1.11
82	2	2	1	4	4	3	3	3	2	2	1
83	1	2	2	5	2	1	4	2	1	3	5
84	2	2	1	5	4	4	4	5	3	1	1
85	2	1	3	5	5	2	4	4	2	2	3
86	4	3	4	5	4	4	3	5	3	4	4
87	3	3	3	1	1	1	5	1	1	3	1
88	1	4	2	2	4	1	1	1	1	1	1
89	3	2	3	2	4	2	4	3	3	4	4
90	5	3	2	2	4	4	4	3	5	2	5
91	3	3	2	4	2	4	4	3	3	3	3
92	3	2	2	5	4	3	5	1	4	4	2
93	3	3	3	2	1	3	4	2	3	3	5
94	2	3	3	4	2	2	4	2	3	2	2
95	2	1	1	2	4	1	1	3	1	4	1
96	3	4	3	4	3	2	3	3	2	3	4
97	5	1	1	3	3	3	2	4	2	3	3
98	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	4
99	4	2	3	4	4	3	4	4	4	4	3
100	2	3	4	5	3	2	4	3	3	3	2
101	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3
102	3	3	4	4	2	4	4	3	3	3	3
103	4	2	4	4	4	3	3	4	5	5	3
104	4	2	4	4	4	3	3	4	5	5	3
105	4	3	4	2	5	3	5	3	4	4	2
106	1	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3
107	3	4	3	4	3	2	2	2	2	4	3
108	2	1	1	2	1	2	2	2	2	3	1

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	x1.11
109	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3
110	2	3	3	4	2	2	4	2	3	2	2
111	3	3	5	5	3	1	4	4	3	4	4
112	4	2	2	3	3	4	3	3	5	3	2
113	4	3	3	5	5	4	4	4	4	5	2
114	4	3	4	4	4	5	4	4	2	4	3
115	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116	4	2	3	5	5	4	5	5	5	4	3
117	5	1	1	3	3	3	4	4	2	3	3
118	3	4	2	4	4	4	4	4	5	4	3
119	3	3	2	4	5	4	4	5	4	4	4
120	2	3	3	4	4	4	1	2	1	4	4
121	3	3	4	3	5	5	5	4	4	4	4
122	4	4	5	4	4	5	5	3	5	4	5
123	3	3	4	4	4	1	4	4	4	4	2
124	3	3	5	4	5	3	4	3	5	2	5
125	4	4	2	3	5	4	4	3	4	3	4
126	5	5	5	3	5	3	5	4	3	3	3
127	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	2
128	3	3	4	5	4	1	4	2	3	4	1
129	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	4
130	4	4	4	3	5	5	4	5	5	3	5
131	4	3	4	1	4	4	4	4	2	4	4
132	5	5	4	3	4	1	4	4	4	4	1
133	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
134	4	4	5	2	5	5	5	4	2	4	5
135	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	5

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	x1.11
136	4	3	5	4	4	4	5	3	1	3	3
137	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
138	2	3	2	2	2	2	2	2	4	4	5
139	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	5
140	3	3	4	4	3	3	3	5	3	4	3
141	4	4	4	3	5	5	5	4	5	4	4
142	3	3	5	2	4	5	5	3	4	5	5
143	3	3	4	3	4	4	4	5	4	2	4
144	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
145	4	5	4	4	4	5	3	4	5	4	5
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	5
148	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4
149	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
150	3	3	4	1	4	1	4	4	4	4	2
151	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4
152	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4
153	5	5	5	3	5	3	5	4	3	3	3
154	5	5	4	3	4	4	5	5	4	3	4
155	3	4	5	4	5	3	4	3	5	2	5
156	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
157	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	2
158	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4

Frequencies

Statistics

	Penghasilan1	Penghasilan2	Penghasilan3	Anggota Keluarga1	Anggota Keluarga2	Kondisi rumah1	Kondisi rumah2	Kondisi rumah3	Kepemilikan barang1	Kepemilikan barang2	Kepemilikan barang3
N	Valid	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Penghasilan1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	6	3,8	3,8	3,8
Tidak Setuju	18	11,4	11,4	15,2
Ragu-ragu	47	29,7	29,7	44,9
Setuju	69	43,7	43,7	88,6
Sangat Setuju	18	11,4	11,4	100,0
Total	158	100,0	100,0	

Penghasilan2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	11	7,0	7,0	7,0
Tidak Setuju	20	12,7	12,7	19,6
Ragu-ragu	58	36,7	36,7	56,3
Setuju	57	36,1	36,1	92,4
Sangat Setuju	12	7,6	7,6	100,0
Total	158	100,0	100,0	

Penghasilan3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	20	12,7	12,7	12,7
Tidak Setuju	31	19,6	19,6	32,3
Ragu-ragu	49	31,0	31,0	63,3
Setuju	41	25,9	25,9	89,2
Sangat Setuju	17	10,8	10,8	100,0
Total	158	100,0	100,0	

Anggota Keluarga1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	10	6,3	6,3	6,3
	Tidak Setuju	33	20,9	20,9	27,2
	Ragu-ragu	41	25,9	25,9	53,2
	Setuju	50	31,6	31,6	84,8
	Sangat Setuju	24	15,2	15,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Anggota Keluarga2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	8	5,1	5,1	5,1
	Tidak Setuju	20	12,7	12,7	17,7
	Ragu-ragu	41	25,9	25,9	43,7
	Setuju	70	44,3	44,3	88,0
	Sangat Setuju	19	12,0	12,0	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kondisi rumah1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	20	12,7	12,7	12,7
	Tidak Setuju	39	24,7	24,7	37,3
	Ragu-ragu	50	31,6	31,6	69,0
	Setuju	36	22,8	22,8	91,8
	Sangat Setuju	13	8,2	8,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kondisi rumah2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	6	3,8	3,8	3,8
	Tidak Setuju	16	10,1	10,1	13,9
	Ragu-ragu	32	20,3	20,3	34,2
	Setuju	67	42,4	42,4	76,6
	Sangat Setuju	37	23,4	23,4	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kondisi rumah3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	11	7,0	7,0	7,0
	Tidak Setuju	24	15,2	15,2	22,2
	Ragu-ragu	50	31,6	31,6	53,8
	Setuju	61	38,6	38,6	92,4
	Sangat Setuju	12	7,6	7,6	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kepemilikan barang1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	14	8,9	8,9	8,9
	Tidak Setuju	30	19,0	19,0	27,8
	Ragu-ragu	53	33,5	33,5	61,4
	Setuju	41	25,9	25,9	87,3
	Sangat Setuju	20	12,7	12,7	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kepemilikan barang2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	15	9,5	9,5	9,5
	Tidak Setuju	25	15,8	15,8	25,3
	Ragu-ragu	48	30,4	30,4	55,7
	Setuju	58	36,7	36,7	92,4
	Sangat Setuju	12	7,6	7,6	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kepemilikan barang3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	19	12,0	12,0	12,0
	Tidak Setuju	25	15,8	15,8	27,8
	Ragu-ragu	50	31,6	31,6	59,5
	Setuju	40	25,3	25,3	84,8
	Sangat Setuju	24	15,2	15,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	x2.11	x2.12	x2.13	x2.14	x2.15	x2.16
1	3	5	5	5	2	3	5	3	2	4	3	2	5	4	2	3
2	3	1	4	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	1	4	2
3	2	2	3	2	3	4	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
4	4	2	3	2	2	2	4	4	2	2	4	2	3	3	3	4
5	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3
6	4	3	1	4	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3
7	4	4	3	3	5	4	4	3	3	3	5	5	4	4	5	4
8	3	1	2	1	2	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3
9	3	3	1	3	3	5	2	4	3	2	2	3	4	2	5	4
10	2	2	4	5	5	2	3	4	5	2	2	4	4	3	3	3
11	4	4	4	5	3	2	4	4	5	4	4	3	2	4	4	4
12	3	5	3	3	2	2	3	4	1	1	4	2	3	2	3	2
13	3	2	2	3	2	3	3	1	1	4	3	3	2	2	1	4
14	3	3	2	4	4	2	3	4	2	3	3	4	2	4	2	2
15	5	2	2	3	5	4	2	1	3	2	2	2	1	4	1	4
16	3	4	2	3	4	4	2	2	3	1	3	2	1	5	2	2
17	1	1	1	4	1	4	4	5	4	3	3	3	3	3	2	5
18	2	2	3	2	3	4	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
19	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	2	2	2
20	3	2	1	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	4	3	3
21	5	5	1	3	4	4	3	4	2	2	4	4	4	4	4	4
22	4	3	3	4	2	3	2	5	5	5	5	5	4	1	4	5
23	4	3	2	4	4	3	3	4	1	3	4	4	3	3	3	2
24	3	3	1	3	3	5	2	4	3	2	2	4	4	2	5	4
25	5	2	3	5	4	3	1	5	5	2	5	5	2	1	3	3
26	3	2	2	2	4	4	3	5	3	3	3	3	2	3	2	3
27	3	2	2	3	2	2	1	3	4	2	4	2	3	4	3	3

	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	x2.11	x2.12	x2.13	x2.14	x2.15	x2.16
28	3	2	2	1	4	3	2	2	1	1	3	2	2	3	3	3
29	3	3	3	4	2	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3
30	4	4	2	2	5	1	3	2	2	4	4	4	4	5	3	1
31	4	1	3	5	4	3	4	5	3	1	4	4	5	3	3	4
32	4	3	3	2	5	3	2	3	2	3	4	3	3	4	1	3
33	4	3	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	1	3	4
34	4	3	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	1	3	4
35	4	3	2	3	4	3	4	3	1	4	4	3	4	3	4	2
36	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3	2	3
37	4	2	3	2	2	2	4	4	2	2	4	2	3	3	3	4
38	4	4	2	3	4	5	3	3	2	4	4	3	4	4	3	5
39	2	5	2	4	2	3	3	3	4	5	5	3	3	5	5	3
40	3	2	3	3	3	2	4	4	3	2	3	2	2	2	2	3
41	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	1	4	2	4	3	4
42	3	1	4	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	1	4	2
43	4	1	3	5	3	3	4	2	4	1	3	3	3	1	1	3
44	3	1	3	4	2	3	3	4	3	1	3	3	3	3	3	4
45	3	2	1	5	3	3	3	3	1	2	3	3	3	4	1	3
46	3	3	2	3	2	5	4	5	4	2	4	4	3	2	3	4
47	3	1	1	2	4	4	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2
48	1	1	1	1	2	1	1	4	2	1	1	1	1	1	4	1
49	3	2	2	4	4	3	3	4	3	2	4	3	3	3	4	3
50	4	5	4	3	4	4	4	2	2	5	3	5	4	3	2	4
51	2	4	1	3	2	1	2	2	3	4	3	2	4	4	1	1
52	3	3	1	3	3	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3
53	4	5	3	2	4	3	4	2	2	4	2	3	4	3	2	3
54	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	3	3	2	2	2	2

	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	x2.11	x2.12	x2.13	x2.14	x2.15	x2.16
55	3	3	2	4	2	2	2	4	4	3	3	1	4	3	2	2
56	4	3	3	1	5	3	2	2	1	3	3	1	3	4	2	5
57	3	3	2	4	3	4	2	4	2	3	3	3	3	1	3	3
58	1	1	2	1	4	4	1	4	4	2	1	1	2	1	1	1
59	4	2	4	5	4	2	4	5	3	2	4	3	1	3	3	3
60	3	3	2	4	3	4	2	4	2	3	3	3	3	1	3	3
61	3	3	2	3	2	2	3	3	3	5	1	3	4	4	2	2
62	2	1	2	4	2	2	1	5	2	1	2	3	3	5	1	5
63	4	4	1	1	4	3	3	2	1	3	5	3	4	4	5	3
64	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	5	4	4	5	4
65	4	3	2	5	3	3	3	4	4	3	4	2	3	2	4	3
66	3	2	1	5	3	3	3	3	1	2	3	3	3	4	1	3
67	4	3	1	3	4	3	3	3	2	3	4	3	3	4	2	3
68	4	1	1	1	2	3	2	1	1	3	3	4	4	1	4	3
69	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	2	2	2
70	3	3	5	3	4	3	5	3	4	4	3	4	5	5	5	3
71	4	2	2	3	3	4	5	5	5	2	4	3	2	3	4	3
72	5	4	2	5	2	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5	4
73	2	3	2	5	4	2	4	4	5	3	2	4	1	3	4	4
74	2	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	2	2	3	4	2
75	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	3	2	2	3
76	3	2	3	5	3	4	3	3	4	2	3	4	2	3	3	4
77	3	2	4	3	3	2	3	4	3	3	3	4	4	2	3	2
78	4	3	2	2	4	2	2	3	3	2	4	2	2	4	4	2
79	4	3	2	4	3	4	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3
80	3	3	3	4	2	3	2	2	1	3	3	3	3	1	3	3
81	5	4	4	2	2	3	4	3	2	3	5	4	4	5	3	3

	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	x2.11	x2.12	x2.13	x2.14	x2.15	x2.16
82	3	5	2	1	2	2	2	4	2	5	2	2	3	1	1	2
83	3	2	2	3	3	3	5	1	1	4	3	3	2	2	1	4
84	2	2	2	1	3	3	2	2	2	4	2	5	2	4	5	4
85	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	1	1	3
86	4	4	3	5	3	3	1	5	4	4	4	5	3	5	3	1
87	1	1	1	2	1	2	2	2	4	1	1	1	2	2	1	4
88	3	3	2	1	1	2	1	1	1	3	2	3	2	1	1	3
89	3	3	3	4	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3
90	2	3	3	2	1	5	5	5	5	5	1	3	4	2	2	4
91	3	2	2	5	4	3	3	4	3	2	3	3	4	2	2	3
92	5	3	1	3	3	3	2	2	4	5	3	2	3	3	3	4
93	3	3	4	2	3	1	3	3	3	3	3	5	1	1	2	5
94	4	1	1	1	4	4	1	5	4	1	4	3	3	1	2	3
95	4	2	2	1	2	1	3	1	3	1	4	3	3	3	3	1
96	5	2	4	2	2	2	5	4	3	2	5	4	3	1	2	2
97	4	3	2	2	2	2	2	3	3	2	4	2	2	4	4	2
98	3	3	1	5	1	1	2	1	3	3	3	3	1	1	3	3
99	4	4	4	3	4	4	3	3	2	2	4	3	4	3	2	4
100	5	2	4	2	2	2	5	4	3	2	5	4	3	1	2	2
101	4	3	2	5	4	3	3	4	4	3	4	5	4	2	5	2
102	4	4	3	2	3	3	3	5	4	5	3	3	4	3	3	3
103	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2	5	3
104	4	3	3	3	3	3	4	5	4	2	2	4	4	3	4	4
105	4	2	2	3	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	2	4
106	2	1	1	3	3	4	3	4	4	3	2	3	2	3	2	3
107	4	3	3	5	1	2	4	3	3	3	4	1	2	2	2	3
108	3	1	3	1	2	2	3	1	1	1	3	1	4	1	3	1

	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	x2.11	x2.12	x2.13	x2.14	x2.15	x2.16
109	4	4	1	4	3	3	3	4	2	4	4	3	3	3	3	3
110	2	1	1	5	5	2	1	2	2	3	3	3	2	4	5	2
111	3	3	3	3	3	5	5	1	3	4	2	4	3	3	3	5
112	3	4	3	2	4	4	2	5	3	2	3	3	2	2	3	3
113	4	3	2	5	4	3	3	4	4	3	4	5	4	2	5	2
114	5	3	2	3	4	4	2	5	4	2	4	4	3	2	4	4
115	4	3	3	2	3	3	3	5	3	2	4	2	3	3	3	2
116	4	3	4	4	5	3	4	3	4	5	3	4	4	3	2	5
117	4	2	2	3	4	4	3	4	4	3	4	1	2	1	3	1
118	5	3	2	3	4	4	2	5	4	2	4	4	3	2	4	4
119	3	2	4	4	3	2	2	3	2	5	3	3	3	3	5	2
120	4	3	2	3	3	1	4	3	2	4	3	4	4	3	2	1
121	4	5	4	3	4	4	4	2	2	5	3	5	4	3	2	4
122	5	3	4	4	5	3	4	3	3	5	4	4	5	5	3	4
123	3	2	2	4	3	4	3	4	3	2	4	3	3	3	4	3
124	5	3	3	5	4	2	2	2	5	3	5	3	5	2	4	3
125	3	2	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3
126	4	3	3	4	4	4	3	5	4	3	3	4	3	3	4	4
127	5	2	3	2	4	4	5	2	3	4	4	2	3	4	2	4
128	4	3	2	3	4	3	3	3	2	3	4	3	3	4	2	3
129	4	4	3	3	3	3	4	2	2	3	4	1	3	4	3	3
130	4	4	4	4	4	4	3	5	4	5	4	3	3	2	4	5
131	2	3	3	5	3	2	5	4	4	3	2	4	2	4	2	3
132	4	2	2	3	4	4	4	3	4	3	4	4	2	4	2	4
133	4	5	2	5	2	2	4	4	4	5	4	3	3	4	2	4
134	5	5	4	3	4	4	3	4	2	2	4	4	4	4	4	4
135	4	4	4	5	2	2	3	5	5	4	4	3	3	2	4	4

	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	x2.11	x2.12	x2.13	x2.14	x2.15	x2.16
136	5	2	3	2	4	4	5	2	3	4	4	2	3	4	2	4
137	4	4	3	3	3	5	3	5	4	4	5	3	4	2	4	4
138	3	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	3	3	5	3	1
139	4	2	1	5	4	2	3	4	5	2	4	4	3	5	4	4
140	3	3	2	5	3	4	2	4	5	3	3	2	3	4	2	3
141	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	2	2	4	5	5
142	4	4	4	5	2	2	3	5	5	4	4	3	3	2	4	4
143	5	2	3	5	3	4	3	5	5	2	5	2	2	5	2	1
144	3	5	3	5	2	4	3	2	4	5	3	4	1	5	3	5
145	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	2	2	4	5	5
146	5	2	3	4	4	5	3	5	5	2	4	4	2	2	4	4
147	4	3	2	5	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	2
148	5	3	3	5	3	4	4	5	4	3	3	5	3	4	3	4
149	4	3	3	5	4	2	3	5	4	3	4	3	2	4	4	3
150	4	3	4	5	2	4	3	4	4	3	4	3	4	2	4	3
151	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	5	4	2
152	4	4	5	1	4	4	2	5	3	3	4	4	3	3	3	4
153	4	3	4	5	4	4	3	5	4	4	2	4	2	2	4	4
154	4	3	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	4	4	3	4
155	5	3	4	4	4	4	3	3	1	3	5	4	4	5	4	1
156	5	5	4	3	5	5	4	2	3	4	4	4	5	5	4	5
157	4	3	3	5	3	3	3	5	4	4	3	3	3	3	3	1
158	4	5	2	5	2	2	4	4	4	5	4	3	3	4	2	4

Frequencies

Statistics															
	Pengetahuan1	Pengetahuan2	Pengetahuan3	Pengetahuan4	Azaz hak kewajiban1	Azaz hak kewajiban2	Azaz hak kewajiban3	Azaz hak kewajiban4	SPOP dan NJOP1	SPOP dan NJOP2	SPOP dan NJOP3	SPOP dan NJOP4	Dasar Pengenaan1	Dasar Pengenaan2	Dasar Pengenaan3
N	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158	Valid 158
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Pengetahuan1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	2,5	2,5	2,5
	Tidak Setuju	15	9,5	9,5	12,0
	Ragu-ragu	51	32,3	32,3	44,3
	Setuju	65	41,1	41,1	85,4
	Sangat Setuju	23	14,6	14,6	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Pengetahuan2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	18	11,4	11,4	11,4
	Tidak Setuju	39	24,7	24,7	36,1
	Ragu-ragu	62	39,2	39,2	75,3
	Setuju	26	16,5	16,5	91,8
	Sangat Setuju	13	8,2	8,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Pengetahuan3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	26	16,5	16,5	16,5
	Tidak Setuju	50	31,6	31,6	48,1
	Ragu-ragu	50	31,6	31,6	79,7
	Setuju	29	18,4	18,4	98,1
	Sangat Setuju	3	1,9	1,9	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Pengetahuan4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	16	10,1	10,1	10,1
	Tidak Setuju	24	15,2	15,2	25,3
	Ragu-ragu	46	29,1	29,1	54,4
	Setuju	35	22,2	22,2	76,6
	Sangat Setuju	37	23,4	23,4	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Azaz hak kewajiban1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	8	5,1	5,1	5,1
	Tidak Setuju	36	22,8	22,8	27,8
	Ragu-ragu	46	29,1	29,1	57,0
	Setuju	57	36,1	36,1	93,0
	Sangat Setuju	11	7,0	7,0	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Azaz hak kewajiban2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	8	5,1	5,1	5,1
	Tidak Setuju	37	23,4	23,4	28,5
	Ragu-ragu	50	31,6	31,6	60,1
	Setuju	54	34,2	34,2	94,3
	Sangat Setuju	9	5,7	5,7	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Azaz hak kewajiban3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	14	8,9	8,9	8,9
	Tidak Setuju	33	20,9	20,9	29,7
	Ragu-ragu	60	38,0	38,0	67,7
	Setuju	40	25,3	25,3	93,0
	Sangat Setuju	11	7,0	7,0	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Azaz hak kewajiban4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	11	7,0	7,0	7,0
	Tidak Setuju	27	17,1	17,1	24,1
	Ragu-ragu	41	25,9	25,9	50,0
	Setuju	48	30,4	30,4	80,4
	Sangat Setuju	31	19,6	19,6	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

SPOP dan NJOP1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	19	12,0	12,0	12,0
	Tidak Setuju	30	19,0	19,0	31,0
	Ragu-ragu	50	31,6	31,6	62,7
	Setuju	43	27,2	27,2	89,9
	Sangat Setuju	16	10,1	10,1	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

SPOP dan NJOP2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	14	8,9	8,9	8,9
	Tidak Setuju	38	24,1	24,1	32,9
	Ragu-ragu	55	34,8	34,8	67,7
	Setuju	35	22,2	22,2	89,9
	Sangat Setuju	16	10,1	10,1	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

SPOP dan NJOP3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	7	4,4	4,4	4,4
	Tidak Setuju	21	13,3	13,3	17,7
	Ragu-ragu	54	34,2	34,2	51,9
	Setuju	60	38,0	38,0	89,9
	Sangat Setuju	16	10,1	10,1	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

SPOP dan NJOP4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	11	7,0	7,0	7,0
	Tidak Setuju	30	19,0	19,0	25,9
	Ragu-ragu	58	36,7	36,7	62,7
	Setuju	46	29,1	29,1	91,8
	Sangat Setuju	13	8,2	8,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Dasar Pengenaan1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	10	6,3	6,3	6,3
	Tidak Setuju	36	22,8	22,8	29,1
	Ragu-ragu	66	41,8	41,8	70,9
	Setuju	40	25,3	25,3	96,2
	Sangat Setuju	6	3,8	3,8	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Dasar Pengenaan2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	25	15,8	15,8	15,8
	Tidak Setuju	33	20,9	20,9	36,7
	Ragu-ragu	43	27,2	27,2	63,9
	Setuju	41	25,9	25,9	89,9
	Sangat Setuju	16	10,1	10,1	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Dasar Pengenaan3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	15	9,5	9,5	9,5
	Tidak Setuju	43	27,2	27,2	36,7
	Ragu-ragu	49	31,0	31,0	67,7
	Setuju	35	22,2	22,2	89,9
	Sangat Setuju	16	10,1	10,1	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Dasar Pengenaan4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	13	8,2	8,2	8,2
	Tidak Setuju	29	18,4	18,4	26,6
	Ragu-ragu	55	34,8	34,8	61,4
	Setuju	48	30,4	30,4	91,8
	Sangat Setuju	13	8,2	8,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	



	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
1	4	4	4	3	3	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	5
2	4	4	1	4	3	3	3	3	3	3	3	1	4	3	3	2
3	2	1	4	1	1	4	1	2	5	1	4	1	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	1	4	3	4	4	4	3
5	5	4	2	5	3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4
6	4	4	3	3	4	3	3	3	3	5	3	4	4	4	3	4
7	3	4	5	5	4	4	3	2	3	3	4	5	4	5	5	4
8	3	3	5	5	3	3	4	4	3	5	3	4	3	4	4	5
9	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2
10	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	2	5
11	2	4	4	5	3	5	1	2	4	5	4	3	3	3	5	4
12	4	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	1	2	3	4	2
13	2	3	3	3	3	2	2	3	4	3	2	1	2	3	3	5
14	3	3	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	2	4	3	4
15	3	2	2	2	4	3	3	4	4	3	3	4	2	2	3	4
16	2	4	4	2	3	2	5	5	2	3	4	2	4	4	2	3
17	3	5	1	4	4	4	4	4	5	2	2	2	4	4	3	3
18	1	2	2	3	4	4	1	1	1	1	1	4	3	3	4	3
19	1	4	2	3	4	4	1	1	1	1	1	4	4	3	4	3
20	3	4	3	3	4	4	4	4	3	2	4	1	3	2	4	3
21	5	5	3	5	4	5	5	4	5	3	5	3	3	3	5	3
22	4	3	5	3	4	3	4	4	5	3	5	3	4	4	4	5
23	4	4	3	4	4	5	5	3	2	4	4	4	3	3	4	3
24	3	4	2	5	4	4	3	3	4	2	5	4	3	3	5	5
25	1	3	3	3	4	4	2	3	3	2	4	1	2	4	3	4
26	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3
27	2	3	3	3	5	1	4	4	2	4	1	2	3	4	4	4

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
28	3	1	4	1	1	3	1	1	1	2	2	4	4	3	1	1
29	3	3	3	3	4	4	4	3	4	5	5	5	3	4	3	1
30	2	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	2	4	4	2
31	4	4	4	3	3	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	5
32	5	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	4	4
33	3	4	5	5	4	4	3	2	3	3	5	5	4	5	5	4
34	3	5	5	5	4	5	3	3	4	3	5	5	4	1	5	4
35	5	3	4	3	3	3	3	3	3	4	5	4	3	3	5	5
36	5	4	3	5	4	4	5	5	5	1	5	5	4	5	5	4
37	5	5	1	4	4	4	4	4	4	2	4	1	4	2	2	3
38	3	4	3	5	4	5	3	5	1	5	5	5	4	5	5	4
39	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	5	5	5	4	3
40	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	2	4	3	3
41	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	2	3	2	4	3	3	5	3	2	4	3	1	2	3	3	4
43	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4
44	4	5	3	2	4	3	3	3	2	3	3	2	3	4	5	4
45	1	1	5	4	5	4	4	1	1	4	3	5	3	3	3	3
46	3	5	4	4	4	4	4	5	2	4	4	4	5	2	5	3
47	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	5
48	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	3	1
49	2	1	5	4	4	5	5	5	3	4	4	4	5	4	5	3
50	3	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4
51	1	3	3	3	2	4	2	3	3	2	3	1	4	4	3	4
52	3	3	5	4	3	3	2	2	2	3	4	3	3	3	2	3
53	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	3
54	1	1	1	1	4	4	3	4	3	3	2	1	3	3	3	2

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
55	3	2	1	2	2	5	2	3	3	2	2	2	4	2	2	4
56	4	3	4	4	4	2	5	3	2	4	4	3	4	2	2	2
57	4	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	4	4
58	4	5	2	3	5	4	2	2	5	2	2	3	5	5	3	5
59	3	4	3	2	2	2	2	4	3	4	2	1	3	4	4	3
60	4	3	3	3	3	5	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4
61	1	1	3	4	4	4	1	4	1	3	3	4	5	4	5	5
62	1	5	5	4	3	4	1	1	4	1	4	4	3	4	1	3
63	4	5	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	2	5	2
64	5	5	5	5	5	5	4	5	4	2	4	5	4	5	5	4
65	5	5	3	1	4	4	3	4	4	4	4	2	3	4	5	4
66	3	4	3	4	4	3	3	3	2	3	1	4	3	5	4	1
67	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	2	4	2
68	4	5	4	5	4	5	3	4	3	2	4	2	4	4	4	5
69	1	5	4	4	5	4	4	4	1	3	4	4	3	4	3	5
70	3	4	2	2	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4
71	1	1	2	2	4	4	3	1	1	1	1	1	3	4	2	3
72	3	3	3	5	4	3	3	5	5	1	3	4	3	4	5	4
73	5	5	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	5	3	4	2
74	3	2	1	3	4	2	3	3	5	4	2	1	2	2	2	5
75	4	3	3	4	3	4	3	2	1	5	4	4	5	4	5	3
76	3	4	3	4	1	2	1	4	4	3	2	3	2	3	3	3
77	4	4	1	4	4	4	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4
78	1	1	5	4	5	4	4	1	1	4	5	5	3	3	3	3
79	1	1	1	1	4	3	3	4	3	3	2	1	3	3	3	2
80	2	2	3	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	5	4
81	4	5	3	3	3	5	4	5	3	5	5	4	4	4	3	5

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
82	3	3	2	2	2	4	2	2	4	4	4	4	1	4	3	3
83	3	3	5	4	3	3	2	2	2	3	4	3	3	3	2	3
84	4	3	4	4	3	3	3	4	4	1	4	3	3	3	3	3
85	4	3	1	3	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	3
86	2	5	2	1	4	2	1	3	5	2	2	4	4	2	5	3
87	1	2	2	1	1	3	1	4	1	4	3	1	3	3	2	3
88	3	1	1	1	5	1	1	3	1	3	1	1	1	3	3	1
89	4	3	3	3	3	4	2	3	4	2	3	5	5	5	4	3
90	4	4	5	2	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	2	4
91	4	5	2	3	5	4	2	2	5	2	2	3	5	4	3	5
92	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	3	3	4	4	5	4
93	4	1	3	4	4	3	4	3	5	2	1	3	3	3	4	5
94	2	2	3	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	5	4
95	4	4	5	4	4	3	4	5	4	3	5	3	3	3	4	4
96	2	4	4	5	3	5	1	2	4	5	4	3	3	3	5	4
97	3	4	3	2	3	3	2	3	4	3	3	1	2	4	4	4
98	4	5	4	4	5	4	1	1	1	3	1	4	4	4	1	3
99	2	1	3	4	4	5	4	5	3	4	4	4	5	4	5	3
100	4	5	4	4	3	5	3	4	4	4	3	4	5	2	4	5
101	5	5	3	5	4	5	5	4	5	3	5	3	3	3	5	3
102	4	2	2	4	3	5	4	4	5	2	3	4	5	4	4	4
103	3	4	5	4	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
104	5	4	1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4
105	3	4	5	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	1
106	1	1	2	1	4	4	4	1	3	4	5	5	4	4	4	3
107	2	2	3	2	3	3	5	2	5	5	3	4	3	4	2	4
108	1	2	1	2	2	2	2	3	1	2	2	1	2	4	3	2

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
109	4	3	3	4	3	5	3	2	1	5	4	4	5	5	5	3
110	1	3	3	4	4	5	3	1	1	3	3	2	5	2	5	3
111	3	4	2	2	4	2	3	2	2	2	2	2	2	4	4	2
112	4	4	5	3	3	5	5	4	1	3	4	3	4	4	3	2
113	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	1	5	5	4
114	2	5	4	2	3	5	5	3	5	3	4	4	5	4	5	5
115	5	5	4	3	3	3	3	3	4	5	3	3	3	3	3	4
116	3	5	5	4	5	5	5	4	3	5	5	4	4	2	5	4
117	4	2	2	3	5	3	4	4	2	4	3	4	3	4	2	3
118	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	2
119	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2
120	4	4	3	3	4	4	2	4	3	2	4	3	3	2	4	3
121	4	5	3	5	5	5	3	5	4	3	4	4	4	4	4	5
122	5	5	1	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4
123	1	3	4	4	3	5	4	5	5	1	4	4	4	4	4	4
124	5	3	4	4	5	4	3	2	5	2	5	5	4	4	5	5
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
126	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5	5	3	1	3	5	4
127	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4
128	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3
129	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	1	5	4
130	2	5	2	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4
131	3	4	2	3	5	5	5	4	3	4	4	5	2	3	4	3
132	4	4	3	4	4	4	3	4	5	5	4	4	1	4	4	4
133	3	3	3	2	4	4	2	2	3	1	3	4	5	2	4	2
134	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4
135	5	5	4	4	5	4	5	3	5	5	5	3	1	4	5	4

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
136	2	5	2	2	3	5	4	3	5	3	4	4	5	4	5	5
137	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4
138	2	4	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3
139	4	5	4	4	5	5	4	3	5	1	4	4	4	4	4	5
140	3	4	1	4	3	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	3
141	5	5	3	3	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	3	5
142	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5
143	4	4	3	5	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4
144	3	4	4	5	4	3	3	5	5	5	5	3	4	4	5	4
145	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	2
146	5	4	3	5	4	4	5	5	5	1	5	5	4	4	5	4
147	3	3	3	3	3	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4
148	5	3	3	3	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	3	5
149	5	3	3	4	5	4	4	5	4	5	4	3	3	5	4	4
150	4	2	2	4	3	3	4	4	5	2	3	4	5	4	4	4
151	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4
152	4	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	5	4	4
153	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4
154	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4
155	2	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4
156	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4
157	3	5	1	4	5	4	4	5	3	2	4	5	4	4	5	4
158	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4

Frequencies

Statistics															
		Kesadaran1	Kesadaran2	Kesadaran3	Kesadaran4	Kelancaran1	Kelancaran2	Kelancaran3	Kelancaran4	Ketepatan Waktu1	Ketepatan Waktu2	Ketepatan Waktu3	Ketepatan Waktu4	Ketaatan1	Ketaatan2
N	Valid	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Kesadaran1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	17	10,8	10,8	10,8
	Tidak Setuju	20	12,7	12,7	23,4
	Ragu-ragu	40	25,3	25,3	48,7
	Setuju	55	34,8	34,8	83,5
	Sangat Setuju	26	16,5	16,5	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kesadaran2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	13	8,2	8,2	8,2
	Tidak Setuju	13	8,2	8,2	16,5
	Ragu-ragu	32	20,3	20,3	36,7
	Setuju	61	38,6	38,6	75,3
	Sangat Setuju	39	24,7	24,7	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kesadaran3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	15	9,5	9,5	9,5
	Tidak Setuju	29	18,4	18,4	27,8
	Ragu-ragu	48	30,4	30,4	58,2
	Setuju	39	24,7	24,7	82,9
	Sangat Setuju	27	17,1	17,1	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kesadaran4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	10	6,3	6,3	6,3
	Tidak Setuju	16	10,1	10,1	16,5
	Ragu-ragu	36	22,8	22,8	39,2
	Setuju	68	43,0	43,0	82,3
	Sangat Setuju	28	17,7	17,7	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kelancaran1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	3,2	3,2	3,2
	Tidak Setuju	5	3,2	3,2	6,3
	Ragu-ragu	41	25,9	25,9	32,3
	Setuju	72	45,6	45,6	77,8
	Sangat Setuju	35	22,2	22,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kelancaran2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	1,9	1,9	1,9
	Tidak Setuju	10	6,3	6,3	8,2
	Ragu-ragu	33	20,9	20,9	29,1
	Setuju	78	49,4	49,4	78,5
	Sangat Setuju	34	21,5	21,5	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kelancaran3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	14	8,9	8,9	8,9
	Tidak Setuju	18	11,4	11,4	20,3
	Ragu-ragu	44	27,8	27,8	48,1
	Setuju	53	33,5	33,5	81,6
	Sangat Setuju	29	18,4	18,4	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Kelancaran4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	11	7,0	7,0	7,0
	Tidak Setuju	20	12,7	12,7	19,6
	Ragu-ragu	42	26,6	26,6	46,2
	Setuju	56	35,4	35,4	81,6
	Sangat Setuju	29	18,4	18,4	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Ketepatan Waktu1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	18	11,4	11,4	11,4
	Tidak Setuju	13	8,2	8,2	19,6
	Ragu-ragu	41	25,9	25,9	45,6
	Setuju	49	31,0	31,0	76,6
	Sangat Setuju	37	23,4	23,4	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Ketepatan Waktu2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	15	9,5	9,5	9,5
	Tidak Setuju	27	17,1	17,1	26,6
	Ragu-ragu	38	24,1	24,1	50,6
	Setuju	49	31,0	31,0	81,6
	Sangat Setuju	29	18,4	18,4	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Ketepatan Waktu3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	9	5,7	5,7	5,7
	Tidak Setuju	17	10,8	10,8	16,5
	Ragu-ragu	33	20,9	20,9	37,3
	Setuju	71	44,9	44,9	82,3
	Sangat Setuju	28	17,7	17,7	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Ketepatan Waktu4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	19	12,0	12,0	12,0
	Tidak Setuju	12	7,6	7,6	19,6
	Ragu-ragu	30	19,0	19,0	38,6
	Setuju	66	41,8	41,8	80,4
	Sangat Setuju	31	19,6	19,6	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Ketaatan1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	6	3,8	3,8	3,8
	Tidak Setuju	18	11,4	11,4	15,2
	Ragu-ragu	39	24,7	24,7	39,9
	Setuju	63	39,9	39,9	79,7
	Sangat Setuju	32	20,3	20,3	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Ketaatan2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	1,9	1,9	1,9
	Tidak Setuju	17	10,8	10,8	12,7
	Ragu-ragu	36	22,8	22,8	35,4
	Setuju	79	50,0	50,0	85,4
	Sangat Setuju	23	14,6	14,6	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Ketaatan3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	1,9	1,9	1,9
	Tidak Setuju	13	8,2	8,2	10,1
	Ragu-ragu	32	20,3	20,3	30,4
	Setuju	59	37,3	37,3	67,7
	Sangat Setuju	51	32,3	32,3	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Ketaatan4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	6	3,8	3,8	3,8
	Tidak Setuju	17	10,8	10,8	14,6
	Ragu-ragu	42	26,6	26,6	41,1
	Setuju	67	42,4	42,4	83,5
	Sangat Setuju	26	16,5	16,5	100,0
	Total	158	100,0	100,0	



```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED )
  /RESIDUALS DURBIN NORM(ZRESID) .

```

Regression

[DataSet1] D:\SPSS 23\RHENO REGRESI.sav

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengetahu an Pajak, Tingkat ^a Ekonomi	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,718 ^a	,516	,510	6,885	2,021

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7837,270	2	3918,635	82,663	,000 ^a
	Residual	7347,768	155	47,405		
	Total	15185,038	157			

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	17,810	3,281		5,429
	Tingkat Ekonomi	,723	,144	,518	5,034
	Pengetahuan Pajak	,265	,120	,227	2,204

Coefficients^a

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1			
(Constant)	,000		
Tingkat Ekonomi	,000	,295	3,385
Pengetahuan Pajak	,029	,295	3,385

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index
1	1	2,975	1,000
	2	,020	12,064
	3	,005	24,357

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions		
		(Constant)	Tingkat Ekonomi	Pengetahuan Pajak
1	1	,00	,00	,00
	2	,88	,15	,03
	3	,11	,85	,97

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics^a

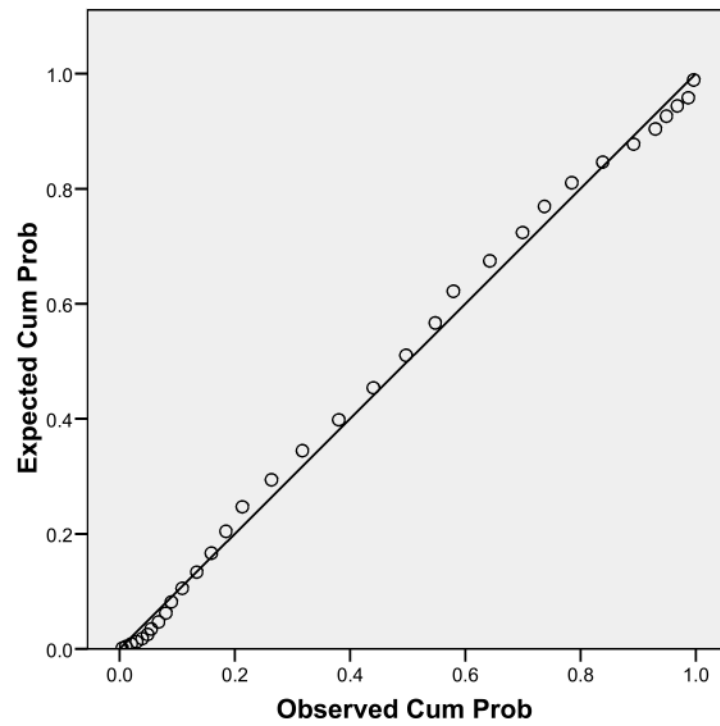
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	34,29	73,15	56,82	7,065	158
Residual	-24,136	24,279	,000	6,841	158
Std. Predicted Value	-3,190	2,311	,000	1,000	158
Std. Residual	-3,506	3,526	,000	,994	158

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

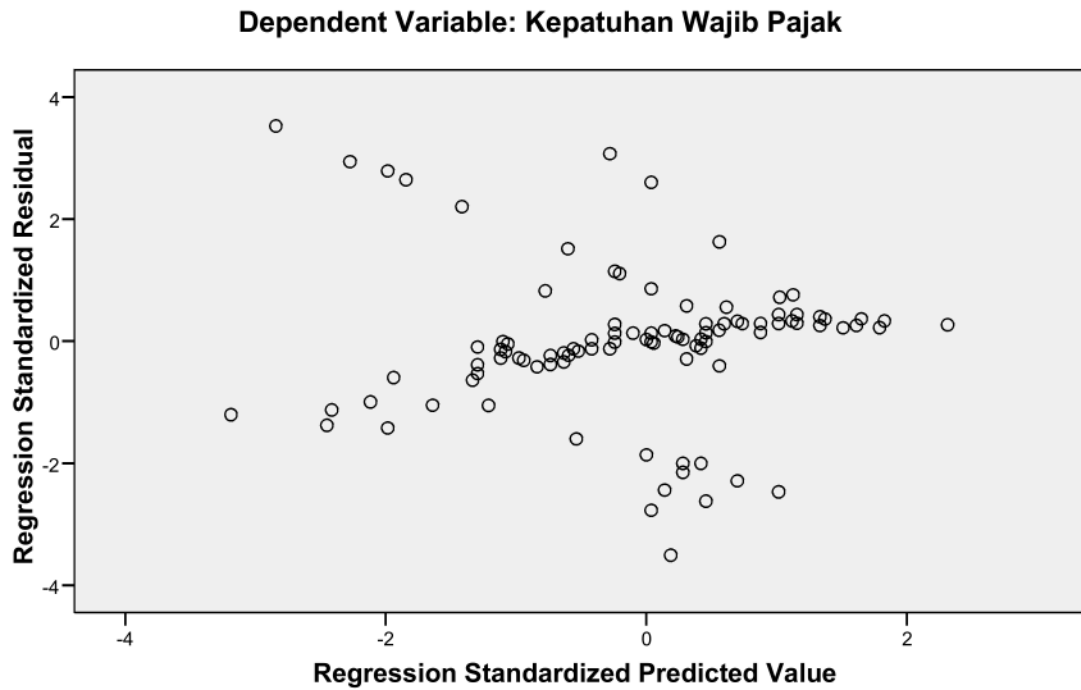
Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Scatterplot



```

FREQUENCIES
  VARIABLES=X1 X2 Y
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN
  /ORDER= ANALYSIS .
  
```

Frequencies

[DataSet1] D:\SPSS 23\RHENO REGRESI.sav

Statistics

		Tingkat Ekonomi	Pengetahuan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
N	Valid	158	158	158
	Missing	0	0	0
Mean		35,82	49,54	56,82
Std. Error of Mean		,560	,670	,782
Std. Deviation		7,037	8,425	9,835
Minimum		14	24	26
Maximum		52	67	76

Frequency Table

Tingkat Ekonomi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14	1	,6	,6	,6
	17	1	,6	,6	1,3
	19	2	1,3	1,3	2,5
	20	1	,6	,6	3,2
	21	2	1,3	1,3	4,4
	22	1	,6	,6	5,1
	23	1	,6	,6	5,7
	24	3	1,9	1,9	7,6
	25	1	,6	,6	8,2
	26	2	1,3	1,3	9,5
	27	4	2,5	2,5	12,0
	28	4	2,5	2,5	14,6
	29	4	2,5	2,5	17,1
	30	4	2,5	2,5	19,6
	31	5	3,2	3,2	22,8
	32	11	7,0	7,0	29,7
	33	6	3,8	3,8	33,5
	34	14	8,9	8,9	42,4
	35	5	3,2	3,2	45,6
	36	13	8,2	8,2	53,8
	37	3	1,9	1,9	55,7
	38	7	4,4	4,4	60,1
	39	13	8,2	8,2	68,4
	40	5	3,2	3,2	71,5
	41	7	4,4	4,4	75,9
	42	8	5,1	5,1	81,0
	43	9	5,7	5,7	86,7
	44	8	5,1	5,1	91,8
	45	4	2,5	2,5	94,3
	46	2	1,3	1,3	95,6
	47	4	2,5	2,5	98,1
	48	2	1,3	1,3	99,4
	52	1	,6	,6	100,0
Total		158	100,0	100,0	

Pengetahuan Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	24	1	,6	,6	,6
	25	1	,6	,6	1,3
	28	1	,6	,6	1,9
	30	2	1,3	1,3	3,2
	31	3	1,9	1,9	5,1
	32	1	,6	,6	5,7
	36	1	,6	,6	6,3
	37	3	1,9	1,9	8,2
	38	3	1,9	1,9	10,1
	39	3	1,9	1,9	12,0
	41	3	1,9	1,9	13,9
	42	4	2,5	2,5	16,5
	43	10	6,3	6,3	22,8
	44	3	1,9	1,9	24,7
	45	7	4,4	4,4	29,1
	46	7	4,4	4,4	33,5
	47	3	1,9	1,9	35,4
	48	9	5,7	5,7	41,1
	49	7	4,4	4,4	45,6
	50	11	7,0	7,0	52,5
	51	7	4,4	4,4	57,0
	52	5	3,2	3,2	60,1
	53	9	5,7	5,7	65,8
	54	7	4,4	4,4	70,3
	55	5	3,2	3,2	73,4
	56	8	5,1	5,1	78,5
	57	10	6,3	6,3	84,8
	58	7	4,4	4,4	89,2
	60	5	3,2	3,2	92,4
	61	1	,6	,6	93,0
	62	3	1,9	1,9	94,9
	63	3	1,9	1,9	96,8
	64	3	1,9	1,9	98,7
	65	1	,6	,6	99,4
	67	1	,6	,6	100,0
Total		158	100,0	100,0	

Kepatuhan Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26	1	,6	,6	,6
	30	1	,6	,6	1,3
	32	1	,6	,6	1,9
	33	1	,6	,6	2,5
	34	1	,6	,6	3,2
	35	1	,6	,6	3,8
	38	2	1,3	1,3	5,1
	39	1	,6	,6	5,7
	41	2	1,3	1,3	7,0
	42	2	1,3	1,3	8,2
	43	1	,6	,6	8,9
	44	3	1,9	1,9	10,8
	45	2	1,3	1,3	12,0
	46	2	1,3	1,3	13,3
	47	5	3,2	3,2	16,5
	48	8	5,1	5,1	21,5
	49	4	2,5	2,5	24,1
	50	4	2,5	2,5	26,6
	51	2	1,3	1,3	27,8
	52	8	5,1	5,1	32,9
	53	4	2,5	2,5	35,4
	54	4	2,5	2,5	38,0
	55	3	1,9	1,9	39,9
	56	2	1,3	1,3	41,1
	57	11	7,0	7,0	48,1
	58	3	1,9	1,9	50,0
	59	11	7,0	7,0	57,0
	60	3	1,9	1,9	58,9
	61	6	3,8	3,8	62,7
	62	6	3,8	3,8	66,5
	63	8	5,1	5,1	71,5
	64	8	5,1	5,1	76,6
	65	6	3,8	3,8	80,4
	66	6	3,8	3,8	84,2
	67	6	3,8	3,8	88,0
	68	4	2,5	2,5	90,5
	69	5	3,2	3,2	93,7
	70	2	1,3	1,3	94,9
	71	3	1,9	1,9	96,8
	72	2	1,3	1,3	98,1
	75	2	1,3	1,3	99,4
	76	1	,6	,6	100,0
Total		158	100,0	100,0	

NPAR TESTS
 /K-S(NORMAL)= RES_1
 /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] D:\SPSS 23\RHENO REGRESI.sav

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		158
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,84113095
Most Extreme Differences	Absolute	,216
	Positive	,216
	Negative	-,197
Kolmogorov-Smirnov Z		,927
Asymp. Sig. (2-tailed)		,357

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Frequencies

Statistics					
		Daerah Responden	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
N	Valid	158	158	158	158
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

Daerah Responden					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Desa Dermolemahbang	115	72,8	72,8	72,8
	Kelurahan Tumenggungan	43	27,2	27,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	106	67,1	67,1	67,1
	Perempuan	52	32,9	32,9	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 30 tahun	40	25,3	25,3	25,3
	30-50 tahun	71	44,9	44,9	70,3
	> 50 tahun	47	29,7	29,7	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dasar (SD-SMP)	36	22,8	22,8	22,8
	Menengah (SMA)	103	65,2	65,2	88,0
	Tinggi (PT)	19	12,0	12,0	100,0
	Total	158	100,0	100,0	



Frequencies

Statistics

		Daerah Responden	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
N	Valid	158	158	158	158
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

Daerah Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Desa Dermolemahbang	115	72,8	72,8	72,8
	Kelurahan Tumenggungan	43	27,2	27,2	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	106	67,1	67,1	67,1
	Perempuan	52	32,9	32,9	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 30 tahun	40	25,3	25,3	25,3
	30-50 tahun	71	44,9	44,9	70,3
	> 50 tahun	47	29,7	29,7	100,0
	Total	158	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dasar (SD-SMP)	36	22,8	22,8	22,8
	Menengah (SMA)	103	65,2	65,2	88,0
	Tinggi (PT)	19	12,0	12,0	100,0
	Total	158	100,0	100,0	



	X1	X2	Y
1	42	56	64
2	28	41	47
3	27	38	43
4	33	46	53
5	39	51	59
6	36	49	57
7	25	63	63
8	17	25	61
9	36	49	44
10	40	53	62
11	35	60	57
12	32	43	50
13	27	39	44
14	34	47	54
15	30	43	48
16	32	43	51
17	34	47	54
18	24	38	38
19	37	50	41
20	32	44	51
21	43	57	66
22	35	60	63
23	37	50	59
24	38	50	59
25	41	54	46
26	34	47	76
27	31	43	49
28	21	37	33
29	36	50	57
30	36	50	57
31	42	56	64
32	34	48	55
33	41	54	64
34	41	54	64
35	38	51	59
36	46	49	69
37	33	46	53
38	43	57	66
39	44	57	67
40	31	43	49
41	39	52	59
42	28	41	47
43	24	44	62
44	33	46	53
45	31	43	50

	X1	X2	Y
46	40	53	62
47	20	32	61
48	14	24	26
49	36	50	63
50	44	58	67
51	27	39	45
52	29	42	48
53	36	50	75
54	24	30	39
55	26	44	41
56	32	45	52
57	33	46	53
58	35	31	57
59	39	52	46
60	33	46	54
61	32	45	52
62	28	41	48
63	36	50	58
64	36	64	72
65	39	52	59
66	31	43	50
67	34	48	55
68	22	38	62
69	36	50	58
70	26	62	42
71	36	54	34
72	36	64	58
73	39	52	60
74	38	51	44
75	35	31	57
76	38	51	45
77	34	48	55
78	32	45	52
79	36	50	38
80	29	42	48
81	42	56	65
82	27	39	47
83	28	42	48
84	32	45	52
85	33	46	54
86	43	57	47
87	23	28	35
88	19	30	30
89	34	48	56
90	39	52	60

	X1	X2	Y
91	34	48	56
92	35	49	57
93	32	45	52
94	29	42	48
95	21	37	62
96	34	48	57
97	30	43	48
98	30	37	49
99	39	53	60
100	34	48	63
101	43	57	66
102	36	55	59
103	41	55	64
104	41	55	64
105	39	53	61
106	31	43	50
107	32	45	52
108	19	31	32
109	38	51	59
110	29	43	48
111	39	53	42
112	34	48	57
113	43	57	66
114	41	55	64
115	34	48	57
116	45	60	68
117	32	45	52
118	41	55	64
119	42	49	65
120	32	46	52
121	44	58	67
122	48	64	71
123	37	50	59
124	42	56	65
125	40	54	63
126	44	58	67
127	39	53	61
128	34	49	63
129	47	49	70
130	47	62	70
131	38	51	59
132	39	53	61
133	43	57	47
134	45	60	69
135	44	58	67

	X1	X2	Y
136	39	53	61
137	45	60	69
138	30	36	49
139	42	56	65
140	38	51	59
141	47	63	71
142	44	58	68
143	40	54	63
144	43	57	66
145	47	63	71
146	44	58	68
147	40	54	63
148	45	61	69
149	42	56	65
150	34	56	57
151	48	65	72
152	42	56	65
153	44	58	68
154	46	62	69
155	43	57	66
156	52	67	75
157	39	53	62
158	43	57	67

```
SAVE OUTFILE='D:\SPSS 23\RHENO X1.sav'
/COMPRESSED.
RELIABILITY
/VARIABLES=x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11
/SCALE('VALIDITAS RELIABILITAS TINGKAT EKONOMI (X1)')
ALL/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL .
```

Reliability

[DataSet0] D:\SPSS 23\RHENO X1.sav

Scale: VALIDITAS RELIABILITAS TINGKAT EKONOMI (X1)

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	158	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	158	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,807	11

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
x1.1	3,47	,969	158
x1.2	3,25	1,008	158
x1.3	3,03	1,183	158
x1.4	3,28	1,146	158
x1.5	3,46	1,026	158
x1.6	2,89	1,143	158
x1.7	3,72	1,053	158
x1.8	3,25	1,033	158
x1.9	3,15	1,139	158
x1.10	3,17	1,090	158
x1.11	3,16	1,218	158

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	32,34	42,341	,494	,790
x1.2	32,57	43,049	,412	,797
x1.3	32,79	40,383	,514	,787
x1.4	32,53	42,849	,357	,804
x1.5	32,36	40,933	,574	,782
x1.6	32,92	41,459	,458	,793
x1.7	32,10	43,837	,327	,805
x1.8	32,57	40,922	,570	,782
x1.9	32,67	39,776	,588	,779
x1.10	32,65	42,205	,432	,796
x1.11	32,66	41,042	,448	,795

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
35,82	49,514	7,037	11

```
SAVE OUTFILE='D:\SPSS 23\RHENO X2.sav'
/COMPRESSED.
RELIABILITY
/VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 x2.9 x2.10 x2.11
x2.12
x2.13 x2.14 x2.15 x2.16
/SCALE('VALIDITAS RELIABILITAS PENGETAHUAN PAJAK (X2)')
ALL/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL .
```

Reliability

[DataSet0] D:\SPSS 23\RHENO X2.sav

Scale: VALIDITAS RELIABILITAS PENGETAHUAN PAJAK (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	158	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	158	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,785	16

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
x2.1	3,56	,941	158
x2.2	2,85	1,087	158
x2.3	2,58	1,030	158
x2.4	3,34	1,270	158
x2.5	3,17	1,023	158
x2.6	3,12	,999	158
x2.7	3,01	1,050	158
x2.8	3,39	1,182	158
x2.9	3,04	1,164	158
x2.10	3,01	1,109	158
x2.11	3,36	,985	158
x2.12	3,13	1,039	158
x2.13	2,97	,944	158
x2.14	2,94	1,230	158
x2.15	2,96	1,134	158
x2.16	3,12	1,067	158

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	45,98	62,350	,521	,764
x2.2	46,68	61,644	,477	,766
x2.3	46,96	63,400	,397	,773
x2.4	46,20	61,220	,410	,772
x2.5	46,37	64,896	,305	,779
x2.6	46,42	64,640	,332	,777
x2.7	46,53	64,149	,341	,777
x2.8	46,15	63,556	,319	,779
x2.9	46,49	62,353	,395	,773
x2.10	46,53	63,066	,379	,774
x2.11	46,18	62,975	,450	,769
x2.12	46,41	61,925	,488	,766
x2.13	46,56	65,254	,317	,778
x2.14	46,60	63,859	,285	,782
x2.15	46,58	62,972	,373	,774
x2.16	46,42	64,156	,332	,777

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
49,54	70,976	8,425	16

```

SAVE OUTFILE='D:\SPSS 23\RHENO Y.sav'
/COMPRESSED.
RELIABILITY
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
/SCALE('VALIDITAS RELIABILITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)')
ALL/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL .

```

Reliability

[DataSet0] D:\SPSS 23\RHENO Y.sav

Scale: VALIDITAS RELIABILITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	158	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	158	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,850	16

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1	3,34	1,208	158
Y2	3,63	1,180	158
Y3	3,22	1,207	158
Y4	3,56	1,091	158
Y5	3,80	,927	158
Y6	3,82	,907	158
Y7	3,41	1,174	158
Y8	3,46	1,138	158
Y9	3,47	1,255	158
Y10	3,32	1,227	158
Y11	3,58	1,078	158
Y12	3,49	1,235	158
Y13	3,61	1,051	158
Y14	3,65	,924	158
Y15	3,90	1,011	158
Y16	3,57	1,012	158

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	53,49	83,844	,516	,839
Y2	53,19	84,346	,507	,840
Y3	53,61	87,998	,321	,850
Y4	53,27	83,598	,598	,835
Y5	53,02	87,981	,453	,843
Y6	53,00	87,287	,508	,841
Y7	53,41	82,868	,584	,835
Y8	53,37	85,011	,496	,840
Y9	53,35	84,230	,474	,842
Y10	53,51	87,207	,350	,849
Y11	53,24	82,630	,660	,832
Y12	53,33	81,916	,594	,835
Y13	53,21	89,020	,333	,849
Y14	53,18	89,599	,358	,847
Y15	52,92	86,962	,463	,842
Y16	53,25	89,209	,339	,848

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
56,82	96,720	9,835	16



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
KELURAHAN TUMENGGUNGAN
Jalan Laras – liris No. 56 Telp. (0322) 322402 Lamongan

SURAT KETERANGAN
No. 070/22/413.406/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHOIRUL UMAMI, SH
Nip : 19670718 199003 1 009
Jabatan : Lurah Tumenggungan
Kecamatan : Lamongan
Kabupaten : Lamongan

Menerangkan bahwa :

Nama : RHINO HARI WICAKSONO RISTIANTO
NIM : 105030400111089
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang.
Alamat : Ds. Sukodadi RT 001 RW 06 Kecamatan Sukodadi Kab. Lamongan.

Telah melakukan survey/ penelitian di Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan judul/thema Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada tanggal 15 sampai dengan 31 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 5 September 2016
LURAH TUMENGGUNGAN
CHOIRUL UMAMI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19670718 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA DERMOLEMAHBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.4/ /413.327.3/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAFI'
Jabatan : Kepala Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo,
Kabupaten Lamongan

MENERANGKAN

Kepada :

Nama : RHINO HARI WICAKSONO RISTIANTO
NIK/NIM : 10503040011089
Alamat : Desa Sukodadi, RT. 001, RW. 006, Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan
Pekerjaan/jabatan : Mahasiswa
Instansi/organisasi : Universitas Brawijaya Malang
Kebangsaan : Indonesia

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian /survey/kegiatan dengan :

1. Judul proposal / kegiatan : Determinan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan
2. Waktu penelitian : 15 Agustus s/d 31 Agustus 2016
survey/kegiatan
3. Lokasi penelitian : Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo,
survey/kegiatan Kabupaten Lamongan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dermolemahbang , 1 September 2016

KEPALA DESA DERMOLEMAHBANG



NAFI'

Curriculum Vitae



Nama : Rhino Hari Wicaksono Ristianto
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat : Griya Shanta J 108
Telepon : 085-632-602-00
E-mail : renoristi@yahoo.co.id

Pendidikan Formal : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sukodadi
: SD Negeri 1 Sukodadi
: SMP Negeri 1 Pucuk
: SMA Negeri 1 Lamongan
: Universitas Brawijaya Malang